



RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Tahun 2027



44AB1D3514

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code
atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekretariat Daerah) Tahun 2027 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menegaskan bahwa setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun rencana kerja tahunan sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029 serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027 guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Dalam proses penyusunannya, Renja Tahun 2027 memperhatikan berbagai dinamika pembangunan serta masukan dari para pemangku kepentingan yang dihimpun melalui rangkaian Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah. Proses tersebut dilaksanakan melalui diskusi tematik dan *Focus Group Discussion* (FGD) pada lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum, yang kemudian dirumuskan dalam forum pleno sebagai kesepakatan bersama arah dukungan kebijakan Sekretariat Daerah terhadap prioritas pembangunan daerah.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, terkoordinasi, dan akuntabel. Selain itu, dokumen ini juga menjadi instrumen penting dalam mendukung peran Sekretariat Daerah sebagai pengoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawal perumusan kebijakan strategis, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, baik perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, kementerian dan lembaga, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), akademisi, maupun seluruh pemangku kepentingan lainnya yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mendukung tercapainya pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan.

Bandung, 29 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama,



44AB1D3514

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	iv
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025.....	9
2.1. Hasil Evaluasi Renja Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2026	9
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	58
2.3. Review terhadap RKPD	65
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Stakeholder	78
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	96
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	96
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah.....	119
3.3. Program dan Kegiatan	128
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	159
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	209
5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027	209
5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027	212
BAB VI PENUTUP	215
6.1. Kesimpulan	215
6.2. Kaidah Pelaksanaan	217
6.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	218



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Tingkat Ketercapaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2025	10
Gambar 2 2 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 per Biro	55
Gambar 2 3 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 per Program	56
Gambar 2.4 Pagu dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 per Program	57
Gambar 3.1 Visi dan Misi Presiden (Prioritas Pembangunan/Asta Cita)	100
Gambar 3.2 Sasaran Pembangunan dan Fokus Pembangunan Tahun 2027	102
Gambar 4.1 Rencana Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2027 per Biro	171



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025.....	14
Tabel 2.2 Progres Pencapaian Kinerja Utama s.d. Triwulan 2 Tahun 2026	31
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s.d. Tahun 2026 (Triwulan II)	33
Tabel 2.4 Isu-isu pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah.....	60
Tabel 2.5 <i>Review</i> Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah pada Rancangan RKPD	66
Tabel 2.6 Tabel Program Pembangunan Tahun 2027.....	76
Tabel 2.7 Analisis Masukan Stakeholder terhadap Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027	84
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2027	103
Tabel 3.2 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis, dan Target Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2027	108
Tabel 3.3 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis, dan Target Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2027	111
Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027	125
Tabel 3.5 Dukungan Biro Pada Program Prioritas Pembangunan Tahun 2027	133
Tabel 4.1 Target ‘Jumlah Produk Tersertifikasi Halal’	164
Tabel 4.2 Pagu Anggaran Sekretariat Daerah per Biro tahun 2027	169
Tabel 4.3 Rencana Alokasi Anggaran per Program Tahun 2027	170



Tabel 4.4 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2027 ...	172
Tabel 5.1 Target Indikator Kinerja Utama	210
Tabel 5.2 Target Indikator Kinerja Kunci	213





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code
atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

44AB1D3514

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel memerlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Perencanaan tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan tujuan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam kerangka tersebut, penyusunan dokumen Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran operasional dari Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2027. Dokumen ini menjadi instrumen perencanaan tahunan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Penyusunan dokumen ini juga mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027, sehingga tercipta keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Selain itu, dinamika perkembangan pembangunan, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut Sekretariat Daerah untuk terus meningkatkan kinerja kelembagaan dan kualitas perencanaan. Oleh karena itu, penyusunan



Renja Tahun 2027 dilakukan melalui proses yang partisipatif, terintegrasi, dan berbasis pada evaluasi kinerja tahun sebelumnya, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan organisasi serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara optimal.

Selain bersandar pada kerangka regulatif, penyusunan Renja juga memperhatikan berbagai saran dan pertimbangan dari para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan BUMD. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap arah kebijakan yang tertuang dalam Renja responsif terhadap kebutuhan publik serta adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah. Dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas, dokumen Renja ini dirancang untuk memberikan arah yang jelas bagi Sekretariat Daerah dalam mengimplementasikan program dan kegiatan tahun 2027 yang selaras dengan fokus pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tata Kelola Pembangunan”.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat;



5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;



14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja bagi Sekretariat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Sekretariat Daerah dan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Selanjutnya penyusunan Renja Sekretariat Daerah bertujuan untuk menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah tahun 2027.



1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan rancangan awal Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja perangkat daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja perangkat daerah sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022



tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Pada bagian ini mengulas mengenai isu-isu yang berpengaruh pada keberlangsungan pelaksanaan tugas dan kinerja Sekretariat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Pada bagian ini digambarkan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan lingkup Sekretariat Daerah yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029. Proses pembandingan ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi sejauh mana konsistensi dan korelasi antar dokumen perencanaan level pemerintah daerah dengan dokumen perencanaan level perangkat daerah, karena konsistensi perencanaan tersebut penting dalam memastikan terealisasinya kebijakan perencanaan tersebut sampai pada level terluar hingga berdampak pada peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Stakeholder

Terdapat hasil uraian kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).



BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan.

Memuat penjabaran program dan kebijakan serta penjelasan mengenai dasar penetapannya sebagai cara untuk mencapai sasaran.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2027.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Memuat Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025.

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Memuat Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025.



BAB VI PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Renja Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2026

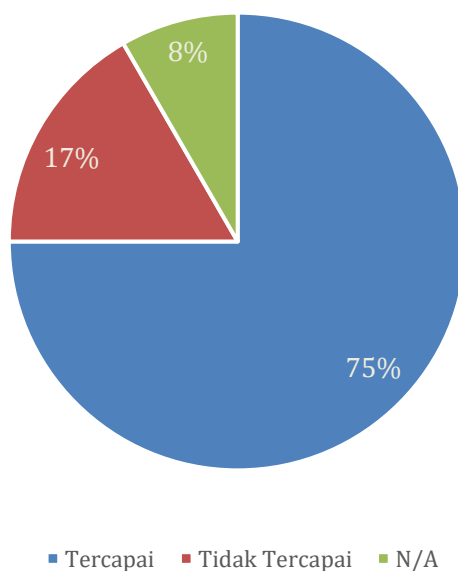
Sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025, tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah diarahkan untuk secara terfokus mendukung pembangunan Jawa Barat dalam tiga aspek yaitu aspek pembangunan sumber daya manusia, aspek pembangunan makro ekonomi, dan aspek tata kelola pemerintahan. Untuk keseluruhan tiga aspek pembangunan tersebut, ditetapkan 12 sasaran dan indikator kinerja yang menggambarkan peran Sekretariat Daerah dalam melakukan perumusan kebijakan umum daerah provinsi, memberikan fasilitasi dan koordinasi perumusan kebijakan daerah yang diinisiasi perangkat daerah, melakukan koordinasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah, serta memberikan fasilitasi administratif.

Selanjutnya, berdasarkan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025, kinerja Sekretariat Daerah tercapai 108,76 persen dengan tingkat keberhasilan sebesar 81,82 persen. Artinya dari 12 sasaran, sembilan diantaranya mengalami ketercapaian target. Sementara dua diantaranya mengalami kondisi sebaliknya dan satu indikator tidak memiliki data realisasi. Sembilan indikator dengan ketercapaian target adalah 'Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi', 'Tingkat Inflasi', 'Indeks Reformasi Hukum', 'Nilai Kualitas Kebijakan Daerah', 'Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$ ', 'Indeks Tata Kelola Pengadaan', 'Nilai Evaluasi Kelembagaan', 'Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A', dan 'Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan'. Sementara dua indikator yang mengalami kondisi berkebalikan adalah 'Persentase BUMD Sehat' dan 'Indeks Pelayanan Publik' serta indikator yang tidak memiliki data



realisasi adalah 'Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi'.

Gambar 2.1 Tingkat Ketercapaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2025



Lebih lanjut dapat disampaikan bahwa pada aspek pembangunan sumber daya manusia, dukungan Sekretariat Daerah yang diukur melalui indikator 'Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi' terealisasi sebesar 9,92 persen dari target 9,64 persen atau mencapai 102,90 persen. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi di Jawa Barat yang didukung oleh kebijakan pembangunan pendidikan, sinergi dengan pemerintah pusat, kolaborasi efektif dengan perguruan tinggi serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam mendukung agenda pembangunan jangka menengah daerah yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama.

Kemudian pada aspek pembangunan ekonomi makro, kinerja Sekretariat Daerah diukur melalui dua indikator yaitu 'Tingkat Inflasi' dan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

'Persentase BUMD Sehat'. Indikator 'Tingkat Inflasi' terealisasi sebesar 2,63 persen, lebih rendah dari rentang target 3,3–3,8 persen sehingga capaian kinerja mencapai 125,48 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian inflasi daerah berjalan efektif melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), penguatan pemantauan harga komoditas strategis, serta sinergi kebijakan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pelaku usaha.

Namun demikian, pada indikator 'Persentase BUMD Sehat', realisasi kinerja berada pada angka 68,57 persen dari target 78,37 persen sehingga kinerja tercapai 87,50 persen. Hasil ini memperlihatkan bahwa perumusan kebijakan, fasilitasi penguatan, serta pembinaan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah belum mampu membawa BUMD kepada kondisi yang diinginkan. Tata kelola BUMD Jawa Barat masih belum sepenuhnya berjalan efektif yang menyebabkan kinerja keuangan pada beberapa BUMD tidak optimal yang kemudian berdampak pada terbatasnya daya saing BUMD dalam menghadapi dinamika pasar dan transformasi model bisnis. Oleh karena itu BUMD menghadapi tantangan dari aspek profitabilitas, efisiensi operasional, serta struktur permodalan. Dengan demikian, tujuan pembentukan BUMD dalam pembangunan Jawa Barat tidak terlaksana secara optimal.

Dukungan Sekretariat Daerah pada aspek pembangunan tata kelola pemerintahan, memperlihatkan kondisi yang cukup memuaskan. Pada dimensi tata kelola kebijakan, indikator 'Indeks Reformasi Hukum' mencapai nilai 99,34 poin dari target 89,7 poin atau tercapai sebesar 110,75 persen. Lalu indikator 'Nilai Kualitas Kebijakan Daerah' terealisasi 81,17 poin dari target 76,66 poin atau tercapai 105,88 persen. Keberhasilan kinerja pada dua indikator ini memperlihatkan peran Sekretariat Daerah dalam memastikan bahwa setiap regulasi daerah yang disusun telah melalui proses perencanaan, konsultasi, dan evaluasi yang memadai berjalan dengan efektif. Sehingga kebijakan daerah



semakin berkualitas, adaptif, berbasis analisis, serta memperhatikan prinsip tata kelola regulasi yang baik.

Pada dimensi tata kelola pengadaan barang dan jasa, indikator 'Indeks Tata Kelola Pengadaan' terealisasi 98,45 poin dari target 90,3 poin atau tercapai 109,03 persen. Ketercapaian ini menunjukkan bahwa upaya Sekretariat Daerah dalam mencapai tingkat maturitas UKPBJ, meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengadaan barang/jasa, membangun sistem pengadaan barang dan jasa yang dimanfaatkan secara optimal, serta melakukan fasilitasi dan pembinaan kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa secara global, berjalan dengan efektif. Di samping itu, kolaborasi dengan lembaga pusat yang tinggi menjadi salah satu daya dukung yang optimal dalam pencapaian target kinerja.

Kemudian, pada dimensi kelembagaan, indikator 'Nilai Evaluasi Kelembagaan' teralisasi sebesar 68,45 poin sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga kinerja tercapai tepat 100 persen. Pencapaian ini menunjukkan bahwa upaya Sekretariat Daerah dalam mewujudkan organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang adaptif, *agile*, kolaboratif, dan berbasis kinerja melalui penataan struktur, tugas pokok, dan fungsi organisasi serta penataan proses bisnis, berjalan dengan cukup efektif. Ke depan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan mampu menciptakan organisasi yang organik yang mampu menjawab tantangan pembangunan secara lebih tangguh.

Pada dimensi kinerja, indikator 'Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$ ' terealisasi 91,30 persen dari target 63,28 persen dan dengan demikian kinerja tercapai 144,28 persen. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengendalian kinerja serta konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah. Kondisi ini tidak terlepas dari penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja yang



difasilitasi oleh Sekretariat Daerah dalam aspek pengendalian kinerja pemerintahan daerah,

Selanjutnya, indikator ‘Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Dimensi Pelaporan’ terealisasi 13,71 poin dari target 13,58 poin sehingga kinerja tercapai 100,96 persen. Ketercapaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah terutama dalam aspek kebermanfaatan terhadap perencanaan pembangunan. Hal ini mencerminkan semakin kuatnya integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pelaporan kinerja.

Lalu pada dimensi peningkatan kualitas pelayanan publik, indikator ‘Indeks Pelayanan Publik’ mencapai nilai 4,63 poin dari target 4,76 poin atau tercapai 97,27 persen, sehingga meskipun masih berada pada kategori baik namun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya Sekretariat Daerah dalam menerapkan standar pelayanan kepada penyelenggara pelayanan belum memenuhi. Indikator ini merupakan instrument penilaian dari Kementerian PANRB dan ketercapaian yang tidak memenuhi target didorong oleh hasil penilaian terhadap lokus penyelenggara pelayanan publik belum baik. Hasil penilaian tersebut berkaitan dengan keterbatasan ketersediaan SDM kompeten dan anggaran yang dapat mendukung peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Hal ini kemudian berdampak kepada kualitas pelayanan publik yang bervariasi terutama pada lokus dengan infrastruktur pelayanan publik termasuk didalamnya penggunaan/adaptasi teknologi yang belum memadai.

Sementara itu, untuk pengukuran penerapan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu indikator ‘Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Kategori A’ terealisasi 100 persen dari target 89 persen sehingga kinerja tercapai sebesar 112,36 persen. Ketercapaian ini menunjukkan bahwa upaya Sekretariat Daerah dalam menginternalisasi reformasi birokrasi kepada seluruh unit kerja, berhasil. Hal



ini bermakna bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berada dalam jalur yang benar dalam transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator ke dua belas yaitu ‘Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi’ tidak dapat dilakukan pengukuran sehingga realisasi tanpa data (N/A). Ketiadaan data realisasi pada indikator ini didorong oleh ketiadaan rilis hasil penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan setiap tahun. Evaluasi tersebut diselenggarakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk tahun 2025, hasil dari evaluasi tersebut belum dirilis kepada seluruh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah tidak dapat melakukan pengukuran keberhasilan atau pun kegagalan indikator kinerja.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	9,64	9,92	102,90
2	Terkendalnya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat	Tingkat Inflasi	Persen	3,3 - 3,8	2,63	125,48
3	Meningkatnya Kinerja BUMD	Persentase BUMD Sehat	Persen	78,37	68,57	87,50
4	Regulasi Daerah Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	Poin	89,7	99,34	110,750
5	Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Poin	76,66	81,17	105,88
6	Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target	Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$	Persen	63,28	91,30	144,28



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	90,3	98,45	109,03
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,76	4,63	97,27
9	Kelembagaan <i>Agile</i>	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Poin	68,450	68,450	100,00
10	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	Persen	89	100	112,36
11	Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	Poin	13,58	13,71	100,96
12	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kategori	Tinggi	N/A	-
Rata-Rata Capaian Kinerja						108,76

Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target IKU pada tahun 2025 merupakan hasil dari ketercapaian kinerja biro. Secara umum, kinerja sembilan biro adalah 101,17 persen. Jika dilihat dari ketercapaian seluruh indikator program, kinerja tercapai sebesar 100,51 persen. Dari total 39 indikator kinerja program, sebanyak 38,46 persen tercapai sangat memuaskan (>100%), 53,84 persen tercapai dengan memuaskan (100%) dan 10,25 persen tidak memuaskan (<100%). Adapun target kinerja yang tidak tercapai berkaitan dengan target RoA BUMD yang memiliki pengaruh terhadap ketercapaian indikator 'Persentase BUMD Sehat' serta ketiadaan data pada indikator 'Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi'.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai unit kerja yang mendukung ketercapaian IKU 'Nilai Kualitas Kebijakan' dan 'Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi', memiliki program unggulan



pelayanan di tahun 2025 yaitu penguatan pelayanan pemerintahan daerah yang transparan, responsif, berbasis digital, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Salah satu capaian utama ditunjukkan melalui keberhasilan dalam memperoleh predikat "Informatif" pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Selain itu, pelayanan unggulan mencakup fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah, fasilitasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan akses informasi publik melalui digitalisasi layanan, dan penguatan kerja sama daerah. Beberapa produk yang dihasilkan adalah 101 dokumen MoU yang terdiri dari: Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain sebanyak 12 dokumen; Kerja Sama dengan Pihak Ketiga sebanyak 48 dokumen, Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sebanyak 29 dokumen, Kerja Sama dengan Pemerintah/Lembaga Luar Negeri sebanyak 12 dokumen. Naskah Kerjasama Internasional sebanyak 6 Dokumen, implementasi Kerjasama Luar Negeri sebanyak 12 dokumen, dan evaluasi sebanyak 12 dokumen.

Kemudian, Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (Biro Hukum dan HAM) melaksanakan berbagai program strategis dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib secara hukum dan berkeadilan. Pada tahun 2025 salah satu fokus utamanya adalah fasilitasi produk hukum daerah provinsi, baik dalam bentuk pengaturan maupun penetapan, yang dilakukan melalui deregulasi kebijakan dan harmonisasi regulasi. Dari pelaksanaan fasilitasi tersebut, realisasi produk hukum yang dihasilkan cukup signifikan, yaitu sebanyak delapan peraturan daerah, 49 peraturan gubernur, dan 895 keputusan gubernur. Capaian ini menunjukkan tingginya intensitas kebutuhan regulasi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2025.

Selain penyusunan produk hukum, biro juga melaksanakan pembinaan kepada 27 kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan desa/kelurahan sadar hukum. Dengan target sebanyak 500 desa/kelurahan pada tahun 2025,



realisasi yang telah dicapai adalah sebanyak 208 desa/kelurahan, sehingga masih diperlukan upaya lanjutan agar target tersebut dapat tercapai secara optimal. Lalu, untuk mendukung penyebarluasan informasi hukum agar lebih mudah diakses, dilakukan pula penataan serta pengembangan *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI). Langkah ini sejalan dengan upaya transformasi digital dalam layanan hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Pengembangan JDIH tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat melalui sinkronisasi dan integrasi seluruh anggota JDIH se-Provinsi Jawa Barat, yang mencakup JDIH kabupaten/kota, JDIH DPRD provinsi, JDIH DPRD kabupaten/kota, hingga JDIH perguruan tinggi. Dengan demikian, tercipta ekosistem informasi hukum yang terpadu dan dapat diakses secara menyeluruh oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Di sisi lain, biro juga berperan aktif dalam memberikan pendampingan hukum kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan pejabat daerah dalam penanganan perkara pidana, perdata, dan Tata Usaha Negara (TUN), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini, Biro Hukum dan HAM turut bertindak selaku kuasa hukum dalam persidangan perkara perdata dan TUN. Sepanjang tahun 2025, fasilitasi penyelesaian masalah hukum secara litigasi telah menangani sebanyak 38 perkara, sementara penyelesaian secara non-litigasi tercatat sebanyak 25 pendampingan. Selain itu, dilaksanakan pula fasilitasi dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) kabupaten/kota, serta klarifikasi terhadapnya, dengan jumlah produk hukum yang ditangani meliputi 264 Perda, 939 Perkada, dan 20 Peraturan DPRD.

Selanjutnya, dalam aspek pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menunjukkan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan aksi HAM. Upaya ini dilakukan guna mewujudkan P5HAM, yaitu Penghormatan, Perlindungan,



Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM, yang secara khusus diimplementasikan melalui Program P2 HAM serta Program Bisnis dan HAM. Sejalan dengan upaya penegakan HAM, Biro Hukum dan HAM juga menyelenggarakan Program Bantuan Hukum bagi ASN dan masyarakat, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Program ini dilaksanakan melalui pengaduan masyarakat secara langsung, optimalisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), serta bantuan advokasi bagi masyarakat miskin, dengan realisasi sebanyak 41 perkara pada tahun 2025. Tidak hanya itu, pelatihan penyuluhan hukum tematik juga diberikan kepada paralegal desa, yang menyasar masyarakat dan aparatur desa sebagai bagian dari 12 Program Gerbang Desa, dengan target pelatihan sebanyak 1.000 orang pada tahun 2025. Lalu, sebagai bentuk penguatan kapasitas kelembagaan, dilaksanakan pula pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Jabatan Fungsional Analis Hukum, dan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, yang mencakup legal drafting, teknis analisis produk hukum, dan advokasi hukum. Sebagai penutup rangkaian program tahun 2025, terjalin pula sinergi program kerja bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kejaksaan Tinggi, yang diwujudkan melalui nota kesepakatan sebagai landasan kerja sama ke depan.

Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) memegang peran kunci dalam mengoordinasikan berbagai urusan konkuren maupun absolut. Dari kategori Wajib Pelayanan Dasar, biro mengampu 3 dari 6 urusan yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pada kategori Wajib Non-Pelayanan Dasar, biro mengoordinasikan 11 dari 18 urusan, mulai dari kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, tenaga kerja, hingga komunikasi dan informatika. Selain itu, dari kategori Urusan Pilihan, biro menangani 2 dari 8 urusan yakni pariwisata dan transmigrasi. Di samping urusan konkuren, biro juga berperan aktif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut di bidang keagamaan. Sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan agama secara mendasar merupakan wewenang Pemerintah Pusat. Namun, dalam



pelaksanaannya, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, sehingga biro turut memfasilitasi jalannya pelayanan dan pembinaan keagamaan di wilayah Jawa Barat.

Berbekal kewenangan tersebut, sepanjang tahun 2025 biro terus mengoptimalkan fungsinya melalui penyusunan berbagai regulasi daerah yang substansi dan urgensinya ditelaah secara mendalam, sebelum kemudian ditetapkan legalitas hukumnya oleh Biro Hukum dan HAM. Dalam pelaksanaan tugasnya, biro secara mandiri menyusun regulasi teknis seperti kebijakan petunjuk teknis dan penetapan penerima Program Beasiswa Jenius serta Beasiswa Santri Kurang Mampu, hingga pembentukan panitia pelaksana kegiatan daerah seperti Festival Dulag Istimewa 1446 H. Di samping menyusun regulasi secara mandiri, Biro Kesra juga secara aktif mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan berbagai produk hukum daerah lintas sektor. Dukungan ini terwujud melalui pembentukan 13 Keputusan Gubernur, 12 Surat Edaran Gubernur, dan empat Rekomendasi Gubernur.

Komitmen regulatif dan pengoordinasian tersebut diwujudkan secara nyata melalui eksekusi berbagai program unggulan di bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Salah satu langkah program yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan Program Beasiswa Pendidikan Tinggi bersifat stimulus yang diberikan sebanyak satu kali, dengan prioritas pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa D3, D4, dan S1 yang diberikan kepada 806 mahasiswa di 3 Universitas dan politeknis yakni ITB, UPI, dan Polman. Sejalan dengan upaya membangun SDM di jenjang pendidikan tinggi, penguatan kapasitas generasi muda berbasis keagamaan juga diperkuat melalui Program Beasiswa Santri Kurang Mampu/Miskin bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat untuk 1.800 santri penerima manfaat.

Pemerataan akses pendidikan keagamaan tidak berhenti pada tingkat santri dan mahasiswa saja, melainkan juga menyasar jenjang sekolah



menengah secara luas melalui Program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) MAN/MAS. Lewat kolaborasi berkelanjutan bersama Kanwil Kemenag Jabar, bantuan operasional berbasis data terverifikasi *Education Management Information System* (EMIS) untuk mendukung operasional belajar 235.829 siswa di seluruh Madrasah Aliyah negeri maupun swasta di Jawa Barat. Perhatian pemerintah terhadap ekosistem keagamaan pun disempurnakan melalui perlindungan bagi para pendidik keagamaan. Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Bidang Keagamaan, sebanyak 41.020 guru *ngaji* telah terlindungi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Selain fokus pada penguatan SDM dan perlindungan sosial keagamaan masa kini, biro juga mengambil peran penting dalam merawat ingatan sejarah dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Melalui pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Jawa Barat berdasarkan Kepgub Jabar No. 464.05/Kep.147-Kesra/2024 dan Pergub Jabar No. 102 Tahun 2020, Biro Kesra mengawal proses pengusulan tokoh daerah hingga membuahkan hasil bersejarah pada tahun 2025 dengan ditetapkannya Prof. Mochtar Kusumaatmadja sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia.

Pada Urusan Bina Mental Spiritual, fokus kerja dititikberatkan pada pendampingan STQ Tingkat Nasional, penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi, fasilitasi seleksi ketua BAZNAS Jabar, Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Lingkup Provinsi Jawa Barat Tahun 1446 H/2025 serta meningkatkan semangat kebangsaan dan nilai-nilai spiritual yang senantiasa dirawat melalui pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBI) yang meliputi penterjemahan nilai syiar pada peringatan Nuzulul Qur'an, Hari Santri, Idul Fitri, hingga Idul Adha secara khidmat dan inklusif di tengah masyarakat Jawa Barat.



Selain itu, pada Urusan Pelayanan Dasar, Biro Kesra telah mengawal penyusunan Kerangka Logis RAD Percepatan Penurunan Stunting, fasilitasi evaluasi konvergensi eliminasi AKI/AKB, fasilitasi pencegahan penyakit menular/tidak menular, fasilitasi pembinaan Gerakan Sekolah/Madrasah Sehat (TRIAS UKSM), fasilitasi penguatan kesehatan jiwa kelembagaan TKKJM dan psikolog klinis Puskesmas, hingga mengantarkan 27 Kabupaten/Kota lolos verifikasi dokumen Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Pada urusan sosial, pelaksanaan *Pilot Project* Penanganan PPKS Perkotaan di Rusunawa Solokan Jeruk (42 KK/158 jiwa) dan Rusunawa Rancaekek (46 KK/176 jiwa) yang dihadirkan lengkap dengan pemberdayaan ekonomi, Rakor Gawe Rancage (*Pak Kades jeng Pak Lurah*), fasilitasi penataan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan fasilitasi penyediaan skema rumah singgah bagi keluarga pasien rujukan.

Pada Urusan Non-Pelayanan Dasar telah dilaksanakan melalui koordinasi kebijakan strategis ketenagakerjaan, gender, transportasi, dan olahraga. Biro Kesra memfasilitasi penetapan UMP, UMK, dan UMSK, serta fasilitasi penyusunan Perda Jabar No. 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Jamsostek. Semangat pembangunan inklusif pun ditegaskan melalui penerbitan Pergub Pengarusutamaan Gender (PUG), perumusan kebijakan Penyediaan Transportasi Inklusif, penyusunan Draft Pergub Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (tindak lanjut Perda Perhubungan No. 5 Tahun 2024), serta mendorong pembaruan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan demi mewujudkan Jawa Barat yang sejahtera, adil, dan berdaya saing.

Biro Perekonomian merupakan salah satu unit kerja yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam struktur organisasi, Biro Perwekonomie berada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22



Tahun 2022, Biro Perekonomian bertugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan, pengoordinasian, perumusan kebijakan, hingga pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah. Untuk menyelenggarakannya secara efektif, tugas dan fungsi Biro Perekonomian dibagi ke dalam dua unsur pendukung urusan pemerintah Bidang Urusan Sekretariat Daerah yaitu Urusan Pendukung Program Perekonomian dan Pembangunan dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Berbekal kewenangan tersebut, sepanjang tahun 2025 Biro Perekonomian terus mengoptimalkan fungsinya melalui penyusunan berbagai regulasi kebijakan daerah yang substansi dan urgensinya ditelaah secara mendalam, sebelum kemudian ditetapkan legalitas hukumnya oleh Biro Hukum dan HAM. Biro Perekonomian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif bidang perekonomian, meliputi sumber daya air, energi dan pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, infrastruktur daerah, penataan ruang, perumahan dan permukiman, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil, serta penanaman modal, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada urusan pendukung pemerintah program perekonomian dan Pembangunan, Biro perekonomian menyelenggarakan Koordinasi Pengendalian Inflasi; Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah; Akses Keuangan Daerah dan Digitalisasi Daerah; Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus; Pemantauan Penyaluran Kredit; Fasilitasi Kelembagaan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen; Pemantauan Pengembangan Konektivitas Antara Wilayah; Alih Fungsi Lahan; Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pengelolaan Sampah Regional; serta Pengelolaan Air Minum.



Pada program perekonomian dan pembangunan, fokus pada pengendalian inflasi Pada tahun 2025, realisasi IKU Tingkat Inflasi tercatat sebesar 2,63* persen dari target yang ditetapkan sebesar 3,3 – 3,8 persen sehingga kinerja tercapai sebesar 129.92 persen. Realisasi ini berdasarkan data Inflasi *Year on Year* (y-on-y) tujuh kota yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat pada bulan Desember 2025. Inflasi *Year on Year* (y-on-y) tujuh kota merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan tingkat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat di tujuh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Indikator ini mencerminkan kondisi stabilitas harga daerah secara lebih struktural karena relatif tidak dipengaruhi oleh fluktuasi musiman jangka pendek. Sepanjang tahun 2025, inflasi y-on-y tujuh kota berada dalam rentang yang terkendali dan sejalan dengan sasaran pengendalian inflasi nasional. Merujuk kepada tingkat inflasi di Provinsi Jawa Barat, rata-rata kenaikan harga di tujuh kota masih berada pada tingkat yang dapat ditoleransi oleh daya beli masyarakat, sekaligus mencerminkan efektivitas koordinasi pengendalian inflasi daerah

Selain itu dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan, Biro Perekonomian juga melakukan fasilitasi penyusunan regulasi oleh perangkat daerah. Fasilitasi yang dilakukan dimulai dari pelayanan administrasi yaitu pemberian paraf koordinasi untuk proses penetapan serta registrasi regulasi kepada Biro Hukum dan HAM hingga pemberian review dan tanggapan atas draf regulasi yang disampaikan perangkat daerah. Di dalam proses ini perangkat daerah mengundang Biro Perekonomian dari sejak pembahasan draf awal hingga penetapan regulasi. Adapun perangkat daerah yang secara spesifik difasilitasi oleh Biro Perekonomian merupakan unit kerja yang menangani urusan: sumber daya air, energi dan pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, infrastruktur daerah, penataan ruang, perumahan dan permukiman,



perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil, serta penanaman modal.

Masih berkaitan dengan penyelenggaraan rumusan kebijakan, setelah sebuah regulasi ditetapkan terutama yang diinisiasi oleh Biro Perekonomian, dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap implementasinya. Monev terutama difokuskan kepada regulasi-regulasi yang bersifat strategis dan/atau prioritas dengan cara pengecekan pada instrumen monev yang sebelumnya telah disusun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi benar-benar diimplementasikan sesuai tujuan dan kelompok sasarannya.

Menindaklanjuti Surat Edaran LAN Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualita Kebijakan dengan dimensi pengukuran yaitu dimensi evaluasi kemanfaata kebijakan (implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan), Biro Perekonomian telah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2023 tentang Regenerasi Petani Jawa Barat Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah sebesar 45.00 point dan Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah sebesar 42,75 point. Pencapaian kinerja Biro perekonomian menjadi jelas dan terukur dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung

Selanjutnya, Biro BUMD Investasi dan Administrasi Pembangunan sebagai unit kerja yang mendukung ketercapaian 'Indeks Kualitas Kebijakan', 'Persentase BUMD Sehat' dan 'Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$ ', melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Umum, Pembinaan, Perkoordinasian dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Bidang BUMD, Investasi Daerah, BLUD serta Administrasi Pembangunan. Beberapa aktivitas yang dilaksanakan di tahun 2025 adalah evaluasi kinerja BUMD secara triwulan, semester dan tahunan, memfasilitasi



pelaksanaan RUPS dan Pra RUPS BUMD, melakukan fasilitasi Perjanjian Kerjasama antara BUMD Provinsi Jawa Barat dengan Kejati Jawa Barat, melakukan pendampingan penugasan BUMD, penyusunan kajian pengelolaan BUMD Sanggabuana, penyusunan kajian *Initial Review* BUMD, penyusunan *Blueprint* Pengembangan BUMD, melakukan pendampingan Audit BUMD (ATT BUMD PT Jaswita Jabar), pelaksanaan GCG dan penyusunan Indikator Penilaian GCG, serta melakukan fasilitasi Penyertaan Modal Daerah pada BUMD melalui penetapan regulasi daerah tentang penyertaan modal terhadap BUMD. Melalui pendampingan kepada BUMD, pada tahun 2025, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memperoleh dividen sebesar Rp6,407 triliun dan dengan demikian berkontribusi terhadap kapasitas fiskal daerah.

Disamping pelaksanaan fasilitasi kepada BUMD, biro juga memberikan fasilitasi kepada perangkat daerah dalam pembentukan BLUD. Pada tahun 2025, biro melakukan penyusunan regulasi Fleksibilitas BLUD, melakukan penilaian kinerja terhadap 6 (enam) BLUD (RSUD), serta melakukan fasilitasi usulan penerapan BLUD. Selanjutnya untuk pelaksanaan pengendalian kinerja perangkat daerah, dilakukan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah serta Evaluasi Progres Realisasi Fisik Bantuan Keuangan.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai unit yang melaksanakan fasilitasi pengadaan barang/jasa melaksanakan beberapa kebijakan strategis. Pada Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan pengadaan Pra DPA menjadi upaya strategis untuk melakukan proses pemilihan penyedia sebelum DPA disahkan. Kontrak pekerjaan dapat dilakukan pada awal tahun untuk mendukung percepatan pembangunan dan realisasi belanja. Pada Tahun 2025 dilaksanakan fasilitasi Lelang Pra DPA terhadap 1472 paket pekerjaan dengan pagu Rp 895 Milyar. Paket pekerjaan yang difasilitasi berupa jasa outsourcing, jasa konsultan pengawas dan perencanaan. Pendampingan berupa sosialisasi, layanan konsultasi & desk kepada pelaku pengadaan. Pendampingan Pemanfaatan E-Katalog Versi 6. Pendampingan Transisi dari E-



Katalog Versi 5 ke Versi 6. Memastikan E-Katalog Versi 6 memenuhi kebutuhan pengadaan pada OPD. Memastikan rencana pengadaan telah diinput dalam aplikasi SiRUP. Memastikan ketepatan dalam input rencana pengadaan. Memastikan pelaksanaan pengadaan tercatat dalam SPSE. Memastikan pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara tepat waktu.

Selanjutnya, pada Bidang Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik PBJ di Desa untuk meningkatkan jumlah UMKM yang tergabung dalam marketplace sehingga membuka pasar yang lebih luas bagi UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan Kick-off Implementasi PBJ di Desa bertempat di Kab. Purwakarta pada tgl 6 Nov 2025, menghadirkan 183 Kepala Desa & BUMDes serta 17 Camat. Lalu, dilaksanakan pula Fasilitasi On-Boarding terhadap pelaku usaha UMKM sebanyak 5260 perusahaan. Pendampingan penggunaan SPSE (SiRUP, Katalog Elektronik, SPSE) kepada Pelaku Pengadaan sebanyak 9248 pelaku. Fasilitasi pendampingan pemanfaatan SPSE ke UKPBJ Kab/Kota yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalaya. Pendampingan kepada 45 OPD tentang Pelaporan pengadaan barang/jasa melalui SPSE, salah satunya dengan fasilitasi secara off-line hadir di OPD.

Pada Bidang Pembinaan dan Advokasi, dilakukan pendampingan menuju PKP-BJ Proaktif baik Provinsi & Kab/Kota. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan 27 UKPBJ Kab/Kota pada Bulan Juli 2025 dengan salah substansi yaitu pembinaan kelembagaan UKPBJ. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan 27 UKPBJ Kab/Kota pada Bulan Juli 2025 dengan salah substansi yaitu pembinaan kelembagaan UKPBJ. Hasil fasilitasi pendampingan ITKP ke Kab/Kota, dari semula terdapat 4 kab dgn ITKP Cukup Baik (2024) menjadi hanya 2 kab dgn ITKP Cukup Baik (2025). Sosialisasi Perpres 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelatihan/Bimbingan Teknis bagi Pelaku Pengadaan di OPD Provinsi, UKPBJ Kab/Kot dan Pelaku Usaha. Fasilitasi peningkatan



kompetensi dan jenjang karier bagi Pejabat Fungsional PPBJ. Fasilitasi Peningkatan Wawasan & Sharing Pengalaman Pengadaan Barang/Jasa melalui “Bale Waluya Pengadaan” Biro PBJ yang diresmikan pemanfaatannya sejak 14 Nov 2025. Webinar & Podcast tentang Pengadaan Barang/Jasa dan sejak Awal Tahun 2026 bekerjasama dengan BPSDM Jabar (Penyediaan Materi LMS dan Sertifikat Webinar). Bale Waluya Pengadaan diikuti oleh peserta di lingkup Pemprov. Jabar, Kab/Kota se Jabar, & UKPBJ/Pemda di luar Jabar.

Salah satu produk unggulan sekaligus bentuk pelayanan yang dihasilkan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2025 adalah West Java Digital Marketplace (WJDM). WJDM merupakan platform digital yang dikembangkan sebagai sarana pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, dengan tujuan meningkatkan efisiensi proses pengadaan, memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal, serta mendukung implementasi pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada penggunaan produk dalam negeri. Melalui pengembangan WJDM, Biro PBJ berhasil menghadirkan inovasi pelayanan yang mendukung transformasi digital pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Keberadaan platform ini tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi daerah dengan memperluas kesempatan bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam belanja pemerintah. Dengan demikian, WJDM menjadi salah satu wujud nyata komitmen Biro PBJ dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang modern, inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Biro Organisasi, unit kerja yang mendukung mayoritas pencapaian peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui ketercapaian indikator ‘Nilai Evaluasi Kelembagaan’, ‘Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Dimensi Pelaporan’, ‘Indeks Pelayanan Publik’, dan ‘Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Kategori A’, melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi serta



pemantauan tindak lanjut rekomendasi perbaikan pada seluruh perangkat daerah, penyusunan dan penyempurnaan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP), Daerah Provinsi Jawa Barat serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara terintegrasi sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Biro Organisasi juga memberikan layanan konsultasi di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana, penyediaan data dan informasi organisasi, fasilitasi penataan kelembagaan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta fasilitasi penyusunan standar pelayanan. Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan layanan tersebut antara lain laporan hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi, laporan tindak lanjut rekomendasi reformasi birokrasi, dokumen LKIP pemerintah daerah, laporan hasil SKM, rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan publik, dokumen hasil konsultasi dan fasilitasi, serta berbagai rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang menjadi dasar pengambilan kebijakan dan peningkatan kinerja perangkat daerah.

Disamping 7 (tujuh) biro yang mendukung pencapaian kinerja IKU secara langsung, terdapat dua biro yang memiliki tugas utama dalam mendukung kinerja pimpinan dan sebagai penyedia fasilitasi seluruh unit kerja pada Sekretariat Daerah. Biro Administrasi Pimpinan, unit yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan pimpinan menjalankan fungsi pelayanan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pelayanan tersebut meliputi dukungan administrasi pimpinan, keprotokolan, komunikasi pimpinan, dokumentasi, pelayanan tamu pimpinan, serta pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2025, biro telah memfasilitasi sebanyak 129 kegiatan Penjabat (Pj.) Gubernur serta 690 kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif. Kondisi ini menunjukkan tingginya intensitas pelayanan serta peran strategis Biro Administrasi Pimpinan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.



Selain melaksanakan pelayanan rutin kepada pimpinan, biro juga mendapatkan instruksi khusus Kepala Daerah untuk mengelola *Bale Pananggeuhan* sebagai bentuk penguatan fungsi pelayanan publik, komunikasi pimpinan, dan penyerapan aspirasi masyarakat yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan di lapangan. Pembentukan *Bale Pananggeuhan* dilatarbelakangi oleh meningkatnya partisipasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara langsung dengan jumlah aduan mencapai sekitar 200–300 aduan per hari, sehingga diperlukan sistem pelayanan yang lebih tertib, terukur, dan akuntabel. Kemudian, biro juga memiliki peran dalam pelaksanaan Abdi Nagri Nganjang ka Warga sebagai bentuk pelayanan jemput bola dan penjangkaran aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam kegiatan tersebut, penjangkaran aspirasi dilakukan melalui metode wawancara kepada perangkat desa untuk memperoleh informasi mengenai isu, kebutuhan, dan permasalahan yang berkembang di tingkat masyarakat. Hasil wawancara tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat fungsi komunikasi pimpinan serta membangun ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, biro juga menyelenggarakan berbagai kegiatan kolaboratif, di antaranya Adpim *Ngabret Saluyu* yang merupakan forum *sharing session* hasil kolaborasi antara Biro Administrasi Pimpinan dengan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat yang membahas praktik pelayanan pimpinan, komunikasi publik, kepemimpinan, serta isu strategis pemerintahan dan telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sepanjang tahun 2025. Selain itu, terdapat kegiatan SAWALOKA yang merupakan media diskusi dan komunikasi kebijakan untuk memfasilitasi pertukaran gagasan antara pemerintah daerah dengan berbagai unsur masyarakat, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membahas kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan Adpim *Ngabret Saluyu* dan SAWALOKA merupakan salah satu upaya biro untuk memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat,



meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik, serta mendukung tersedianya masukan strategis bagi pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Biro Umum merupakan salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum. Pada tahun 2025 Biro Umum mempunyai peran strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan melalui penyediaan layanan administrasi umum yang didalamnya terdapat pengelolaan kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta tata usaha di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sebagai unsur pendukung administrasi pemerintahan, Biro Umum berperan memastikan seluruh layanan penunjang dapat berjalan secara efektif, efisien, tertib administrasi dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Umum mendukung penyelenggaraan berbagai layanan strategis Sekretariat Daerah, antara lain pengelolaan Barang Milik Daerah, pelayanan administrasi keuangan, pengelolaan arsip dan persuratan, pelayanan rumah tangga pimpinan, pengelolaan gedung dan sarana prasarana perkantoran, serta penyelenggaraan layanan publik yang menjadi kewenangan Biro Umum. Seluruh layanan tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, transparan, efektif, dan akuntabel guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Selain melaksanakan kegiatan rutin sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Biro Umum juga melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka mendukung peningkatan sarana dan prasarana perkantoran. Kegiatan tersebut meliputi Pekerjaan Fisik Area Parkir Gedung Sate, Pekerjaan Fisik Area Merokok Kantin Gedung Sate, Pemeliharaan Taman Penitipan Anak Gedung Sate, Pemeliharaan Gedung Kantor Bale Dewa Niskala, Pemeliharaan Gedung Kantor Bale Sri Baduga, serta Penataan Taman Luar Komplek Gedung



Sate. Hal tersebut dilaksanakan dalam bentuk komitmen Biro Umum dalam mengimplementasikan tata Kelola yang baik melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas, sehingga mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan khususnya internal Sekretariat Daerah.

Selanjutnya, hingga triwulan 2 tahun 2026, progres ketercapaian kinerja utama Sekretariat Daerah secara rata-rata total adalah sebesar 38,41 persen. Ketercapaian ini bersumber dari keberhasilan penghasiian output dan pelaksanaan rencana aksi kegiatan. Dari 12 IKU, yang telah mengalami progres kinerja di atas 50 persen adalah sebanyak 24 persen, 30 persen mengalami progres sampai dengan 50 persen, dan sisa 20 persen belum melaporkan adanya ketercapaian output dan oleh karenanya progres kinerja dianggap 0 persen.

Tabel 2.2 Progres Pencapaian Kinerja Utama s.d. Triwulan 2 Tahun 2026

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Progres s.d. Triwulan 2 (%)
SR1	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	0
SR2	Terkendalnya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat	Tingkat Inflasi	22,23
SR3	Meningkatnya Kinerja BUMD	Persentase BUMD Sehat	0
SR4	Regulasi Daerah Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	41,30
SR5	Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	41,42
SR6	Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target	Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$	50
SR7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	50,04
SR8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat	Indeks Pelayanan Publik	0
SR9	Kelembagaan <i>Agile</i>	Nilai Evaluasi Kelembagaan	66,67
SR10	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	66,67
SR11	Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	66,67



No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Progres s.d. Triwulan 2 (%)
SR12	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	55,96

Secara lebih detail, data realisasi kinerja program dan kegiatan di tahun 2025 dan indikasi ketercapaian di tahun 2026 disajikan dalam Tabel 2.3.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s.d. Tahun 2026 (Triwulan II)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH										
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	44.16	35.29	40.84	42.33	103.64	41.67	119.29	2.70
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kebijakan Pemerintahan yang Berbasis Data dan Bukti	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	37.04	27.55	35.31	37.17	105.26	35.72	100.44	3.71
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kebijakan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan yang Diimplementasikan secara Tepat	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang Meningkat	59.65	37.72	42.11	N/A	0	46.49	84.21	2.12
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Daerah	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Rekomendasi Penataan Urusan Pemerintahan Provinsi yang Ditindaklanjuti	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kategori Pencapaian SPM Provinsi Jawa Barat	tuntas paripurna	tuntas paripurna	tuntas paripurna	tuntas paripurna	tuntas paripurna	tuntas paripurna	tuntas paripurna	tuntas paripurna
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang Mengalami Peningkatan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	74.07	55.56	59.26	Triwulan II baru keluar	Triwulan II baru keluar	62.96	Triwulan II baru keluar	Triwulan II baru keluar
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	62.96	N/A	48.15	48.15	100	51.85	100	1.59
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Rekomendasi Penataan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Dipertimbangkan Untuk Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Pencapaian SPM Minimal Kategori "Tuntas Utama"	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Dokumen Persiapan Penataan Daerah dan Penataan Desa yang Dipertimbangkan Untuk Ditindaklanjuti	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Dokumen Persiapan Penataan Daerah yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru yang Meningkatkan Nilai Kapasitas Daerahnya	66.67	11.11	22.22	30	135.01	33.33	74.44	1.12
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Dokumen Persiapan Penataan Desa yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP yang Terimplementasi	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP	100	N/A	N/A	100	0	100	200	2.00
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang Efektif	65	N/A	45	83,27	188,60	50	133,27	2.05
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Dalam Negeri yang Terimplementasi	50	N/A	30	55	183,34	35	90	1,80
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Pihak Ketiga yang Terimplementasi	50	N/A	30	34.21	114,03	35	69,21	1,38
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Kerjasama Internasional yang Efektif	65	N/A	45	100	222,23	50	160	2.46
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Internasional yang Terimplementasi	50	N/A	30	N/A.	-	35	35	0,70



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Sesuai Standar	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase pelayanan administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terlayani sesuai standar	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Usulan Penataan Batas Wilayah Administrasi yang ditangani sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Usulan Penamaan Rupabumi yang Memenuhi Persyaratan	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase permohonan penerbitan rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terlayani sesuai standar	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro Pemerintahan dan	100	100	100	100	100	100	300	3.00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Otonomi Daerah yang Disusun sesuai Ketentuan								
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dipenuhi	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	91.22	87.72	88.42	95.04	107.4	89.12	271.88	2.98
		IKM Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	92.28	89.78	90.28	93.33	103.3	90.78	273.89	2.97
		Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	54	42.90	50	95.1	190.2	51	189	3.50
		Persentase Pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	55	45.00	48	87.5	182.2	49	181.5	3.30
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	96.13	94.95	95.18	98.67	103.6	95.42	289.04	3.01
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90	N/A	N/A	N/A	-	68	68	0.76
	BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA									
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Nilai Deregulasi Kebijakan	21.23	20.20	20.50	23,5	114,63	20.61	64,31	3.03
		Nilai Harmonisasi Kebijakan	24.71	24.10	24.22	28,2	116,43	24.34	76,64	3.10



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepatuhan Daerah	85.99	N/A	83.50	83,5	100	84.00	167,50	1.94
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk hukum Daerah yang sesuai standar	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Permohonan Kajian Hukum yang terlayani sesuai Standar	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum dan informasi hukum yang disebarluaskan kepada masyarakat	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
		Persentase anggota JDIH yang pengelolaan informasi hukumnya berkategori baik	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Perkara yang Tertangani Sesuai Ketentuan	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Desa/Kelurahan sadar hukum di Jawa Barat yang di bina	94	N/A	61.82	61.82	100	72	133.82	1.42
		Persentase Rencana Aksi Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) Terimplementasi oleh Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	3.00
		Persentase pengadilan dan perlindungan hukum yang ditangani sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	300	3.00





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Partisipasi Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Melanjutkan ke Pendidikan Tinggi	10.08	8.81	9.64	9.83	101.97	9.75	28.39	2.81
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Rekomendasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Tinggi yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Program Kesejahteraan Rakyat	Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	36.74	35.43	35.69	38	106.47	35.95	109.38	2.97
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Perencanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Berkualitas	75.64	70.00	71.41	100	140.04	71.41	241.41	3.19
	Kegiatan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Berbasis Data dan Bukti	75.64	70.00	71.41	100	140.04	71.41	241.41	3.19
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual yang Berbasis Data dan Bukti	75.64	70.00	71.41	100	140.04	71.41	241.41	3.19
	Program Kesejahteraan Rakyat	Nilai Kualitas Pemanfaatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	43.89	43.35	43.46	44	101.24	43.57	130.92	2.98
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Diimplementasikan secara Tepat	75.64	70.00	71.41	100	140.04	71.41	241.41	3.19
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang	75.64	70.00	71.41	100	140.04	71.41	241.41	3.19



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Diimplementasikan secara Tepat								
		Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	75.64	70.00	71.41	100	140.04	71.41	241.41	3.19
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100	100	100	100	300	3.00
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	3.00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.71	95.66	95.67	99.27	103.76	95.68	290.61	3.03
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.935	77.60	77.667	92	118.45	77.734	247.33	3.17
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.97	38.97	43.97	88	200.14	48.97	175.94	2.75
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.20	57.00	57.00	95	166.67	57.30	209.30	3.59
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.91	91.62	92.07	99	107.53	92.53	283.15	3.01
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.00	N/A	N/A	N/A	N/A	68.00	68,00	0.75
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	300	3.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan n Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)			
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
			BIRO PEREKONOMIAN									
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Pengendalian Inflasi yang Dirumuskan	100	100	100	100	100	300	3.00	
				Persentase Rekomendasi Pengendalian Inflasi Mutakhir yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	300	3.00	
			Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Rekomendasi Pengendalian Inflasi yang Dirumuskan Berbasis Data dan Bukti	100	100	100	100	100	300	3.00	
			Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Rekomendasi Pengendalian Inflasi yang Mutakhir	100	100	100	100	100	300	3.00	
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah	44.50	43.94	44.10	45.00	102	44.20	133.14	2.99
			Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Kebijakan Sarana Perekonomian yang Berbasis Data dan Bukti	100	100	100	100	100	300	3.00	
			Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang Berbasis Data dan Bukti	100	100	100	100	100	300	3.00	
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah	50.00	40.60	43.00	42.75	99.41	45.00	128.75	2.57



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Kebijakan Sarana Perekonomian yang Diimplementasikan secara Tepat	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang Diimplementasikan secara Tepat	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Perekonomian	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Biro	90.04	N/A	90.00	98.65	109.61	90.01	188.66	2.09
		IKM Biro Perekonomian	95.40	N/A	95.20	95.2	100	95.25	190,45	1.99
		Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	100	100	100	100	100	100	300	3.00
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	94.57	93.41	93.64	93.54	99,89	93.87	280,82	2.96
		Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	75.00	67.00	67.00	67.00	100.00	69.00	203.00	2.70
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Perekonomian	90.00	N/A	N/A	96.67	100	68.00	164.67	1.83



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Dipenuhi	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	BIRO BADAN USAHA MILIK DAERAH, INVESTASI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
	Program Perekonomian dan Pembangunan	RoA BUMD JABAR	2.07	N/A	1.62	0.60	37,03	1.72	2,32	1.1.2
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase BUMD yang Memiliki Aset Produktif	62.16	N/A	51.35	91.40	177,99	54.05	145,45	2.33
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah	44.07	39.44	40.36	40,97	101,51	41.29	121,70	2.76
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Kebijakan BUMD dan BLUD yang Berbasis Data dan Bukti	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Kebijakan Investasi yang Berbasis Data dan Bukti	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah	43.25	38.72	39.54	41.17	104,12	40.47	120,36	2.78
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Kebijakan BUMD, Investasi dan BLUD yang Diimplementasi secara Tepat	95.50	N/A	90.00	100	111,11	91.00	191,00	2.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Kebijakan Investasi yang Diimplementasi secara Tepat	95.50	N/A	90.00	90.00	100	91.00	181,00	1.89
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti Rekomendasi Akselerasi Kinerja	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Akselerasi Kinerja Program Pembangunan yang Mutakhir	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biri BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang dipenuhi	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan	92.01	90.51	90.81	91.68	100,95	91.11	237,30	2.57
		IKM Biro	92.00	88.95	89.94	90.74	100,88	90.74	270,43	2.94
		Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	100	100	100	100	100	100	300	3.00
		Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	72.46	61.00	63.13	65.34	103,50	65.34	191,68	2.64



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	93.91	91.62	92.07	92.53	100,49	92.53	276,68	2.95
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan	90.00	N/A	N/A	N./A	-	68.00	68.00	0.75
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA									
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.00	3.00	3.00	3.00	100	3.00	9.00	3.00
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	23.64	21.05	22.84	29.10	127.41	23.04	73.19	3.09
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Permasalahan Barang dan Jasa yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Kematangan UKPBJ Dimensi Kelembagaan	3.00	3.00	3.00	3.00	100	3.00	9.00	3.00
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	100	300	3.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	29.29	29.24	29.25	29.35	100.00	29.26	87.75	2.99
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Layanan Pengadaan secara Elektronik yang Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	72.92	69.00	69.79	81.55	116.85	69.79	220.34	3.02
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Biro	90.04	83.25	90.00	93.94	104.38	90.01	267.2	2.96
		IKM Biro PBJ	90.04	96.86	90.00	93.53	103.92	90.01	280.04	2.78
		Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	100	89.87	100	100	100	100	300	3.00
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	93.30	88.86	89.74	98.33	109.571	109.57	277.82	2.98
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	300	3.00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

[illegible]

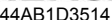
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Rekomendasi Perbaikan Implementasi Reformasi Birokrasi								
		Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100	100	100	100	100	100	300	3.00
		Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100	100	100	100	100	100	300	3.00
		Program Penataan Organisasi	13.71	13.55	13.58	13.71	100,95	13.72	40,77	2.97
		Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100	100	100	100	100	100	300	3.00
		Program Penataan Organisasi	100	100	100	100	100	100	300	3.00
		Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100	100	100	100	100	100	300	3.00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100	100	100	100	300	3.00
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	3.00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	3.00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)		
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Biro	97.00	N/A	97.00	99.99	103,08	97.00	196,99	2.03
			IKM Biro	92.32	92.17	92.20	91,94	99,71	92.23	276,34	2.99
			Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	100	100	100	100	100	100	300	3.00
			Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	94.63	92.33	92.79	99,17	106,87	93.25	284,75	3.00
			Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	67.00	53.00	56.00	60,00	107,14	58.00	171,00	2.55
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Organisasi	90.00	N/A	62.00	62,00	100	68.00	130,00	1.44
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN									
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Kebutuhan Pimpinan yang Terpenuhi	100	100	100	100	100	100	300	3.00
		Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
		Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kebutuhan Informasi dan Komunikasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
		Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Persentase Layanan Keprotokolan yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Administrasi Pimpinan	100	100	100	100	100	100	300	3.00



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	200	2.00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Biro	95.40	N/A	95.00	98.8	104.00	95.10	193.9	2.03
		Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro	92.40	N/A	92.00	94.4	102.60	92.10	186.5	2.01
		Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	100	100	100	100	100	100	300	3.00
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	97.10	N/A	96.14	99.17	103.15	96.38	195.55	2.01
		Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	64.00	N/A	60.00	61.00	101.67	61.00	122.00	1.90
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Administrasi Pimpinan	90.00	N/A	N/A	N/A	N/A	68.00	68.00	0.75
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	BIRO UMUM									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	85.50	82.66	82.70	87.14	105,36	83.40	253,2	2.96
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	Nilai SAKIP Setda	88.80	86.30	86.80	86.80	100	87.30	260,40	2.93



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setda	92.49	91.64	91.81	91.93	100,13	91.98	275,55	2.97
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI)	96.30	95.19	95.50	99.28	103,95	95.75	290,22	3.01
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	87.20	N/A	85.20	95.64	112,25	85.70	181,34	2.07
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	87.20	N/A	85.20	95.64	112,25	85.70	181,34	2.08
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Ketatausahaan Sekretariat Daerah	87.20	N/A	N/A	95.64	N/A	85.70	181,34	2.08
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	100	100	100	100	100	100	300	3.00
	Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front	100	100	100	100	100	100	300	3.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Office, Driver, dan Komunikasi terpenuhi								
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	300	3.00
		Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	3.00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100	100	100	100	300	3.00
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	3.00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	3.00
			42.70	40.00	40.45	74.11	185,21	41.01	155,12	3.63
			88.80	87.56	87.60	87.60	100	87.90	263,06	2.96
			94.89	92.58	93.04	99.28	106,70	93.50	285,36	3.00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.00	N/A	N/A	100	N/A	68.00	168,00	1.86



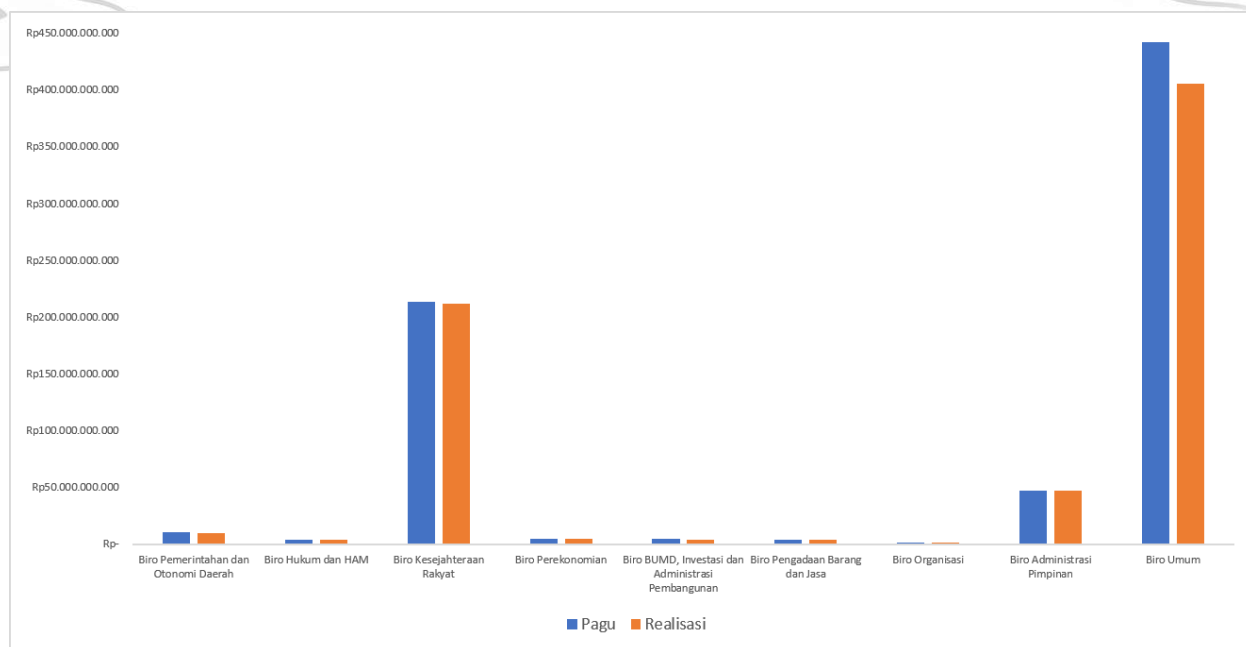
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2025 didukung oleh anggaran yang mencukupi. Untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renja Tahun 2025 yang meliputi 8 (delapan) program, 28 kegiatan, serta 90 sub kegiatan, pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp732.327.656.442,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp671.084.164.961,00 dan Belanja Modal sebesar Rp61.243.491.481,00. Anggaran dapat diserap sebanyak 94,61 persen atau sebesar Rp692.416.877.171,00 yang berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp646.526.835.850,00 atau penyerapan sebesar 96,34 persen dan Belanja Modal sebesar Rp45.890.041.321,00 atau penyerapan sebesar 74,93 persen.

Sementara itu, untuk membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Tahun 2026 yang meliputi 8 (delapan) program, 29 kegiatan, serta 89 sub kegiatan anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp519.643.627.525,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp411.112.626.596,00 dan Belanja Modal Rp108.531.000.929,00. Pada bulan Februari terdapat kebijakan keuangan yang menambah pagu anggaran menjadi Rp526.012.708.089,00 atau bertambah Rp6.369.080.564,00. Hal ini didorong oleh meningkatnya prioritas daerah dalam upaya mendukung program strategis Sekretariat Daerah yang harus dilaksanakan. Oleh karenanya, Belanja Operasi menjadi Rp415.877.782.889,50 bertambah Rp4.765.156.293,00 dan Belanja Modal menjadi Rp110.134.925.199,50 bertambah Rp1.603.924.270,50. Sampai dengan triwulan 2 anggaran telah terserap sebesar 41,65 persen atau sebesar Rp219.064.139.346,00. Serapan pada Belanja Operasi sebanyak persen atau Rp203.835.691.752,00 dan Belanja Modal sebanyak persen atau sebesar Rp82.977.410.321,00.



Gambar 2.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 per Biro



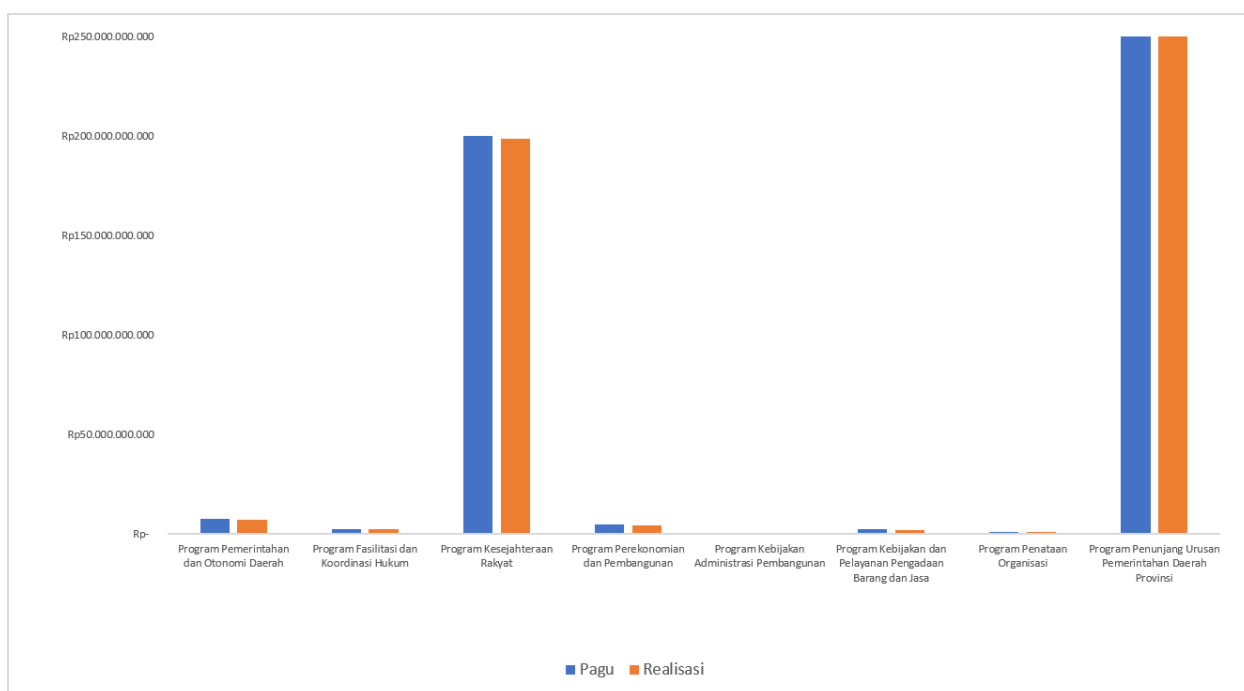
Berdasarkan pagu anggaran yang dilaksanakan oleh biro, Biro Umum mendapatkan proporsi pagu anggaran terbesar pada tahun 2025, yaitu sebesar Rp442.255.540.621,00 atau 60,39 persen dari total pagu anggaran Sekretariat Daerah. Sedangkan Biro Organisasi mendapat pagu anggaran terkecil yaitu sebesar Rp1.452.031.019,00 atau 0,19 persen dari total pagu anggaran Sekretariat Daerah.

Berdasarkan realisasi anggaran tahun 2025, seluruh biro mampu merealisasikan lebih dari 90 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2025 tergolong baik. Biro yang mengalami persentase penyerapan yang terbilang cukup rendah yaitu Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan dengan persentase sebesar 91,69 persen dan Biro Umum dengan persentase sebesar 91,72 persen. Efisiensi yang dihasilkan Sekretariat Daerah pada Tahun 2025 yaitu sebesar



Rp39.910.779.271,00 atau 4,96 persen dari total pagu anggaran Sekretariat Daerah.

Gambar 2 3 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 per Program

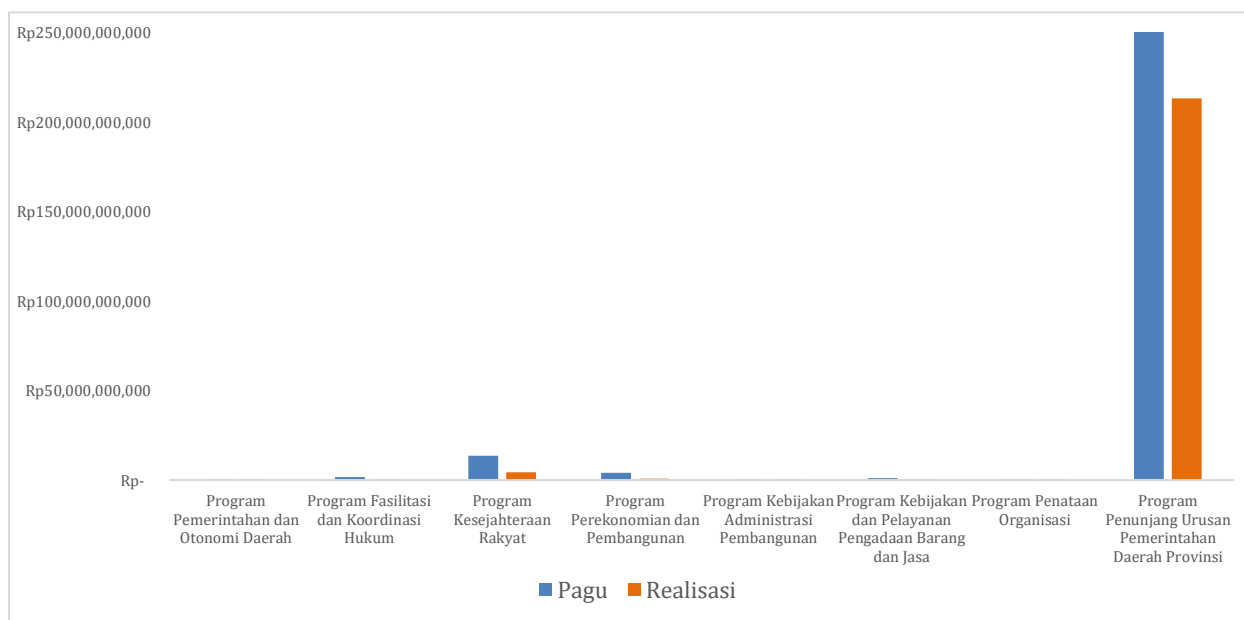


Berdasarkan pagu anggaran yang dilaksanakan oleh biro, sama dengan tahun 2025, Biro Umum mendapatkan proporsi pagu anggaran terbesar pada tahun 2026, yaitu sebesar Rp452.116.659.702,00 atau 85,88 persen dari total pagu anggaran Sekretariat Daerah. Sedangkan Biro Organisasi mendapat pagu anggaran terkecil yaitu sebesar Rp812.710.598,00 atau 0,15 persen dari total pagu anggaran Sekretariat Daerah. Berdasarkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan 2 tahun 2026, Biro yang mengalami persentase penyerapan yang terbilang cukup rendah yaitu Biro Organisasi dengan persentase sebesar 16,34 persen dan Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan dengan persentase sebesar 19,95 persen. Sedangkan Biro dengan persentase



penyerapan yang paling tinggi adalah Biro Administrasi Pimpinan dengan persentase sebesar 46,14 persen.

Gambar 2.4 Pagu dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 per Program



Berdasarkan pagu anggaran setiap program yang ada Sekretariat Daerah, sama dengan Tahun 2025, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mendapatkan proporsi pagu anggaran terbesar pada tahun 2026 yaitu sebesar Rp505.042.703.443,00 atau 95,93 persen dari total pagu anggaran Sekretariat Daerah. Hal ini terjadi karena adanya pagu anggaran belanja modal dan belanja pegawai di Sekretariat Daerah. Sedangkan pagu anggaran terbesar untuk program teknis adalah Program Kesejahteraan Rakyat yang ada di Biro Kesra, sebesar Rp13.722.535.430,00 atau 2,61 persen dari total pagu anggaran Sekretariat Daerah, karena adanya belanja hibah. Sedangkan untuk realisasi anggaran sampai dengan triwulan 2 tahun 2026, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan merupakan program yang capaiannya paling besar dari semua program yang ada di Sekretariat Daerah yaitu sebesar 50 persen. Capaian realisasi anggaran terendah untuk program berada di Program



Penataan Organisasi yaitu sebesar 9,69 persen, yang diampu oleh Biro Organisasi.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Meski dalam kondisi koordinasi dan kolaborasi yang kuat, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terbangun dan termanfaatkan. Data penting dalam pengambilan keputusan dan penyusunan regulasi. Meski demikian, seperti misalnya data penduduk yang bersekolah tingkat menengah belum dapat terakses secara luas sehingga penyaluran bantuan bergantung kepada ajuan dan tidak dapat ditetapkan sebelumnya. Begitu pula untuk data yang disajikan sebagai pendorong atau penghambat kinerja perangkat daerah. Pengungkapan yang tidak menyeluruh berpengaruh terhadap analisis evaluasi kinerja perangkat daerah dan rekomendasi yang diberikan.

Permasalahan dan tantangan lain adalah menjaga konsistensi penerapan tata kelola yang baik yang dapat berpengaruh terhadap standar penerapan akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Kondisi ini dapat terjadi antara lain karena kurangnya *transfer knowledge* dan *understanding* sehingga pemahaman tidak merata antara pegawai di unit kerja. Penyebab lain adalah kompleksitas regulasi dan kebijakan yang dinamis yang juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan koordinasi dan kolaborasi pencapaian target pembangunan dalam lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Penerapan regulasi pusat yang kerap berubah menuntut aparatur untuk dapat beradaptasi secara cepat. Sementara penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur kerja membutuhkan proses penyesuaian yang tidak selalu secara serentak cepat dan seragam antar unit kerja.



Permasalahan dan tantangan lainnya adalah kompleksitas dari koordinasi itu sendiri. Dalam melakukan pengendalian kinerja perangkat daerah, pemastian pencapaian target pembangunan, melibatkan banyak aktor, proses, dan regulasi. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah kerap memperoleh tantangan untuk dapat menyelenggarakan koordinasi yang optimal terutama dalam memastikan sinkronisasi program, kebijakan, dan proses kerja tidak hanya antar perangkat daerah namun juga dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Keterbatasan sistem yang mampu mendukung koordinasi dan proses kerja yang cepat dan adaptif juga menjadi salah satu permasalahan dalam optimalisasi koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Dari sedikit gambaran di atas, isu-isu penting yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah pertama, penguatan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah karena masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah dan pemerintah daerah terutama dalam pengendalian pelaksanaan program lintas fungsi dan sektor. Kedua, peningkatan kualitas perumusan dan harmonisasi kebijakan daerah. Meskipun secara pencapaian target kinerja diperoleh sangat baik, namun masih perlu adanya penguatan proses analisis kebijakan, harmonisasi regulasi, serta sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah sehingga kebijakan Sekretariat Daerah dalam pengendalian tugas perangkat daerah dapat semakin berkualitas, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Ketiga, pembangunan sistem pengendalian yang menyeluruh dan tergambarkan dalam seluruh tingkatan kinerja. Hal ini penting mengingat pengendalian kinerja pembangunan oleh Sekretariat Daerah belum terstandar sehingga berdampak kepada kualitas hasil kinerja yang tidak merata.



Tabel 2.4 Isu-isu pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah

No	Biro	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Penerapan kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah belum berkualitas	Kepatuhan perangkat daerah dalam menerapkan kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah belum seluruhnya baik	Masih terdapat kebijakan yang belum harmonis dengan kebijakan terkait
			Belum optimalnya pemenuhan penataan urusan	Kewenangan urusan daerah belum sepenuhnya tertata
			Amanat kerjasama daerah kerap tidak selaras dengan perencanaan perangkat daerah	Kerjasama daerah tidak didasarkan pada <i>grand design</i> yang mengacu kepada dokumen perencanaan menengah yang terintegrasi dan dikomunikasikan
			Koordinasi dalam evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah belum dilaksanakan secara lebih efisien	Pelaksanaan koordinasi tidak didukung oleh sistem pemerintahan berbasis elektronik
			Penyelenggaraan fungsi biro belum optimal	Mobilisasi sumber daya yang belum efektif dan efisien
2	Biro Hukum dan HAM	Fasilitasi produk hukum daerah Provinsi Jawa Barat belum optimal	Terjadinya keterlambatan pada proses penyusunan kebijakan daerah	Fasilitasi penyusunan kebijakan belum disusun berdasarkan tingkatan prioritas
			Kualitas produk hukum belum seluruhnya sesuai standar	Kuantitas pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan belum terpenuhi
		PNS Pemda Provinsi Jawa Barat rentan terlibat kasus hukum	Pembinaan kesadaran hukum kepada ASN Pemda Prov Jabar masih kurang	Kuantitas penyuluh hukum belum terpenuhi



No	Biro	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota kurang memuaskan	Proses pengkajian rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota membutuhkan waktu lama	Kuantitas pejabat fungsional analis hukum belum terpenuhi
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	Penerapan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat belum berkualitas	Penerapan kebijakan kesejahteraan rakyat belum efektif berdampak positif kepada pembangunan	Penyusunan dokumen perencanaan kebijakan belum optimal
				Evaluasi terhadap implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat belum dijalankan secara konsisten
		Pencairan hibah belum seluruhnya akuntabel	Penggunaan hibah tidak sesuai pengajuan	Aplikasi pengajuan dan pencairan tidak secara efektif menyaring pengusul hibah sesuai ketentuan
				Aplikasi pengelolaan administrasi hibah belum berjalan optimal
4	Biro Perekonomian	Penerapan kebijakan bidang perekonomian belum berkualitas	Penerapan kebijakan perekonomian belum seluruhnya efektif berdampak positif kepada pembangunan	Monev pemanfaatan hibah belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkala disebabkan keterbatasan SDM pengelola hibah
				Koordinasi dalam perumusan kebijakan bidang perekonomian belum berjalan dengan optimal
				Evaluasi terhadap implementasi kebijakan bidang perekonomian belum dijalankan secara konsisten



No	Biro	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	Kontribusi BUMD terhadap pembangunan belum optimal	Belum seluruh BUMD berstatus sehat	Aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pengendalian inflasi belum seluruhnya terintegrasi
				Sinkronisasi roadmap terkait kebijakan perekonomian antara provinsi dan kabupaten/kota belum optimal
		Evaluasi kinerja belum efektif memberikan masukan perbaikan terhadap pembangunan	Laporan evaluasi kinerja tidak disertai dengan analisis mendalam	Pengelolaan BUMD belum seluruhnya memenuhi prinsip <i>good corporate governance</i>
				Pelaporan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam pembangunan belum terintegrasi
		Inovasi pendapatan daerah belum terselenggara	Alternatif pembiayaan belum dapat dilaksanakan	SDM biro belum dapat memenuhi kebutuhan monitoring dan evaluasi pembangunan yang menyeluruh dan mendalam
				Penetapan kebijakan bergantung kesepakatan dengan pihak legislatif
6	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Tata kelola pengadaan barang/jasa belum optimal	Pengetahuan sumber daya manusia perangkat daerah terhadap proses pengadaan barang/jasa masih minim	Disenimasi pengadaan barang/jasa belum dilakukan secara menyeluruh
				Fungsi PPK di perangkat daerah belum berjalan dengan optimal



No	Biro	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pemanfaatan SPSE belum optimal	Kepatuhan perangkat daerah dalam melaporkan proses pengadaan barang/jasa melalui sistem masih rendah
				Produk barang/jasa yang tayang di eKatalog belum cukup variatif
			Monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa belum dapat memberikan perbaikan strategi pengadaan barang/jasa	Laporan monitoring dan evaluasi tidak disertai dengan analisis mendalam dan rekomendasi perbaikan
7	Biro Organisasi	Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik belum menjiwai kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Penyelenggaraan tata kelola yang baik oleh perangkat daerah belum membudaya	Perangkat daerah belum seluruhnya memahami substansi tata kelola pemerintahan yang baik
			Proses perwujudan penyelenggaraan tata kelola yang baik sangat dipengaruhi oleh dinamisasi lingkungan eksternal	Ketidakpastian kondisi yang muncul sebagai dampak penataan organisasi mengalihkan fokus perangkat daerah dalam penerapan tata kelola yang baik
			Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas belum menyeluruh terjadi pada seluruh perangkat daerah	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik belum memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kinerja perangkat daerah
		Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara rata-rata berada pada rentang Kategori B	Pelaksanaan SAKIP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum seluruhnya berkualitas	Belum seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memahami urgensi kolaborasi dalam penyelenggaraan SAKIP
				Belum seluruh Pemerintah Daerah



No	Biro	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				Kabupaten/Kota memiliki arsitektur kinerja sesuai amanat pemerintah pusat
				Belum seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki instrumen pengukuran kinerja
				Belum seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyajikan analisis yang lengkap dalam pelaporan kinerja
				Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum terintegrasi dengan SPBE
8	Biro Administrasi Pimpinan	Pengelolaan fasilitasi pimpinan belum optimal	Mekanisme fasilitasi pimpinan belum terstandarisasi dengan baik	tata kelola organisasi belum terinternalisasi secara menyeluruh
			Proses koordinasi antar tim dalam mendukung kebutuhan pimpinan belum berjalan optimal	Koordinasi antar tim belum terintegrasi dengan baik
9	Biro Umum	Layanan fasilitasi internal Sekretariat Daerah dan perangkat daerah belum optimal	Pelaksanaan layanan belum terstandarisasi dengan baik	SOP belum dipedomani secara keseluruhan
			Penyelenggaraan tugas dan pelaksanaan layanan masih belum efektif	Lemahnya koordinasi internal



No	Biro	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kinerja tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat masih jauh dari perwujudan <i>good governance</i>	belum optimalnya akuntabilitas kinerja di Sekretariat Daerah	kualitas pelaporan kinerja yang belum sepenuhnya memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

2.3. Review terhadap RKPD

Review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 dilakukan untuk membandingkan program, kegiatan, subkegiatan, serta kebutuhan pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan program, kegiatan, subkegiatan, dan pagu indikatif yang tercantum dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027. Review dilakukan melalui analisis terhadap kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta target kinerja yang akan dicapai pada Tahun, kemudian dibandingkan dengan program, kegiatan, subkegiatan, dan pagu indikatif yang tercantum dalam Rancangan RKPD. Review tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi program, kegiatan, atau subkegiatan yang belum terakomodasi dalam Rancangan RKPD serta mengetahui perbedaan antara pagu indikatif yang dialokasikan dengan kebutuhan pendanaan riil yang diperlukan guna mendukung pencapaian target kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Hasil review menunjukkan bahwa secara umum program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 telah sesuai dengan kebutuhan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, terdapat perbedaan antara pagu indikatif yang dialokasikan dalam Rancangan RKPD dengan kebutuhan pendanaan hasil analisis masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah. Hasil



analisis menunjukkan bahwa pagu indikatif yang tersedia baru mampu mengakomodasi sebagian kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta sebagian kebutuhan operasional pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Sementara itu, kebutuhan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas, pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta berbagai kegiatan pendukung lainnya masih belum sepenuhnya terakomodasi.

Tabel 2.5 *Review* Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah pada Rancangan RKPD

No	Rancangan RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan	
	Unit Kerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Unit Kerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	915.237.774	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	9.826.353.416
2	Biro Hukum dan HAM	1.631.924.784	Biro Hukum dan HAM	6.390.256.254
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	103.820.786.465	Biro Kesejahteraan Rakyat	424.404.368.568
4	Biro Perekonomian	1.733.833.5664	Biro Perekonomian	12.520.000.000
5	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	778.483.071	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	7.940.263.837
6	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.011.669.699	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3.011.669.699
7	Biro Organisasi	162.710.598	Biro Organisasi	1.322.460.196
8	Biro Administrasi Pimpinan	33.191.051.172	Biro Administrasi Pimpinan	57.043.014.199,20



No	Rancangan RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan	
	Unit Kerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Unit Kerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
9	Biro Umum	310.234.432.482	Biro Umum	449.205.985.306

Sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.5, secara umum kebutuhan pendanaan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 masih lebih besar dibandingkan pagu indikatif yang dialokasikan dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pagu indikatif yang tercantum dalam Rancangan RKPD belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah secara optimal. Adapun penjelasan lebih lanjut berdasarkan hasil analisis masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut.

a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kebutuhan pendanaan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2027 sebesar Rp9.826.353.416,00, sedangkan pagu indikatif yang dialokasikan dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 sebesar Rp915.237.774,00, sehingga masih terdapat kekurangan pendanaan sebesar Rp8.911.115.642,00. Pagu indikatif tersebut baru mampu mengakomodasi sebagian kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, yaitu gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, tenaga outsourcing, serta sebagian kebutuhan perjalanan dinas.

Sementara itu, kebutuhan pendanaan yang belum terakomodasi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, antara lain fasilitasi kebijakan administrasi pertanahan dan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk



kepentingan umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesiapsiagaan kebencanaan melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA), penyelenggaraan dan verifikasi usulan penamaan rupabumi, fasilitasi penegasan/perubahan batas daerah, penataan daerah dan penataan desa, pengembangan aplikasi fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2027, pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten/kota, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), fasilitasi, monitoring, dan evaluasi kerja sama daerah, serta pemenuhan iuran keanggotaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Forum MPU.

b. Biro Hukum dan HAM

Kebutuhan pendanaan Biro Hukum dan HAM Tahun 2027 sebesar Rp6.390.256.254, sedangkan pagu indikatif yang dialokasikan dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 sebesar Rp1.631.924.784,00, sehingga masih terdapat kekurangan pendanaan sebesar Rp4.758.331.470,00. Pagu indikatif tersebut diprioritaskan untuk memenuhi sebagian kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat (fixed cost) serta sebagian kebutuhan operasional dasar unit kerja.

Kebutuhan pendanaan yang belum terakomodasi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, antara lain penyusunan dan evaluasi produk hukum daerah provinsi serta kabupaten/kota, penanganan perkara secara litigasi dan nonlitigasi, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pelayanan bantuan hukum melalui Posko Bale Pananggeuhan, pengembangan dan kodifikasi digital produk hukum



daerah dalam sistem JDIH terintegrasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sinkronisasi dan integrasi JDIH Provinsi Jawa Barat, serta pelaksanaan Bimbingan Teknis Bantuan Layanan Advokasi Desa (BALAD DESA). Selain itu, kebutuhan pendanaan tersebut juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan program penunjang yang meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi umum, peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, serta pembayaran gaji dan dukungan operasional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

c. Biro Kesejahteraan Rakyat

Kebutuhan pendanaan Biro Kesra Tahun 2027 sebesar Rp424.404.368.568,00, sedangkan pagu indikatif yang dialokasikan dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 sebesar Rp103.820.786.465,00, sehingga masih terdapat kekurangan pendanaan sebesar Rp320.583.582.103,00. Pagu indikatif tersebut baru mampu mengakomodasi sebagian kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat (*fixed cost*) serta sebagian kebutuhan operasional pendukung kegiatan.

Kebutuhan pendanaan yang belum dapat diakomodasi pada Tahun 2027 masih diperlukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Biro Kesra. Salah satu kebutuhan pendanaan yang menjadi prioritas adalah pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Tinggi (Beasiswa). Berdasarkan dokumen perencanaan (Renstra), kebutuhan anggaran untuk program tersebut ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000. Namun, sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun 2027, alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp30.000.000.000, sehingga tingkat pemenuhan kebutuhan pendanaan mencapai 50 persen dari kebutuhan yang telah direncanakan. Selain itu, alokasi anggaran penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi



Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat Provinsi maupun Nasional sebesar Rp5.000.000.000 saat ini hanya mencukupi untuk mendukung penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional, sehingga masih diperlukan tambahan pendanaan untuk penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi.

Kebutuhan pendanaan juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya, antara lain penyelenggaraan Petugas Haji Daerah (PHD), pengusulan baru Calon Pahlawan Nasional asal Jawa Barat, Festival Dulag, Tarawih Keliling, monitoring dan evaluasi hibah, serta pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat. Dalam program tersebut, Biro Kesra berperan sebagai sekretariat Tim Penilaian Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Jawa Barat. Mengingat Tahun 2027 merupakan tahun pelaksanaan penilaian, diperlukan dukungan anggaran yang memadai guna mendukung seluruh tahapan kegiatan, mulai dari koordinasi, fasilitasi, verifikasi, monitoring, hingga penilaian terhadap 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, kebutuhan pendanaan juga diarahkan untuk mendukung fasilitasi dan koordinasi penyusunan rumusan kebijakan urusan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, fasilitasi urusan bina mental spiritual, digitalisasi arsip dinamis, operasional Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Biro Kesra, serta berbagai kegiatan penunjang lainnya yang diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesra dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

d. Biro Perekonomian

Kebutuhan pendanaan Biro Perekonomian Tahun 2027 sebesar Rp12.520.000.000,00, sedangkan pagu indikatif yang dialokasikan dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 sebesar Rp1.733.833.566,00, sehingga masih terdapat kekurangan pendanaan sebesar



Rp10.786.166.434,00. Pagu indikatif tersebut baru mampu mengakomodasi sebagian kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat (fixed cost), meliputi pembayaran tenaga pelayanan umum sebanyak 7 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sebanyak 3 orang, serta sebagian kebutuhan operasional Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Biro Perekonomian.

Kebutuhan pendanaan yang belum terakomodasi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, antara lain koordinasi pengendalian inflasi daerah dan penguatan aplikasi SiLinda Jabar, fasilitasi kebijakan ekonomi syariah, regenerasi petani, penanganan alih fungsi lahan, perluasan akses keuangan dan digitalisasi daerah, penguatan investasi ekonomi kewilayahan, pemantauan Program Strategis Nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), fasilitasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan konektivitas, serta penyelenggaraan kegiatan penunjang Biro Perekonomian.

e. Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan

Kebutuhan pendanaan Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Tahun 2027 sebesar Rp7.940.263.837,00, sedangkan pagu indikatif yang dialokasikan dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 sebesar Rp778.483.071,00, sehingga masih terdapat kekurangan pendanaan sebesar Rp7.161.780.766,00. Pagu indikatif tersebut baru mampu mengakomodasi sebagian kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat (fixed cost), meliputi honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, tenaga outsourcing (front office), serta sebagian kebutuhan operasional pendukung kegiatan.



Kebutuhan pendanaan yang belum terakomodasi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, antara lain transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), fasilitasi penyertaan modal pada BUMD, fasilitasi dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas dan fasilitasi pimpinan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, serta penyelenggaraan kegiatan penunjang Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan.

f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kebutuhan pendanaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2027 sebesar Rp3.011.669.699,00, sedangkan pagu indikatif yang dialokasikan dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 sebesar Rp2.011.669.699,00, sehingga masih terdapat kekurangan pendanaan sebesar Rp1.000.000.000,00. Pagu indikatif tersebut baru mampu mengakomodasi sebagian kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat (fixed cost), meliputi honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu serta sebagian kebutuhan operasional pendukung kegiatan. Kebutuhan pendanaan yang belum terakomodasi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, antara lain sosialisasi implementasi digitalisasi Bale Desa West Java Digital Marketplace (WJDM), pelaksanaan Tender Pra-DPA, serta penyelenggaraan kegiatan penunjang kebutuhan pimpinan.

g. Biro Organisasi



Kebutuhan pendanaan Biro Organisasi Tahun 2027 sebesar Rp1.322.460.196,00, sedangkan pagu indikatif yang dialokasikan dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 sebesar Rp162.710.598,00, sehingga masih terdapat kekurangan pendanaan sebesar Rp1.159.749.598,00. Pagu indikatif tersebut baru mampu mengakomodasi sebagian kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat (fixed cost), meliputi honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu serta sebagian kebutuhan operasional pendukung kegiatan.

Kebutuhan pendanaan yang belum terakomodasi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, antara lain penyusunan proses bisnis pengambilan keputusan, penyusunan proses bisnis koordinasi lintas unit, penyusunan proses bisnis dan standar operasional prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) support system, pemetaan formasi pegawai, penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) bagi PNS, PPPK, dan tenaga outsourcing, serta pengembangan fitur aplikasi SURABI dan JAPATI.

h. Biro Administrasi Pimpinan

Kebutuhan pendanaan Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2027 sebesar Rp57.043.014.199,20, sedangkan pagu indikatif yang dialokasikan dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 sebesar Rp33.191.051.172,00, sehingga masih terdapat kekurangan pendanaan sebesar Rp23.851.963.027,00. Pagu indikatif tersebut baru mampu mengakomodasi sebagian kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat (fixed cost), meliputi pembayaran honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, tenaga alih daya (outsourcing), operasional rutin kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta sebagian kebutuhan operasional pendukung pelaksanaan tugas kedinasan pimpinan.



Kebutuhan pendanaan yang belum terakomodasi diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan penunjang Biro Administrasi Pimpinan, pelayanan dan fasilitasi kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pelayanan dan fasilitasi materi pimpinan, komunikasi pimpinan, dokumentasi pimpinan, pelayanan tamu pimpinan, pengaturan acara, hubungan keprotokolan, serta berbagai kegiatan pendukung lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Di samping kebutuhan pendanaan tersebut, penyusunan Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2027 juga memuat penyesuaian terhadap struktur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri. Salah satu penyesuaian tersebut adalah penambahan Sub Kegiatan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 mengenai penganggaran pelaksanaan medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah. Penambahan sub kegiatan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tertib, terukur, dan akuntabel. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan target sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas Kepala Daerah beserta 2 (dua) orang anak serta Wakil Kepala Daerah beserta istri dan 2 (dua) orang anak.

i. Biro Umum



Kebutuhan pendanaan Biro Umum Tahun 2027 sebesar Rp449.205.985.306,00, sedangkan pagu indikatif yang dialokasikan dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 sebesar Rp310.234.432.482,00, sehingga masih terdapat kekurangan pendanaan sebesar Rp138.971.552.824,00. Berbeda dengan unit kerja lainnya, pagu indikatif yang dialokasikan kepada Biro Umum bahkan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat (fixed cost) Sekretariat Daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang tersedia masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional Sekretariat Daerah secara keseluruhan.

Kebutuhan pendanaan yang belum terakomodasi diperlukan untuk mendukung pemeliharaan dan renovasi gedung kantor serta bangunan di lingkungan Sekretariat Daerah, peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat (fixed cost) yang meliputi gaji dan tunjangan ASN, gaji, tunjangan, dan operasional Gubernur serta Wakil Gubernur, pengelolaan rumah tangga Sekretariat Daerah, pembayaran jasa listrik, air, gas, dan telepon, penyediaan jasa tenaga keamanan, kebersihan, dan pengemudi, pembayaran upah tenaga teknis (P3P-PW), pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas pimpinan maupun operasional, serta pemenuhan kebutuhan operasional dan administrasi perkantoran lainnya, meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan dan kearsipan, pengelolaan aset, serta penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan di lingkungan Sekretariat Daerah.

Secara keseluruhan, hasil review menunjukkan adanya perbedaan antara pagu indikatif yang dialokasikan dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 dengan kebutuhan pendanaan hasil analisis Sekretariat Daerah. Perbedaan tersebut menjadi masukan dalam proses penyempurnaan perencanaan dan penganggaran pada tahapan selanjutnya, sehingga kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas



dan fungsi Sekretariat Daerah dapat terakomodasi secara lebih optimal serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan target kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2027.

Program Pembangunan Daerah dalam RKPD yang diamanatkan kepada Sekretariat Daerah, adalah:

Tabel 2.6 Tabel Program Pembangunan Tahun 2027

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Biro
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Inflasi	Persen	1,5 – 3,5	Biro Perekonomian
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Persen	1,500	Biro Perekonomian
3	Program Penataan Organisasi	Persentase Capaian Reformasi Birokrasi General (RB general)	Persen	87,65	Biro Organisasi
4	Program Kesejahteraan Rakyat	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	9,97	Biro Kesejahteraan Rakyat
5	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase BUMD Sehat	Persen	83,78	Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan
6	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Poin	99,36	Biro Hukum dan HAM
7	Program Pemerintahan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Poin	83,62	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro



No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Biro
	dan Otonomi Daerah Program Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian dan Pembangunan Program Penunjang Pemerintahan Daerah				Kesejahteraan Rakyat, Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan, dan Biro Perekonomian
8	Program Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja sama dengan atau lebih besar dari 0%	Persen	95,65	Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan
9	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	70,5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
10	Program Penataan Organisasi	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,77	Biro Organisasi, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Umum
11	Program Penataan Organisasi	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Poin	73,093	Biro Organisasi
12	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	Persen	100	Biro Organisasi



No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Biro
13	Program Penataan Organisasi	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	Poin	13,73	Biro Organisasi
14	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kategori	TINGGI	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Sumber: Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Stakeholder

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah tahun 2027 merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang harus memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Masukan ini menjadi instrumen penting dalam penyempurnaan dokumen agar lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Telaahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan rekomendasi strategis terhadap masukan yang telah diterima sehingga menghasilkan dokumen yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Masukan stakeholder ini diperoleh dari hasil penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2026. Metode pengumpulan masukan dilakukan melalui penyebaran format dan kuesioner kepada para stakeholder selama hampir tiga pekan. Proses ini berhasil menghimpun masukan dari berbagai pihak, termasuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, perwakilan kementerian dan lembaga, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, serta civitas akademika.



Selain melalui pengisian kuesioner, masukan juga diperoleh melalui rangkaian kegiatan Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Rangkaian kegiatan tersebut terdiri dari Focus Group Discussion (FGD) lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, FGD lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta FGD lingkup Asisten Administrasi Umum, yang menjadi ruang diskusi tematik untuk mengidentifikasi isu strategis, kebutuhan kebijakan, serta peran koordinatif Sekretariat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Seluruh rangkaian pembahasan tersebut kemudian dirumuskan dan diperdalam dalam acara puncak Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dengan tema Pembangunan tahun 2027 yaitu “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tata Kelola Pembangunan”, yang kemudian dilakukan penyepakatan masukan stakeholder sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027.

Berdasarkan hasil kompilasi masukan stakeholder pada Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, terdapat kecenderungan aspirasi yang menempatkan Sekretariat Daerah sebagai institusi yang perlu semakin diperkuat perannya dalam perumusan kebijakan, orkestrasi pembangunan lintas sektor, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Masukan stakeholder menunjukkan bahwa tantangan pembangunan ke depan menuntut Sekretariat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai unsur pendukung administratif kepala daerah, tetapi juga sebagai pusat koordinasi kebijakan strategis yang mampu memastikan sinkronisasi antarperangkat daerah, penguatan kolaborasi multipihak, serta peningkatan kualitas kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Isu-isu utama yang mengemuka meliputi kebutuhan penguatan kapasitas SDM aparatur berbasis kebutuhan pembangunan, perlunya tata kelola pembangunan yang lebih terintegrasi, pentingnya pergeseran orientasi kebijakan dari output administratif menuju dampak publik, serta penguatan



kolaborasi pentahelix dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam perspektif perencanaan, keseluruhan masukan tersebut menunjukkan perlunya penajaman arah kebijakan Sekretariat Daerah tahun 2027 agar semakin berorientasi pada *evidence-based policy making, governance orchestration, dan result-based governance*.

Dengan demikian, Renja Sekretariat Daerah tahun 2027 perlu diarahkan untuk memperkuat peran Sekretariat Daerah sebagai *policy advisor, governance orchestrator*, dan pengawal kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Penguatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi pembangunan, kualitas kebijakan daerah, serta konsistensi pelaksanaan prioritas pembangunan Jawa Barat secara lebih kolaboratif, adaptif, dan berdampak.

1. Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Masukan stakeholder pada lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat secara umum menyoroti pentingnya penguatan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam berbagai masukan yang disampaikan, terdapat perhatian yang cukup besar terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penguatan kehidupan sosial masyarakat. Stakeholder menilai bahwa pembangunan manusia masih menjadi agenda prioritas bagi Jawa Barat, mengingat berbagai indikator pembangunan manusia masih memerlukan penguatan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses layanan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara lebih merata. Selain itu, beberapa stakeholder juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi kebijakan lintas sektor dalam bidang kesejahteraan rakyat. Permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, serta



kerentanan kelompok masyarakat tertentu seringkali bersifat multidimensional dan melibatkan berbagai perangkat daerah.

Dalam konteks ini, Sekretariat Daerah memiliki peran penting dalam memastikan integrasi kebijakan lintas sektor, khususnya dalam memfasilitasi sinkronisasi kebijakan antara perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan, serta perlindungan masyarakat. Peran koordinatif Sekretariat Daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dapat saling terintegrasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Jawa Barat. Implikasi dari masukan stakeholder tersebut terhadap penyusunan Renja Sekretariat Daerah tahun 2027 adalah perlunya penguatan peran Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan kebijakan pembangunan manusia melalui peningkatan efektivitas forum koordinasi lintas perangkat daerah, penguatan monitoring pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, serta peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan manusia di Jawa Barat.

2. Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Masukan stakeholder pada lingkup perekonomian dan pembangunan menunjukkan adanya perhatian yang cukup besar terhadap upaya penguatan transformasi ekonomi daerah, peningkatan investasi, penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, serta peningkatan efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Beberapa stakeholder menyoroti pentingnya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui peningkatan kepastian regulasi, percepatan layanan perizinan, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah dalam mendukung kegiatan investasi. Hal ini dinilai penting mengingat investasi memiliki peran strategis dalam



mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing ekonomi Jawa Barat.

Selain itu, masukan stakeholder juga menyoroti pentingnya penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah agar mampu meningkatkan kinerja usaha, memperbaiki tingkat kesehatan perusahaan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Dalam konteks ini, beberapa stakeholder menekankan perlunya peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD, penguatan penerapan prinsip *good corporate governance*, serta optimalisasi pemanfaatan aset BUMD agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pembangunan daerah.

Masukan lain yang juga cukup menonjol adalah pentingnya penguatan koordinasi kebijakan dalam pengendalian inflasi daerah serta stabilisasi harga kebutuhan pokok. Stakeholder menilai bahwa pengendalian inflasi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini, peran Sekretariat Daerah menjadi penting dalam mengkoordinasikan kebijakan lintas sektor serta memastikan efektivitas pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah.

Berdasarkan masukan tersebut, implikasi bagi penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 adalah perlunya penguatan peran Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, khususnya melalui fasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung investasi, pembinaan dan pengawasan BUMD, serta pengendalian inflasi daerah. Sekretariat Daerah juga perlu memperkuat fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembangunan ekonomi agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



3. Lingkup Asisten Administrasi Umum

Masukan stakeholder pada lingkup administrasi umum secara umum menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi. Stakeholder menilai bahwa reformasi birokrasi perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem manajemen kinerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transformasi digital pemerintahan dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Selain itu, beberapa stakeholder juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan arsip, serta penguatan sistem pengendalian internal pemerintah. Tata kelola administrasi yang baik dipandang sebagai fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara efektif. Dalam konteks tersebut, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa sistem administrasi pemerintahan berjalan secara efektif dan mendukung kinerja seluruh perangkat daerah. Sekretariat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai penggerak peningkatan kualitas tata kelola melalui penguatan koordinasi kebijakan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Implikasi dari masukan stakeholder ini terhadap penyusunan Renja Sekretariat Daerah tahun 2027 adalah perlunya penguatan peran



Sekretariat Daerah dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas sistem administrasi pemerintahan, penguatan implementasi reformasi birokrasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

Secara keseluruhan, masukan stakeholder pada Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa peran Sekretariat Daerah ke depan diharapkan semakin kuat dalam mendukung kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Stakeholder menekankan pentingnya penguatan fungsi Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan strategis, koordinasi lintas perangkat daerah, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Masukan-masukan tersebut juga menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah memiliki peran penting sebagai penghubung kebijakan lintas sektor, pengendali kualitas tata kelola pemerintahan, serta pengarah integrasi kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2027 perlu diarahkan pada penguatan peran strategis Sekretariat Daerah dalam memastikan keterpaduan kebijakan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan, serta penguatan koordinasi pembangunan daerah secara lebih efektif dan kolaboratif.

Tabel 2.7 Analisis Masukan Stakeholder terhadap Penyusunan Renja
Sekretariat Daerah Tahun 2027

No	Substansi Masukan Stakeholder	Implikasi terhadap Program/Kegiatan Sekretariat Daerah	Rencana Tindak Lanjut pada Renja Sekretariat Daerah 2027
1	Stakeholder mengharapkan peningkatan kualitas SDM aparatur yang tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi mampu	Sekretariat Daerah perlu memfasilitasi penguatan kapasitas aparatur dalam bidang analisis kebijakan, perencanaan strategis,	Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam analisis kebijakan,



No	Substansi Masukan Stakeholder	Implikasi terhadap Program/Kegiatan Sekretariat Daerah	Rencana Tindak Lanjut pada Renja Sekretariat Daerah 2027
	melakukan analisis kebijakan, membaca data pembangunan, serta menghasilkan inovasi kebijakan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah.	serta pemanfaatan data untuk mendukung kualitas perumusan kebijakan daerah.	pemanfaatan data pembangunan, dan inovasi tata kelola pemerintahan.
2	Stakeholder menilai koordinasi kebijakan lintas perangkat daerah masih perlu diperkuat agar program pembangunan tidak berjalan sektoral dan lebih terintegrasi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.	Sekretariat Daerah perlu memperkuat mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah melalui forum koordinasi kebijakan, pemantauan pelaksanaan program strategis, serta sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah.	Penguatan orkestrasi kebijakan lintas sektor untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan pembangunan daerah.
3	Stakeholder mengharapkan kebijakan pemerintah daerah lebih berdampak langsung kepada masyarakat, tidak hanya berhenti pada penyusunan regulasi atau kegiatan administratif.	Sekretariat Daerah perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kebijakan serta mendorong perumusan kebijakan yang berbasis pada hasil dan dampak pembangunan.	Penguatan tata kelola kebijakan berbasis kinerja dan dampak pembangunan (result-based governance).
4	Stakeholder menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	Sekretariat Daerah perlu memperkuat koordinasi kebijakan pelayanan publik serta memfasilitasi peningkatan kualitas tata kelola pelayanan pada perangkat daerah.	Penguatan tata kelola pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
5	Stakeholder mengharapkan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar lebih profesional, sehat secara finansial, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah dan penciptaan lapangan kerja.	Sekretariat Daerah perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan BUMD serta memfasilitasi peningkatan tata kelola perusahaan melalui penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> .	Penguatan tata kelola dan kinerja BUMD guna meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
6	Stakeholder menekankan pentingnya penguatan kebijakan pengendalian inflasi daerah melalui	Sekretariat Daerah perlu memperkuat koordinasi kebijakan pengendalian inflasi melalui dukungan	Penguatan koordinasi kebijakan pengendalian



No	Substansi Masukan Stakeholder	Implikasi terhadap Program/Kegiatan Sekretariat Daerah	Rencana Tindak Lanjut pada Renja Sekretariat Daerah 2027
	sinergi pemerintah daerah dengan pelaku usaha dan pemerintah kabupaten/kota.	terhadap pelaksanaan program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).	inflasi daerah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
7	Stakeholder menyoroti perlunya peningkatan sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar program pembangunan lebih selaras dengan kebutuhan wilayah.	Sekretariat Daerah perlu memfasilitasi forum koordinasi pemerintahan daerah serta sinkronisasi kebijakan pembangunan lintas wilayah.	Penguatan sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
8	Stakeholder menekankan pentingnya penguatan reformasi birokrasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan.	Sekretariat Daerah perlu memperkuat koordinasi kebijakan reformasi birokrasi serta pemantauan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik.	Penguatan implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
9	Stakeholder mengharapkan percepatan transformasi digital pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah perlu memfasilitasi integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Percepatan transformasi digital pemerintahan dan integrasi layanan berbasis teknologi informasi.
10	Stakeholder menekankan pentingnya kolaborasi pembangunan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat untuk mendukung inovasi kebijakan dan pembangunan daerah.	Sekretariat Daerah perlu memperkuat forum koordinasi multipihak serta memfasilitasi kemitraan strategis pembangunan daerah.	Penguatan kolaborasi pembangunan daerah melalui pendekatan pentahelix.

Seluruh masukan stakeholder pada Sekretariat Daerah, dijabarkan secara lebih operasional pada level biro sebagai berikut:



1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Berdasarkan masukan stakeholder terhadap Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2027 yang berkaitan dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, secara umum masukan yang disampaikan berkaitan dengan dua hal utama, yaitu penguatan kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan serta penegasan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada aspek penguatan kolaborasi strategis, stakeholder mendorong sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas SDM dan tata kelola pembangunan daerah. Masukan tersebut meliputi penguatan kolaborasi dengan kawasan industri dalam pengembangan SDM berbasis kebutuhan industri, kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendukung inovasi pertanian dan ketahanan pangan, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam penyusunan kajian akademik, riset kebijakan, serta penyediaan rekomendasi berbasis *evidence based policy* sebagai bahan perumusan kebijakan daerah yang lebih efektif dan berdampak. Pada aspek kewenangan, stakeholder mendorong penegasan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi antar perangkat daerah maupun antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam implementasi kebijakan dan program.

Masukan stakeholder tersebut selaras dengan Tema RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027, yaitu "Pengembangan Produktivitas Perekonomian Berbasis Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pembangunan". Penguatan kolaborasi strategis diharapkan mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi SDM, penguatan kualitas kebijakan daerah berbasis *evidence-based policy*, peningkatan produktivitas daerah, serta tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif. Adapun tindak lanjut terhadap masukan tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui



Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada prinsipnya mengakomodasi masukan stakeholder sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, khususnya pada aspek fasilitasi kerja sama daerah serta pemetaan urusan pemerintahan daerah. Tindak lanjut tersebut diakomodasi dalam Rencana Kerja Tahun 2027 melalui fasilitasi kerja sama daerah dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, serta penyusunan bahan inventarisasi dan analisis pemetaan urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

2. Biro Hukum dan HAM

Masukan stakeholder menekankan pentingnya penguatan kualitas produk hukum daerah, ketepatan waktu fasilitasi produk hukum, penguatan analisis kebijakan, evaluasi regulasi, serta perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Stakeholder juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap perda yang berpotensi menghambat investasi, dukungan regulasi untuk seluruh program prioritas pembangunan tahun 2027, serta penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai policy partner. Tindak lanjut yang diakomodasi antara lain penyelarasan substansi dan teknik penyusunan Raperda/Raperkada kabupaten/kota, penguatan keselarasan regulasi daerah dengan perguruan yang lebih tinggi, integrasi kegiatan BALAD Desa dengan bantuan hukum masyarakat miskin, analisis kebutuhan regulasi, fasilitasi usulan Propemperda dan Propemperkada, serta dukungan terhadap revisi Raperda.

3. Biro Kesejahteraan Rakyat

Masukan stakeholder terhadap Biro Kesra menunjukkan bahwa isu utama yang paling mendominasi adalah pentingnya sinergi multipihak, terutama optimalisasi konsep pentahelix dan kemitraan dengan Perguruan



Tinggi. Selain itu, stakeholder juga menyoroti adanya kebijakan yang belum memberikan dampak signifikan, sehingga tahapan evaluasi kebijakan menjadi proses penting untuk menilai apakah kebijakan yang dilahirkan menyentuh akar rumput dan berbasis data riil (*evidence-based*). kemudian yang tidak kalah pentingnya banyaknya kebijakan yang belum terakomodir, diantaranya terkait isu jaminan kesehatan masyarakat miskin, sinkronisasi ketenagakerjaan (*link & match*), serta pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar di kabupaten/kota.

Terhadap isu tersebut, stakeholder mengharapkan Biro Kesra dapat memperkuat peran *orchestrator*, koordinator, dan evaluator yang kuat bagi OPD teknis di bawahnya. Khususnya dalam hal menjembatani perumusan regulasi yang inklusif di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan yang diminta antara lain berupa perumusan kebijakan dan koordinasi lintas instansi dalam mendorong implementasi nyata dari Tridarma Perguruan Tinggi agar hasil riset akademis dapat diintegrasikan dalam kebijakan daerah dan kurikulum berbasis kebutuhan wilayah (*link and match*) industri.

Masukan stakeholder kepada Biro Kesra sejalan dengan arah pembangunan Jawa Barat yang sebagaimana dituangkan dalam rancangan RKPD tahun 2027 bahwa fokus utama pembangunan adalah pada peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia sebagai pondasi produktivitas daerah. Masukan stakeholder yang menekankan pentingnya sinergi multipihak terutama dengan perguruan tinggi serta sinkronisasi ketenagakerjaan (*link and match*) dapat menjadi salah satu strategi/upaya dalam mewujudkan prioritas pertama yaitu 'Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul' pada sasaran pembangunan 'Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan'.

Bentuk tindak lanjut yang diakomodasi dalam Renja Tahun 2027, meliputi Pertama, Optimalisasi Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan,



pelatihan, dan pengabdian masyarakat, termasuk pemberian program beasiswa jenjang Perguruan Tinggi (S-1). Kedua, Penguatan fungsi koordinasi dan forum lintas sektor untuk penyelarasan perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat. Ketiga, Fasilitasi perumusan kebijakan publik dengan komitmen menguatkan fasilitasi pembuatan produk hukum, penetapan program prioritas yang tepat sasaran, serta peningkatan kualitas evaluasi kebijakan secara berkala.

Masukan stakeholder tersebut selaras dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Rancangan RKPD Tahun 2027 yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta sinkronisasi pendidikan dan ketenagakerjaan melalui pendekatan *link and match* menjadi bagian penting dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah "Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul", khususnya pada sasaran pembangunan "Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan". Dengan demikian, Biro Kesra memiliki peran strategis sebagai penghubung berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan kesejahteraan rakyat mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara lebih efektif.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan tersebut, Biro Kesra mengakomodasinya dalam Renja Tahun 2027 melalui beberapa arah kebijakan dan program prioritas. Pertama, optimalisasi implementasi Tridarma Perguruan Tinggi melalui penguatan kerja sama pada bidang pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemberian bantuan pendidikan tinggi (beasiswa) bagi mahasiswa jenjang Sarjana (S-1). Kedua, penguatan fungsi koordinasi dan forum lintas sektor dalam rangka penyelarasan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan bidang



kesejahteraan rakyat. Ketiga, peningkatan kualitas fasilitasi penyusunan kebijakan publik melalui penguatan koordinasi penyusunan produk hukum daerah.

Selain tindak lanjut yang diakomodasi melalui program dan kegiatan perangkat daerah, kebutuhan masyarakat juga difasilitasi melalui Kamus Usulan Masyarakat Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Nomor 1659/PR.01/BAPP tanggal 6 Maret 2026. Kamus usulan tersebut menjadi salah satu instrumen dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi Biro Kesra, khususnya melalui pemberian hibah pada bidang pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial. Usulan tersebut meliputi pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas madrasah, pondok pesantren, masjid, musala dan tempat ibadah lainnya, pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan swasta, pembangunan kobong dan sarana prasarana pesantren, pemberian beasiswa pendidikan tinggi, beasiswa santri, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi MAN/MAS, bantuan operasional organisasi kemasyarakatan keagamaan, pengadaan sarana pendidikan dasar dan menengah swasta, serta bantuan operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Melalui pengakomodasian usulan masyarakat tersebut diharapkan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan.

4. Biro Perekonomian

Masukan stakeholder menunjukkan bahwa isu utama yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan penguatan stabilitas dan transformasi ekonomi daerah. Isu tersebut mencakup pengendalian inflasi, ketahanan pangan, perluasan akses keuangan dan digitalisasi sistem pembayaran, transformasi UMKM, penguatan ekonomi syariah, akselerasi investasi, link and match kebutuhan industri dengan pengembangan SDM, pengelolaan sampah



terintegrasi, pengendalian alih fungsi lahan, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Tindak lanjut yang diakomodasi dalam Renja diarahkan melalui Koordinasi Pengendalian Inflasi, Fasilitasi Implementasi Program Kerja KDEKS Jawa Barat, Perluasan Akses Keuangan dan Digitalisasi Daerah, Penguatan Investasi Ekonomi Kewilayahan di Kawasan Rebana dan Jawa Barat Selatan, pemantauan dan evaluasi Program MBG dan KDKMP, monitoring alih fungsi lahan, fasilitasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan konektivitas, serta fasilitasi penyelarasan kebutuhan sektor industri dengan pengembangan SDM.

5. Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan

Usulan stakeholder menekankan perlunya penguatan tata kelola BUMD agar lebih sehat, profesional, produktif, serta mampu memberikan kontribusi terhadap PAD, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan percepatan pembangunan daerah. Isu yang banyak disampaikan meliputi transformasi BUMD, optimalisasi aset, peningkatan kualitas pembinaan dan pelaporan BUMD, evaluasi kinerja, pendampingan penugasan BUMD, serta penguatan administrasi pembangunan. Tindak lanjut dalam Renja diarahkan melalui transformasi BUMD, pengembangan BUMD Sangga Buana, inventarisasi dan optimalisasi aset, penguatan sistem informasi pelaporan BUMD, fasilitasi merger dan divestasi BUMD, evaluasi kinerja BUMD, fasilitasi penyertaan modal, serta pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui analisis capaian kinerja, monitoring dan evaluasi, serta pemantauan proyek strategis provinsi.

6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Masukan stakeholder menekankan pentingnya optimalisasi pengadaan barang/jasa untuk mendukung P3DN dan UMK, penguatan kapasitas SDM Pengadaan, perluasan e-katalog lokal, pendampingan e-Purchasing, serta



implementasi pengadaan berkelanjutan. Stakeholder mengharapkan Biro PBJ dapat meningkatkan layanan asistensi dari tahap persiapan sampai pemilihan penyedia, memperkuat sistem informasi pengadaan, serta memberikan bimtek dan sosialisasi regulasi pengadaan secara berkelanjutan. Tindak lanjut yang diakomodasi meliputi penugasan JF PPBJ sebagai PPK dan Pejabat Pengadaan di perangkat daerah, pendampingan melekat sejak tahap persiapan, monitoring berkala P3DN dan UMK melalui desk triwulanan, serta pelaksanaan program Bale Waluya Pengadaan yang terintegrasi dengan LMS BPSDM Provinsi Jawa Barat.

Secara umum, tindak lanjut terhadap masukan stakeholder dan kamus usulan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan Biro PBJ. Digitalisasi layanan semakin optimal, proses pengadaan menjadi lebih transparan dan terdokumentasi, kapasitas SDM pengadaan terus meningkat melalui berbagai kegiatan pembinaan, serta peluang partisipasi UMKM dalam pengadaan pemerintah semakin terbuka. Selain itu, koordinasi yang lebih intensif dengan perangkat daerah turut mendukung percepatan pelaksanaan pengadaan dan pencapaian target pembangunan daerah. Dengan demikian, masukan stakeholder dan kamus usulan tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga menjadi dasar penyempurnaan kebijakan, program, dan pelayanan Biro PBJ sehingga mampu memberikan layanan pengadaan yang semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

7. Biro Organisasi

Masukan stakeholder menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, terintegrasi, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Isu utama yang mengemuka berkaitan dengan penataan kelembagaan perangkat daerah, penyempurnaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, penguatan proses bisnis, reformasi birokrasi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja. Selain itu, stakeholder juga menyoroti



perlunya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi berbasis dashboard kinerja, termasuk penguatan pemanfaatan aplikasi JAPATI dan SURABI. Tindak lanjut yang diakomodasi dalam Renja diarahkan melalui agenda penataan organisasi, fasilitasi kelembagaan, reformulasi Anjab ABK, revitalisasi proses bisnis, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

8. Biro Administrasi Pimpinan

Masukan stakeholder banyak menyoroti perlunya penguatan komunikasi kebijakan pimpinan kepada publik. Stakeholder mengharapkan Biro Administrasi Pimpinan dapat menjadi fasilitator kolaborasi multipihak, mengoptimalkan sinergi dengan kabupaten/kota, memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap komunikasi informasi kebijakan pimpinan kepada masyarakat, serta memanfaatkan Satu Data Indonesia dalam mendukung layanan keprotokolan dan administrasi pimpinan. Tindak lanjut yang diakomodasi meliputi koordinasi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam hubungan keprotokolan, serta penyampaian penjelasan kebijakan kepala daerah kepada masyarakat.

9. Biro Umum

Masukan stakeholder menekankan penguatan kualitas SDM aparatur, tata kelola internal, akuntabilitas, budaya kerja, kolaborasi lintas sektor, integrasi data sektoral, serta standarisasi pelaporan kinerja. Stakeholder mengharapkan Biro Umum dapat meningkatkan kapasitas SDM aparatur, mendukung peningkatan IP ASN, memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, serta menerapkan pelaporan yang transparan dan terstandar. Tindak lanjut yang diakomodasi meliputi kolaborasi dengan BKD dan BPSDM untuk peningkatan kompetensi ASN, penerapan *data-based policy* dalam perencanaan dan evaluasi, standarisasi pelaporan melalui aplikasi digital



seperti JAPATI dan e-Monev Jabar, serta integrasi data sektoral bersama Diskominfo dan BPS Jawa Barat.



44AB1D3514

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional disusun tahun 2027 untuk mengidentifikasi dan menganalisis arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi landasan dalam penyusunan Renja. Analisis ini bertujuan memastikan bahwa sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta berbagai kebijakan strategis dan regulasi sektoral yang berlaku. Melalui analisis tersebut, Renja diharapkan mampu mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan karakteristik, kebutuhan, dan isu strategis pembangunan daerah, sehingga tercipta sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

a. Telaahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027

Pada periode 2025-2029 Visi Presiden adalah ‘Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045’. Visi tersebut dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan ke dalam delapan Asta Cita yang menjadi delapan prioritas pembangunan nasional. Adapun fokus arah kebijakan RPJPN pada tahap 1 periode 2025-2029 berdasarkan RPJMN adalah penguatan transformasi meliputi:

1. Transformasi Sosial, mencakup:
 - a) Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
 - b) Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif

2. Transformasi Ekonomi, mencakup:



PA SESDA 2027

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- a) Melanjutkan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan
 - b) Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
 - c) Penerapan ekonomi hijau, termasuk pelaksanaan transmisi energi tahap pertama
 - d) Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia
 - e) Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa
3. Transformasi Tata Kelola, mencakup:
- a) Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi
 - b) Penyempurnaan fondasi penataan regulasi
 - c) Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi
 - d) Peningkatan kualitas ASN berbasis merit
 - e) Kebijakan pembangunan berbasis bukti
 - f) Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
 - g) Peningkatan pelayanan public berbasis teknologi informasi
 - h) Penguatan masyarakat sipil
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, mencakup:
- a) Pembaharuan substansi hukum
 - b) Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila
 - c) Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani, dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional
 - d) Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai
 - e) Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif



- f) Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan)
Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi
 - g) Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, mencakup:
- a) Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat
 - b) Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana
 - c) Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup
 - d) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan
 - e) Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
 - f) Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK
6. Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana, mencakup:
- a) Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi
 - b) Pembangunan *island grid* (dimulai di Sumatera) dan *national grid* (dimulai antara Sumatera-Jawa) dengan konektivitas udara, darat, dan digital



- c) Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN)
 - d) Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan *micro grid*)
7. Kesyambungan Pembangunan, mencakup:
- a) Reformasi tata kelola fiskal
 - b) Mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah

Untuk tahun 2027, tema pembangunan nasional adalah ‘Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri’. Tema ini merupakan kelanjutan dari tema pembangunan nasional pada tahun 2026 yaitu ‘Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif’. Keberlanjutan tema merupakan sebuah sistem bersama sasaran pembangunan, arah kebijakan, dan strategi. Akselerasi pertumbuhan dilakukan dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang ditandai oleh peningkatan penerimaan negara, peningkatan kapasitas ekonomi, dan peningkatan belanja sektor prioritas. Akselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh peningkatan SDM yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur layanan dasar, tindakan preventif dan protektif kesehatan dengan perlindungan sosial adaptif, serta peningkatan kualitas SDM jangka panjang. Ketercapaian kedua kondisi tersebut akan berdampak kepada penurunan kemiskinan. Untuk mendukung ketercapaian tiga kondisi ini arah kebijakan dan strategi adalah pada kerangka prioritas nasional (Asta Cita), fokus pembangunan yang memuat KPI utama, direktif presiden, isu penting, dan prioritas pembangunan high-impact, serta pembangunan berbasis kewilayahan.



Gambar 3 1 Visi dan Misi Presiden (Prioritas Pembangunan/Asta Cita)



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Sebagaimana tema pembangunan di tahun 2027, fokus pembangunan adalah pada mengakselerasi pertumbuhan merujuk kepada sasaran pembangunan melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri. Pembangunan untuk peningkatan produktivitas difokuskan pada pertama, peningkatan kualitas SDM, tenaga kerja produktif, dan inovasi yang meliputi makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, sekolah rakyat dan sekolah unggul, layanan berkualitas dan akses kesehatan gratis, digitalisasi pendidikan dan IPTEKIN unggul, serta pendidikan dan pelatihan vokasi. Ke dua, peningkatan produktivitas difokuskan pada stimulus untuk produktivitas dan daya beli masyarakat memuat empat proyek pembangunan seperti kartu kesejahteraan dan jaminan sosial nasional, koperasi desa/kelurahan merah putih, pembiayaan perumahan dan penanganan pemukiman kumuh (gentengisasi), serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ke tiga, fokus produktivitas adalah pada digitalisasi dan efisiensi tata kelola melalui Satu Data Sosial



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sentra Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ekonomi (DTSEN), layanan digital optimal dan terintegrasi di sektor strategis, pemerintahan digital yang merata, dan tanggap darurat bencana. Ke empat adalah pada regulasi dan kelembagaan melalui diplomasi tangguh untuk perlindungan, ekonomi, budaya, kepemimpinan, pertahanan, dan kedaulatan, serta integritas tata kelola pemerintah.

Pada peningkatan investasi, fokus diarahkan pada pertama, efisiensi dan efektivitas investasi melalui pengelolaan sampah (instalasi PSEL), investasi hijau berkelanjutan, dan kemudahan perizinan. Ke dua, fokus diarahkan pada infrastruktur dan konektivitas ekonomi yang meliputi infrastruktur dasar, konektivitas logistic, serta pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Ke tiga, fokus pada inovasi pembiayaan pembangunan meliputi optimalisasi Danantara dan peran BUMN, serta pembiayaan pembangunan berbasis konvensional dan syariah. Ke empat adalah pada investasi berorientasi industri dan ekspor pada kawasan industri/kawasan ekonomi khusus serta destinasi pariwisata prioritas.

Terakhir, pembangunan pada peningkatan industri difokuskan pada pertama, industri besar strategis nasional meliputi industri besar strategis nasional, pengembangan mobil nasional, dan pengelolaan sampah. Ke dua, pada hilirisasi SDA strategis meliputi hilirisasi kelautan dan perikanan (pengembangan industri garam dan produk hasil laut), hilirisasi Perkebunan dan kehutanan (hilirisasi kelapa sawit), serta hilirisasi mineral dan gas. Ke tiga, pada swasembada pangan, energi, dan air meliputi swasembada pangan (KSPP), swasembada energi, serta swasembada air (*giant sea wall*).



Gambar 3.2 Sasaran Pembangunan dan Fokus Pembangunan Tahun 2027



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

b. Telaahan terhadap Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2027

Untuk mendukung Visi Presiden Periode 2025-2029, Kemendagri menetapkan visi 'Kementerian Dalam Negeri yang Berorientasi Kinerja, Adaptif, Kompeten, Sinergi, dan Inovatif (BerAKSI) sebagai Poros Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'. Visi tersebut dijabarkan ke dalam empat misi sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kualitas demokrasi Indonesia.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang inovatif berbasis teknologi.



44AB1D3514

4. Memperkuat sinergitas dan keselarasan tata kelola pemerintahan dalam negeri, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kewilayahan berbasis otonomi daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Selanjutnya, keempat misi tersebut dijabarkan ke dalam empat tujuan dan lima sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Tabel 1. Kemudian, merujuk kepada delapan Asta Cita atau prioritas pembangunan, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kemendagri mendukung tujuh diantaranya yang dijabarkan ke dalam 100 rincian output (RO). Disamping itu, Kemendagri juga memiliki peran dalam 10 (sepuluh) program prioritas Direktif Presiden. Untuk mewujudkan ketercapaian sasaran strategis dan target di 2027, Kemendagri menetapkan 20 arah kebijakan dan 85 strategi.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2027

No	Tujuan	Indikator Kinerja	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkannya kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi	1	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi	Nilai 79,95
		Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM)			Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM)	Nilai 68



No	Tujuan	Indikator Kinerja	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
				kewaspadaan nasional		
2	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul	2	Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepomongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri	Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul	10 Prodi
		Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (IKAPDN)			Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (IKAPDN)	Nilai 58,78
3	Menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil)	3	Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil)	Nilai 81
4	Meningkatkan kualitas tata kelola	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	4	Meningkatnya kualitas kebijakan,	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	Nilai 64



No	Tujuan	Indikator Kinerja	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	penyelenggaraa n pemerintahan dalam negeri dan desa, serta kualitas kebijakan dalam negeri dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan	Dalam Negeri (ITKPDN)		pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	Dalam Negeri (ITKPDN)	
		Indeks Tata Kelola Penyelenggaraa n Kewilayahan (ITKPK)			Indeks Tata Kelola Penyelenggaraa n Kewilayahan (ITKPK)	Nilai 65
		Indeks Penyelenggaraa n Trantibumlinm as (IPT)			Indeks Penyelenggaraa n Trantibumlinm as (IPT)	Nilai 80
		Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDDes)			Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDDes)	Nilai 8,5
		Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB)			Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB)	Nilai 94,01
		Persentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti			Persentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti	60%
		Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)			Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Nilai 90



No	Tujuan	Indikator Kinerja	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Indeks Kinerja GWPP)	5	Terwujudnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya,	Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Indeks Kinerja GWPP)	Nilai 74

Sumber: Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029

Agar tujuan dan sasaran kinerja Kemendagri tercapai, dibutuhkan pengaturan dan fasilitasi terhadap perilaku aparatur dan masyarakat melalui penetapan regulasi. Kerangka regulasi Kemendagri termuat dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang merupakan rencana kebutuhan regulasi sesuai dengan kebutuhan atas kebijakan pemerintah yang bersesuaian. Beberapa regulasi yang direncanakan ditetapkan di tahun 2027 adalah:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2028;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD (regulasi tahunan);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (regulasi tahunan);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (regulasi tahunan);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;



- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

c. Telaahan terhadap Rencana Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2027

Untuk mendukung ketercapaian visi Presiden, Kemen PANRB menetapkan visi ‘Terwujudnya Birokrasi yang Adaptif, Kolaboratif, Kapabel, dan Melayani dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045’. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan tiga misi yaitu (1) meningkatkan kapabilitas birokrasi pada aspek kelembagaan, proses bisnis, SDM, akuntabilitas, dan digitalisasi; (2) meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif; serta (3) memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam mencapai kinerja nasional. Merujuk kepada prioritas nasional, Kemen PANRB secara strategis memegang peran pada penyelenggaraan PN7 yang merupakan salah satu pilar fundamental dalam memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang baik yang merupakan tugas dan fungsi dasar Kemen PANRB.



Tabel 3.2 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis, dan Target Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2027

No	Tujuan	Indikator	No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2027
1	Meningkatnya peran birokrasi dalam mencapai kinerja nasional	Persentase instansi pemerintah prioritas dengan Indeks Tata Kelola dengan kategori Baik	1	Terpenuhinya dukungan Kementerian PANRB dalam pencapaian prioritas presiden	Persentase pemenuhan aspek tata kelola prioritas presiden	100
			2	Terpenuhinya rekomendasi OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) bidang tata kelola publik	Persentase pemenuhan standar, kriteria, dan rekomendasi pada setiap <i>legal instrument</i> aksesasi OECD terkait Kementerian PANRB	60
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Tata Kelola	3	Terwujudnya kelembagaan yang <i>agile</i> , kolaboratif, dan akuntabel	Skor komposit efektivitas kelembagaan nasional/Indeks Kapabilitas Kelembagaan Nasional	2,00
					Nilai Akuntabilitas Kinerja rata-rata nasional	73
		Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Nasional	4	Terwujudnya pemerintah digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ Indeks Pemerintah Digital Nasional	1,70



No	Tujuan	Indikator	No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2027
			5	Terwujudnya tata kelola ASN berbasis sistem merit	Indeks Sistem Merit (ISM) Nasional	0,63
			6	Terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan inklusif	Indeks Pelayanan Publik Nasional (IPP)	3,74
			7	Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel	Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan/ Indeks Kapabilitas Kelembagaan Kementerian PANRB	2,00
					Indeks SPBE/ Indeks Pemerintah Digital Kementerian PANRB	1,90
					Indeks Sistem Merit (ISM) Kementerian PANRB	0,70
					Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB	83,00
					Nilai Pelaksanaan RB Kementerian PANRB	91,50
					Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP
					Skor Indikator Kinerja Penyelenggaraan Anggaran (IKPA) Kementerian PANRB	95,0



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

No	Tujuan	Indikator	No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2027
					Skor Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kementerian PANRB	3,95
					Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kementerian PANRB	4,35

Sumber: Rencana Strategis KemenPANRB Tahun 2025-2029

Untuk mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan serta merujuk kepada hasil identifikasi peluang dan permasalahan yang dihadapi nasional selama lima tahun ke depan, fokus Kemen PANRB adalah untuk melakukan intervensi pada isu penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara, pemerintah digital, serta transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan. Fokus intervensi akan dilaksanakan melalui enam arah kebijakan dan 46 strategi. Kemudian, dukungan regulasi untuk ketercapaian tujuan dan sasaran direncanakan dalam kerangka regulasi pada tahun 2027 sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Penghargaan dan Pengakuan bagi ASN
- 2) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah terkait Pemberian Penghargaan dan Pengakuan bagi Pegawai ASN
- 3) Peraturan Menteri tentang Zona Integritas
- 4) Peraturan Menteri tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- 5) Peraturan Menteri tentang Kompetensi Pegawai ASN
- 6) Peraturan Menteri tentang Manajemen Talenta dan Karier Pegawai ASN
- 7) Peraturan Menteri tentang Penataan Jabatan ASN



d. Telaahan terhadap Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Untuk mendukung visi Presiden 2025-2029, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menetapkan visi 'Terwujudnya LKPP sebagai Penggerak Utama Transformasi Pengadaan yang Inklusif, Kredibel, dan Berkelanjutan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045'. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan dua misi yaitu (1) Memperkuat transformasi tata kelola peningkatan kinerja pengadaan yang inklusif, kredibel, dan berkelanjutan; dan (2) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya ketercapaian misi diukur melalui ketercapaian kondisi yang ditetapkan dalam 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis yang dihitung melalui formulasi 3 (tiga) indikator kinerja.

Tabel 3.3 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis, dan Target Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2027

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator	Target 2027
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas penerapan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional	1	Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional	Indeks Kinerja Pengadaan (IKP)	52,33
		2	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan (IPTKP)	67,34
2	Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP	1	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP	Nilai Reformasi Birokrasi	91,71

Sumber: Rencana Strategis LKPP Tahun 2025-2029



Merujuk prioritas pembangunan nasional, LKPP mendukung ketercapaian empat PN yaitu PN2, PN3, PN6, dan PN7. Keempat prioritas nasional tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) proyek prioritas sebagai bagian dari strategi LKPP. Untuk PN2, strategi pada pengembangan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan prinsip berkelanjutan dan penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan keanggotaan OECD. Untuk PN3, strategi pada fasilitasi kemitraan dan akses pasar serta untuk PN6 strategi pada perlindungan sosial adaptif dan inklusif. Untuk PN7, strategi pada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antikorupsi, pencegahan korupsi di sektor peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik, serta penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian sasaran kinerja LKPP membutuhkan kerangka regulasi sebagai kerangka normatif yang mendasari pelaksanaan program. Mempertimbangkan unsur ketidakpastian, LKPP tidak merancang penetapan regulasi secara khusus untuk tahun perencanaan tertentu. Sampai saat ini LKPP masih mendasarkan kepada regulasi yang telah berlaku yaitu

- 1) Perpres Nomor 93 Tahun 2002 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3) Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 4) Pedoman penyusunan rencana strategis pengadaan untuk pengadaan barang/jasa internasional;



- 5) Pedoman partisipasi pada pengadaan barang/jasa mitra pembangunan;
- 6) Pedoman pengadaan barang/jasa dalam kerangka kerja sama Indonesia-UAE CEPA bagi pelaku usaha;
- 7) Pedoman pengadaan barang/jasa dalam kerangka kerja sama Indonesia-UAE CEPA bagi K/L/Pemda;
- 8) Peraturan LKPP tentang solusi inovatif pengadaan barang/jasa;
- 9) Peraturan LKPP tentang manajemen kontrak;
- 10) Keputusan Kepala LKPP tentang vendor management system;
- 11) Keputusan Kepala LKPP tentang model dokumen untuk pekerjaan terintegrasi total solution;
- 12) Dokumen Instruksi Presiden/Surat Edaran Bersama/Surat Edaran Kepala LKPP tentang pedoman di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah
- 13) Revisi peraturan LKPP tentang kamus kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 14) Keputusan Kepala Pusat SDM Pengadaan Barang/Jasa tentang panduan pemantauan dan evaluasi level 3 pelatihan pengadaan barang/jasa;
- 15) Regulasi mengenai pelaksanaan surveillance 17 standar LPSE;
- 16) Regulasi mengenai kebijakan layanan SPBE untuk SPSE; dan
- 17) Keputusan Kepala LKPP tentang model dokumen pengadaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Ibu Kota Negara (IKN).

e. Keterkaitan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dengan Kebijakan Nasional

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi, kinerja inti Sekretariat Daerah adalah pada perumusan kebijakan umum serta koordinasi kinerja perangkat daerah dalam mendukung pembangunan. Merujuk hal tersebut, kinerja Sekretariat Daerah ada pada keseluruhan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan dengan demikian bermuara pada penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Jika dikategorisasikan dalam pengukuran kinerja, maka



Sekretariat Daerah ada dalam pengelompokkan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi. Maka dari itu, dari delapan prioritas pembangunan nasional, dukungan kinerja Sekretariat Daerah melekat pada PN7 yaitu ‘Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan’ pada sasaran ‘Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani’.

Selanjutnya, di samping kinerja yang berlandaskan tugas dan fungsi dasar, terdapat kinerja yang merupakan direktif pemerintah pusat. Hal ini berarti kinerja tersebut menjadi amanat yang harus dipastikan pelaksanaannya dan dipastikan ketercapaiannya. Kinerja direktif pemerintah pusat tersebut ada yang dimunculkan menjadi salah satu sasaran strategis dikarenakan merupakan kinerja outcome dan ada pula yang disimpan pada level kegiatan dikarenakan bersifat output. Berdasarkan pertimbangan ini, selain sasaran yang berkaitan dengan perwujudan birokrasi yang adaptif dan melayani, pada PN7 kinerja Sekretariat Daerah juga berkorelasi dengan sasaran ‘Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai Agen Pembangunan’, serta ‘Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.

Selanjutnya, Sekretariat Daerah juga mendukung PN2 yaitu ‘Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru’ pada sasaran ‘Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan’ dengan indikator ‘*Asia Power Index (Diplomatic Influence)*’ serta pada sasaran ‘Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan’ dengan indikator ‘Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global’. Kemudian PN4 yaitu ‘Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan,



Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas' pada sasaran 'Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata' dengan indikator 'Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi'.

Kemudian, jika melihat dokumen Rencana Strategis Kemendagri, Kemen PANRB, serta LKPP, kinerja Sekretariat Daerah dalam mendukung prioritas nasional sejalan dengan kinerja ketiga Kementerian/Lembaga (K/L) tersebut. Disebutkan dalam Renstra Kemendagri bahwa Kementerian mendukung 7 dari 8 PN sementara pada Renstra Kemen PANRB disebutkan bahwa kinerja berfokus pada pendudukan PN7, dan pada Renstra LKPP kinerja mendukung pada PN2, PN3, PN6, dan PN7. Sementara itu, Sekretariat Daerah mendukung prioritas nasional pada PN2, PN4, dan PN7. Merujuk hal tersebut, Sekretariat Daerah patut melihat rencana ketiga K/L yang dapat berimplikasi terhadap kinerja Sekretariat Daerah maupun sebaliknya.

Dalam mendukung PN2, tidak ditemukan kinerja yang berimplikasi langsung. Pada PN2, Kemendagri fokus pada batas wilayah negara yang bukan kewenangan provinsi. Kemudian pada daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola persampahan serta tata kelola air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman yang pada Sekretariat Daerah kinerja berbentuk dukungan kebijakan. Pada PN4, fokus Kemendagri yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat Daerah adalah pada implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi. Fokus ini juga menjadi perhatian Sekretariat Daerah yang dijabarkan dalam perumusan kebijakan yang secara operasional dilaksanakan oleh Biro Kesra.

Pada PN7 dukungan Kemendagri berkorelasi pada mayoritas kinerja biro yaitu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan GWPP, SPM, kerja sama daerah, batas daerah, penguatan kecamatan, penataan daerah, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan



daerah. Kedua, pada Biro Organisasi yaitu rencana penataan organisasi, evaluasi efektivitas perangkat daerah, serta penyelenggaraan pelayanan publik. Ketiga, pada Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan yaitu berkaitan dengan rencana fasilitasi penerbitan sukuk/obligasi serta pengecekan pada kontribusi BUMD terhadap daerah. Keempat, pada Biro Perekonomian yang berkaitan dengan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Terakhir, pada Biro Hukum dan HAM berkaitan dengan reviu Kemendagri terhadap daerah yang memiliki kepatuhan terhadap penyusunan peraturan daerah. Selanjutnya, melihat kerangka regulasi Kemendagri pada tahun 2027 terdapat regulasi yang perlu menjadi perhatian Sekretariat Daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2028.

Selanjutnya, fokus Kementerian PANRB pada PN7 berkaitan dengan kinerja Sekretariat Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Biro Organisasi yaitu tentang penguatan kelembagaan, proses bisnis, akuntabilitas kinerja, serta peningkatan tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik. Melihat kerangka regulasi yang akan disusun oleh Kemen PANRB di tahun 2027 terdapat beberapa yang perlu menjadi perhatian yaitu peraturan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, zona integritas, dan penataan jabatan ASN.

Sementara itu, dalam mendukung ketercapaian PN2 LKPP fokus dalam membuka akses untuk produk ramah lingkungan/berkelanjutan. Upaya tersebut, akan memiliki dampak kepada kinerja Sekretariat Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Sekretariat Daerah juga turut mendukung pencapaian PN2 melalui perwujudan perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan dengan memastikan produk barang/jasa di wilayah Jawa Barat bersertifikasi halal sebagaimana tercantum dalam Renstra. Kemudian untuk mendukung ketercapaian PN3, LKPP mengambil peran dalam memfasilitasi kemitraan dan membuka akses pasar. Sementara itu, kinerja Sekretariat Daerah dalam dukungan PN3 berupa dukungan kebijakan bagi dinas teknis. Dalam kerangka pendudukan PN2 dan



PN3 tersebut, implikasi program LKPP pada Sekretariat Daerah, secara *cascading* kinerja merujuk kepada PN7.

Tabel 3.4 Keterkaitan Rencana Kerja Kemendagri dan Kemen PANRB terhadap Asta Cita

Asta Cita/Prioritas Pembangunan Nasional							
Asta Cita 1	Asta Cita 2	Asta Cita 3	Asta Cita 4	Asta Cita 5	Asta Cita 6	Asta Cita 7	Asta Cita 8
Dukungan Kementerian Dalam Negeri (pada Rincian Output) terhadap Asta Cita yang Dapat Berimplikasi pada Kinerja Sekretariat Daerah.							
Asta Cita 4		Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.					
Asta Cita 7		1. Rekomendasi pelaksanaan model ideal kewenangan dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP); 2. Daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam penyediaan pelayanan publik; 3. Pilot project kerja sama daerah dalam mendukung pusat pertumbuhan di wilayah metropolitan; 4. Daerah yang memiliki angka Indeks Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berkategori sangat baik; 5. Daerah yang difasilitasi dalam penguatan peran kecamatan dalam koordinasi vertikal dan horizontal; 6. Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian batas daerah; 7. Daerah dengan proporsi kontribusi BUMD meningkat dalam APBD; 8. Daerah yang difasilitasi dalam menerbitkan obligasi daerah/sukuk daerah; 9. Daerah yang menerbitkan obligasi/sukuk daerah; 10. Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan perumahan rakyat berdasarkan tipologi daerah; 11. Rekomendasi ketepatan pembagian urusan wajib pelayanan dasar; 12. Rekomendasi ketepatan pembagian urusan wajib non-pelayanan dasar;					



13. Rekomendasi ketepatan pembagian urusan pilihan;
14. Daerah yang menerapkan manajemen sistem pengaduan pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15. Daerah yang difasilitasi dalam penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
16. Database peraturan daerah yang terintegrasi;
17. Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kualitas rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang telah sesuai dengan hasil review Kemendagri;
18. Daerah yang memiliki skor Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) berkategori "Sangat Baik";
19. Evaluasi efektivitas perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Perangkat Daerah eksisting;
20. Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
21. Rekomendasi model ideal penataan daerah dalam rangka Revisi UU No. 23 Tahun 2014;
22. Rekomendasi model ideal perangkat daerah dalam rangka Revisi UU No. 23 Tahun 2014;
23. Daerah dengan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri berkategori "Baik"; dan
24. Rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah dalam rangka Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dukungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Asta Cita yang Dapat Berimplikasi pada Kinerja Sekretariat Daerah.

Asta Cita 7

1. Peningkatan kapabilitas instansi pemerintah melalui penguatan kelembagaan dan proses bisnis yang terintegrasi;
2. Penguatan akuntabilitas kinerja; dan
3. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik.

Dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (pada Rincian Output) terhadap Asta Cita yang dapat Berimplikasi pada Kinerja Sekretariat Daerah.



Asta Cita 2	1. Pengembangan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan prinsip berkelanjutan meliputi: (a) rancangan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/berkelanjutan; (b) produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah; (c) K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/berkelanjutan; dan 2. Penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan keanggotaan OECD yang meliputi kerja sama di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional.
Asta Cita 3	Fasilitasi kemitraan dan akses pasar yang meliputi (a) penyedia UMK yang <i>on-boarding</i> dalam sistem pengadaan digital; serta (b) pelaku usaha UMK yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas usaha dalam PBJ.
Asta Cita 6	Perlindungan sosial adaptif dan inklusif dengan upaya meningkatkan penyedia UMK yang <i>on-boarding</i> dalam sistem pengadaan digital sehingga pelaku usaha dari kelompok rentan dapat mengakses pasar pemerintah secara lebih adil dan terbuka.
Asta Cita 7	1. Penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi: (a) Desa yang memiliki nilai maturitas pengadaan minimal Level 2; (b) SDM PBJ dan Non-JF PBJ; (c) UKPBJ yang mencapai kematangan minimal Level 3; 2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan anti korupsi; dan 3. Sistem pencegahan korupsi di sekitar peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya public meliputi: (a) rekomendasi kebijakan terkait prinsip bisnis berintegritas; (b) rancangan peraturan terkait prinsip bisnis berintegritas; (c) K/L/Pemda yang terbangun kapabilitas untuk pencegahan korupsi pengadaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sebagai unit kerja yang bertugas merumuskan kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, Sekretariat Daerah berfungsi sebagai penghubung utama antara kepala daerah dengan perangkat



daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan peran ini, Sekretariat Daerah memastikan bahwa kebijakan daerah diimplementasikan secara optimal guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sekretariat Daerah juga berperan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan prinsip *good governance*. Hal ini mencakup penguatan koordinasi tidak hanya antar perangkat daerah, tetapi juga dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Optimalisasi perumusan kebijakan berbasis data dan bukti, serta peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi kebijakan, menjadi langkah penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan lebih terarah, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Sekretariat Daerah juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan daerah tidak hanya bersifat administratif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang lebih berbasis bukti dan partisipatif menjadi kunci dalam memastikan setiap kebijakan yang dirancang dapat lebih tepat sasaran dan selaras dengan visi pembangunan jangka menengah dan panjang daerah. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah, Sekretariat Daerah menetapkan serangkaian tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2027. Melalui peran strategisnya, Sekretariat Daerah diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas koordinasi kebijakan, memperkuat sinergi lintas sektor, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin adaptif terhadap perubahan dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Jawa Barat secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan peran tersebut, Sekretariat Daerah telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam



Renstra Tahun 2025-2029 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2027. Tujuan dan sasaran ini mencerminkan komitmen Sekretariat Daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Penetapan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja dilakukan tidak hanya sebagai penjabaran kebijakan pembangunan nasional tetapi juga disusun secara SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, time-bound*). Artinya, tujuan Sekretariat Daerah dalam mendukung ketercapaian visi dan misi pembangunan Jawa Barat logis dan dapat dicapai.

Di samping memenuhi prinsip SMART, penetapan target kinerja juga perlu mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang. Perubahan kebijakan nasional, perkembangan regulasi, kondisi fiskal, kemajuan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang semakin dinamis mengharuskan perangkat daerah memiliki kemampuan untuk beradaptasi secara cepat dan tepat tanpa mengabaikan arah pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyesuaian target kinerja merupakan bagian dari upaya menjaga agar perencanaan tetap relevan, responsif, dan selaras dengan kondisi aktual.

Dalam konteks tersebut, perubahan target dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan perencanaan berdasarkan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Penyesuaian ini tidak dimaksudkan untuk mengubah sasaran strategis, melainkan untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan mampu mendukung pencapaian hasil pembangunan secara optimal. Dengan demikian, proses penyesuaian target mencerminkan penerapan tata kelola pemerintahan yang adaptif (*adaptive governance*), *agile*, dan berbasis kinerja, sehingga organisasi mampu merespons perubahan secara efektif sekaligus mempertahankan akuntabilitas terhadap pencapaian tujuan pembangunan.



Mempertimbangkan uraian di atas serta merujuk kepada target kinerja jangka menengah pada Renstra, sembilan IKU mengalami perubahan target dengan rincian tujuh IKU menjadi lebih tinggi dan dua IKU menjadi lebih rendah. Perubahan target menjadi lebih tinggi didorong oleh ketercapaian kinerja yang melebihi 100 persen di tahun 2025. Sementara itu, target kinerja yang berubah menjadi lebih kecil secara angka, didorong oleh kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh Sekretariat Daerah. Pertama, kondisi kesehatan BUMD yang bergantung 100 persen pada *willingness* dan upaya keras dari internal perusahaan. Sekretariat Daerah memberikan dukungan dalam penciptaan lingkungan yang berdampak positif bagi BUMD berupa penetapan regulasi dan pembinaan. Namun, disamping itu, perubahan BUMD banyak dipengaruhi oleh internal BUMD itu sendiri. Sementara itu, pada penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, penetapan indikator pengukuran, unit pelayanan yang dilakuakn penilaian, serta hasil evaluasi merupakan kewenangan mutlak Kementerian PANRB. Sekretariat Daerah memberikan dukungan dengan terus memastikan seluruh standard pelayanan dipenuhi oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik.

Mempertimbangkan uraian di atas serta merujuk kepada target kinerja jangka menengah pada Renstra, sembilan IKU mengalami perubahan target dengan rincian tujuh IKU menjadi lebih tinggi dan satu IKU menjadi lebih rendah. Perubahan target menjadi lebih tinggi didorong oleh ketercapaian kinerja yang melebihi 100 persen di tahun 2025. Sementara itu, perubahan target menjadi lebih kecil dilakukan pada indikator 'Indeks Tata Kelola Pengadaan' yang dilatarbelakangi oleh adanya perubahan perhitungan komponen penilaian berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 74 Tahun 2026 tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Sebagai Aspek Indikator Meso Dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2026-2029.



Berdasarkan regulasi tersebut, komponen penilaian 'Indeks Tata Kelola Pengadaan' mengalami penambahan sub komponen indikator penilaian. Sub komponen yang menjadi tambahan penilaian antara lain adalah integritas pengadaan, realisasi pengadaan langsung transaksional, realisasi penunjukan langsung transaksional, realisasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa, serta penyusunan rencana aksi pemenuhan JF PPBJ dan PPK bersertifikat kompetensi. Dengan adanya penambahan beberapa indikator penilaian tersebut, indikator-indikator yang semula telah terpenuhi mengalami penurunan bobot nilai. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian target.

Perhitungan ITKP Tahun 2021-2025 (berdasarkan SE Kepala LKPP No 4 Tahun 2021)			Perhitungan ITKP Tahun 2026 – 2029 (berdasarkan Kepka No 74 Tahun 2026)		
No.	Indikator	Bobot	No.	Indikator	Bobot
A.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	30	A.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	30
	a. SiRUP	10		1. Rencana Pengadaan	10
	b. E-Tendering	5		a. Pengumuman RUP	5
	c. E-Katalog	4		b. RUP Penyedia	2,5
	d. Non E-Tendering & Non E-Purchasing	5		c. RUP <i>e-Tendering</i> + <i>e-Purchasing</i> (TP)	2,5
	e. E-Kontrak	5		2. Realisasi Pengadaan	20
	f. Toko Daring	1		a. Realisasi <i>e-Tendering</i> + <i>e-Purchasing</i> (TP)	10
				b. Realisasi Pengadaan Langsung Transaksional (pl)	2,5
				c. Realisasi Penunjukan Langsung Transaksional (PL)	2,5
				d. Realisasi Digitalisasi PBJ	5
B.	Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	30	B.	Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	30
				a. Keterisian formasi JF PPBJ/Personal Lainnya	15
				b. Penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya	9
				c. Penyusunan Rencana Aksi pemenuhan JF PPBJ (Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi	6
C.	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	40	C.	Tingkat Kematangan UKPBJ	30
			D.	Integritas Pengadaan	10



Adapun untuk indikator kinerja yang belum mencapai target pada tahun 2025, target kinerja tahun 2027 tidak dilakukan penyesuaian ke arah yang lebih rendah. Kebijakan ini mencerminkan komitmen yang kuat (strong willingness) Sekretariat Daerah untuk tetap menjaga arah pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Target yang telah ditetapkan dipandang sebagai sasaran yang realistis dan tetap dapat dicapai melalui penguatan strategi pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta penguatan mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Dengan demikian, target kinerja tidak semata-mata didasarkan pada capaian historis, tetapi juga mempertimbangkan potensi perbaikan kinerja, berbagai upaya akselerasi yang akan dilaksanakan, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong budaya kinerja yang lebih progresif, adaptif, dan berorientasi pada hasil, sehingga target yang belum tercapai pada periode sebelumnya menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.



Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027

Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target Renstra	Target Renja
Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	9,61 persen	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	9,86 persen	9,97 persen
Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro	Tingkat Inflasi	1,5- 3,5 persen	Terkendalinya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat	Tingkat Inflasi	1,5- 3,5 persen	1,5- 3,5 persen
Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1,500 poin	Meningkatnya Kinerja BUMD	Persentase BUMD Sehat	83,78 persen	83,78 persen
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Persentase Capaian General RB	87,65 persen	Regulasi Daerah Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	90,75 poin	99,36 poin
			Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	78,20 poin	83,62 poin



44AB1D3514

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target Renstra	Target Renja
			Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target	Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja => 0%	63,75 persen	95,65 persen
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	90,32 poin	70,5 poin
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat	Indeks Pelayanan Publik	4,77 poin	4,77 poin
			Kelembagaan <i>Agile</i>	Nilai Evaluasi Kelembagaan	73,093 poin	73,093 poin
			Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	95 persen	100 persen
			Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	13,65 poin	13,73 poin



44AB1D3514

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target Renstra	Target Renja
			Kinerja Pembangunan			
			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kategori Tinggi	Kategori Tinggi



44AB1D3514

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2027, arah pembangunan Provinsi Jawa Barat difokuskan pada tema “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tata Kelola Pembangunan.” Tema tersebut merupakan penjabaran dari visi pembangunan Jawa Barat “*Jabar Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata*” yang menekankan pembangunan yang inklusif, berbasis potensi wilayah, serta didukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mempersiapkan berbagai program dan kegiatan yang berperan sebagai *policy orchestrator*, yaitu memastikan sinkronisasi kebijakan lintas perangkat daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, serta fasilitasi kebijakan pembangunan pada sektor strategis. Dukungan program Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2027 difokuskan pada empat prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Prioritas 1, yaitu Mewujudkan sumber daya manusia berkarakter unggul;
2. Prioritas 2, yaitu Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif;
3. Prioritas 3, yaitu Mengurangi disparitas pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan;
4. Prioritas 4, yaitu Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*.

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas tersebut, Sekretariat Daerah melaksanakan berbagai program kebijakan strategis yang mencakup aspek pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta tata kelola administrasi pemerintahan yang telah dirumuskan melalui rangkaian Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, yang terdiri dari Focus



Group Discussion (FGD) lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum, diantaranya sebagai berikut:

1. Dukungan Program Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pada lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dukungan program diarahkan pada penguatan kebijakan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur desa. Fokus kebijakan meliputi penguatan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan, peningkatan literasi kebencanaan masyarakat, penguatan kebijakan pelayanan dasar, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan keadilan. Selain itu, kebijakan pada sektor kesejahteraan rakyat juga diarahkan pada penguatan nilai-nilai sosial dan keagamaan, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan dunia industri dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Program strategis yang menjadi fokus dukungan Sekretariat Daerah pada lingkup ini antara lain:

- Optimalisasi kebijakan manajemen kebencanaan daerah
- Pengarusutamaan kebijakan Pro Desa dan Kelurahan
- Integrasi data dan optimalisasi pemanfaatan aset desa
- Integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik hingga desa
- Perumusan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar
- Program bantuan hukum bagi masyarakat miskin
- Advokasi hukum masyarakat melalui Bale Pananggeuhan
- Program Bantuan Layanan Advokasi Desa (BALAD Desa)
- Perumusan kebijakan penguatan nilai agama dalam pembangunan SDM
- Perumusan kebijakan peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
- Optimalisasi kolaborasi dengan perguruan tinggi dan dunia industri



Melalui program tersebut, Sekretariat Daerah berperan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. Dukungan Program Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pada lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dukungan program diarahkan pada penguatan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan investasi, serta penguatan daya saing ekonomi Jawa Barat. Fokus kebijakan meliputi pengendalian inflasi daerah, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan akses keuangan masyarakat, transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengembangan kawasan ekonomi strategis. Selain itu, kebijakan pembangunan ekonomi juga diarahkan pada penguatan sektor ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi syariah, serta optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Program strategis yang menjadi fokus dukungan Sekretariat Daerah pada lingkup ini antara lain:

- Pengendalian inflasi daerah
- Pengembangan akses keuangan dan digitalisasi ekonomi daerah
- Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Pemantauan dan evaluasi program nasional seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
- Pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan
- Pemantauan kebijakan investasi berbasis kewilayahan
- Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMK
- Fasilitasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif
- Fasilitasi kebijakan pengembangan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi



- Fasilitasi kebijakan tata ruang yang berkelanjutan
- Program penguatan SDM berbasis kebutuhan ekonomi melalui kebijakan link and match
- Fasilitasi dan evaluasi penyertaan modal daerah
- Transformasi BUMD

Melalui program tersebut, Sekretariat Daerah berperan dalam memperkuat kebijakan pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan iklim investasi, serta mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Dukungan Program Lingkup Asisten Administrasi Umum

Pada lingkup Asisten Administrasi Umum, dukungan program difokuskan pada penguatan tata kelola birokrasi, peningkatan kualitas regulasi daerah, serta optimalisasi sistem administrasi pemerintahan. Kebijakan diarahkan pada penataan kelembagaan perangkat daerah, penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program strategis yang menjadi fokus dukungan Sekretariat Daerah pada lingkup ini antara lain:

- Penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa dan pengadaan berkelanjutan
- Optimalisasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa di desa
- Perumusan Peraturan Daerah tentang perangkat daerah
- Perumusan Peraturan Gubernur tentang kedudukan dan tugas perangkat daerah
- Perumusan Peraturan Gubernur tentang kedudukan dan tugas cabang dinas, UPTD, dan satuan pendidikan
- Penyusunan regulasi tentang tata hubungan kerja perangkat daerah
- Fasilitasi formasi jabatan fungsional teknis perangkat daerah
- Fasilitasi penataan kelembagaan pemerintah kabupaten/kota



Merujuk kepada dukungan program prioritas pembangunan dilihat dari lingkup Asisten Sekretaris Daerah, dalam mendukung ketercapaian 4 Prioritas Nasional, Sekretariat Daerah mendukung tiga Program Unggulan Gubernur yang berkaitan dengan pembangunan SDM, penanganan kesehatan, dan transformasi birokrasi berdampak. Untuk pembangunan SDM yaitu 'Langkah Kelima', dukungan Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat berkolaborasi dengan program pada Dinas Kesehatan. Program yang sama dilaksanakan untuk mendukung 'Langkah Ketiga' yaitu program unggulan Gubernur dalam pembangunan SDM pada sektor pendidikan berkolaborasi dengan program pada Dinas Pendidikan. Program unggulan Gubernur ketiga yaitu 'Langkah Kesembilan' didukung oleh pelaksanaan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Program Kesejahteraan Rakyat, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan, serta Program Penataan Organisasi.

Di samping dukungan terhadap Program Unggulan Gubernur, program-program di atas juga mendukung terhadap enam Program Prioritas Daerah. Salah satu Program Prioritas Daerah yaitu Program Stabilitas Ekonomi Makro Daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD didukung oleh pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan. Secara lebih detail, informasi terkait dukungan program Sekretariat Daerah terhadap Program Prioritas Daerah maupun Program Unggulan Gubernur disajikan dalam Tabel 3.5.



PA SEJDA 2027

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code
atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.5 Dukungan Biro Pada Program Prioritas Pembangunan Tahun 2027

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah	Bentuk Dukungan Biro/Kegiatan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Cross Cutting	Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	P1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Program Penanganan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Langkah Kelima: Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan Penambahan Layanan Khusus, serta Pemberian Beasiswa Dokter Spesialis, sesuai dengan Kelangkaan dan Karakteristik Penyakit Masyarakat	Program Kesejahteraan Rakyat	1. Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rumusan Kebijakan Urusan Pelayanan Dasar 2. Fasilitasi Tim Kabupaten Kota Sehat 3. Fasilitasi rumusan kebijakan Urusan Kesehatan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
		Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama		Program Kesejahteraan Rakyat	1. Fasilitasi Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan lingkup Pemprov Jabar (MUI, Bimas Budha, Bimas Khatolik, Bimas Hindu, Bimas Kristen, PW NU, Persis, PW Muhammadiyah, Pesparani, Pesparawi, BKPRMI, PW Pemuda Muhammadiyah, Baznas) 2. Peringkatan Hari Besar Keagamaan (Idul Fitri, Idul Adha, Nuzulul Qur'an, Hari Santri) 3. Pemberian Takjil Ramadhan (Masjid Aljabbar, Masjid Nurul Iman LPTQ, Masjid Raudathul Irfan, Masjid Pakuan, Masjid Attaawun, Masjid Tajuf Gede) 4. Fasilitasi bantuan ke Lembaga Vertikal (TPHD) 5. Fasilitasi Majelis Taklim (Masjid Almuttaqien dan Pusdai) 6. Penyelenggaraan Festival Dulag Istimewa	Biro Kesejahteraan Rakyat	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 5. Program Pengelolaan Permuseuman 6. Program Pengembangan Kebudayaan 7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional



44AB1D3514

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah	Bentuk Dukungan Biro/Kegiatan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Cross Cutting	Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan program Taraweh Keliling 7. Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rumusan Kebijakan urusan Bina Mental Spiritual.			8. Program Pembinaan Sejarah
		Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi	Langkah Ketiga: Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, Serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi ternama di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.	Program Kesejahteraan Rakyat	1. Bantuan Pendidikan bagi Santri Tidak Mampu 2. Bantuan Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Jenius/Berprestasi (Beasiswa Pancawaluya) 3. Bantuan Pendidikan bagi Madrasah Negeri dan Swasta 4. Bantuan Kegiatan LPTQ (MTQ/STQ Tingkat Provinsi dan Nasional) 5. Program PSDKU (Program Studi di Luar Kampus Utama), Kerjasama dengan 4 universitas di Jawa Barat 6. Fasilitasi dan Koordinasi penyusunan rumusan Kebijakan Urusan Pendidikan 7. Implementasi Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Biro Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	1. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 2. Program Pengelolaan Pendidikan 3. Program Pengembangan Kurikulum 4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 6. Program Pembinaan Perpustakaan 7. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 8. Program Pengelolaan Pendidikan
2	P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan	Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Program Penguatan Pengadaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Berbasis Rantai Pasok 2. Program Penguatan Rantai Pasok melalui Digitalisasi,	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	1. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 2. Program Stabilisasi Harga



44AB1D3514

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah	Bentuk Dukungan Biro/Kegiatan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Cross Cutting	Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	lingkungan yang tidak eksploitatif	Dalam dan Luar Negeri			Konsolidasi, dan Standardisasi Pengadaan Berbasis E-Katalog			Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 3. Program Pengembangan Ekspor 4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 5. Program Pengembangan UMKM
		Program Stabilitas Ekonomi Makro Daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD		Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Koordinasi Pengendalian Inflasi 2. Fasilitasi Implementasi Program Kerja KDEKS Jawa Barat 3. Monitoring Program Alih Fungsi Lahan 4. Perluasan Akses Keuangan dan Digitalisasi Daerah 5. Penguatan Investasi Ekonomi Kewilayahan di Jawa Barat (Kawasan Rebana dan Jabar Selatan) 6. Pemantauan dan evaluasi Program MBG 7. Pemantauan dan Evaluasi Program KDKMP 8. Fasilitasi Kebijakan Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas	Biro Perekonomian	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



44AB1D3514

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah	Bentuk Dukungan Biro/Kegiatan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Cross Cutting	Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					9. Fasilitasi koordinasi penyalarsan kebutuhan sektor industri dengan pengembangan SDM.			
				Program BUMD Sehat	1. Pengembangan BUMD Sangga Buana 2. Inventarisasi dan Opetimalisasi Aset BUMD 3. Fasilitasi Pembinaan BUMD 4. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan BUMD 5. Fasilitasi dan Pendampingan Penyelesaian Permasalahan BUMD 6. Fasilitasi Perubahan Pengurus BUMD 7. Fasilitasi Merger BUMD 8. Fasilitasi Penyertaan Modal pada BUMD 9. Fasilitasi Usulan Penerapan BLUD pada UPTD di Lingkungan Provinsi Jawa Barat 10. Fasilitasi Regulasi Fleksibilitas BLUD 11. Fasilitasi Pembinaan BLUD Provinsi Jawa Barat.	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan		
3	P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (Lansia dan Penyandang Disabilitas)		Program Kesejahteraan Rakyat	1. Fasilitasi Bantuan Beasiswa Pendidikan untuk siswa tidak mampu dan berprestasi 2. Fasilitasi dan Koordinasi penyusunan rumusan Kebijakan urusan Sosial 3. Fasilitasi dan Korodinasia Penyusunan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program Rehabilitasi Sosial



44AB1D3514

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah	Bentuk Dukungan Biro/Kegiatan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Cross Cutting	Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Rumusan Kebijakan Urusan Non Pelayanan Dasar (Fasilitasi urusan Perhubungan, Statistik, Komunikasi, Informatika, Tenaga Kerja, Perlindungan Perempuan dan anak, Transmigrasi, Masyarakat Desa, Kependudukan dan pencatatan sipil, Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga)			4. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 5. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
4	P4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	Program Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan <i>Good Governance</i> , serta Kerjasama Daerah dan Internasional	Langkah Kesembilan: Kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1. Fasilitasi Penataan Wilayah (Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa) 2. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Penataan Desa di Jawa Barat 3. Fasilitasi Penegakan Batas Daerah dan Rupabumi 4. Fasilitasi Kebijakan Administrasi Bidang Pertanahan dan Kebijakan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 5. Fasilitasi Pembinaan Tata Kelola Kesiapsiagaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kebencanaan melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) 6. Fasilitasi Pengembangan Aplikasi Fasilitasi Administrasi	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5. Badan Penghubung 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 8. Badan Kepegawaian Daerah	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 3. Program Pengelolaan Arsip 4. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 5. Program Perizinan Penggunaan Arsip 6. Program Akreditasi dan Sertifikasi 7. Program Pelestarian Koleksi Nasional



44AB1D3514

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah	Bentuk Dukungan Biro/Kegiatan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Cross Cutting	Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kepala Daerah dan DPRD 7. Fasilitasi Kerja Sama dengan Pemerintah, Lembaga, dan Pihak Ketiga untuk Pembangunan 8. Program Sinergitas Kinerja Kecamatan		9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10. Inspektorat 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13. Seluruh Perangkat Daerah	Dan Naskah Kuno 8. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 9. Program Pelayanan Penghubung 10. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 12. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 14. Program Kepegawaian Daerah 15. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 16. Program Penyelenggaraan Pengawasan 17. Program Perumusan
				Program Kesejahteraan Rakyat	1. Pemberian honorarium Imam dan Penceramah (hari Biasa dan Hari Jumat di Masjid Pemprov) 2. Pengusulan Calon Pahlawan nasional Asal Jawa Barat	Biro Kesejahteraan Rakyat		
				Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi pembuatan produk hukum daerah provinsi; 2. Fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah Kab/Kota; 3. Penanganan Perkara secara litigasi dan non litigasi; 4. Fasilitasi Bantuan Hukum masyarakat miskin; 5. Pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat melalui posko Bale Pananggeuhan; 6. Sinkronisasi dan integrasi seluruh anggota JDIH Provinsi Jawa Barat (JDIH Kab/Kota, JDIH DPRD Provinsi, JDIH DPRD Kab/Kota, dan JDIH Perguruan tinggi),	Biro Hukum dan HAM		



44AB1D3514

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah	Bentuk Dukungan Biro/Kegiatan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Cross Cutting	Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7. Kodifikasi Digital Produk Hukum Daerah khusus regulasi perbatasan (Perda, Pergub, Kepgub, Naskah hukum lainnya termasuk dokumen adat) dalam sistem JDIH Terintegrasi dan Pemahaman kesadaran hukum kepada masyarakat di perbatasan; 8. Pelatihan Penyuluhan hukum (tematik) kepada Paralegal Desa 9. Laporan Penilaian Kepatuhan HAM.			Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 18. Program Pencatatan Sipil 19. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 20. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 21. Program Pendaftaran Penduduk 22. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 23. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 24. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 25. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Desk Pendampingan Input RUP dan pemanfaatan sistem pengadaan; 2. Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa; 3. Penerbitan Surat Edaran Optimalisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 4. Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan melalui Program Webinar "Bale Waluya" yang telah terintegrasi dengan LMS BPSDM; 5. Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui tender/seleksi; 6. Implementasi PBJ Desa (sosialisasi kepada Kabupaten/Kota;	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		



44AB1D3514

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah	Bentuk Dukungan Biro/Kegiatan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Cross Cutting	Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7. Penyusunan SOP Pengadaan Barang/Jasa; 8. Fasilitasi Personil Biro PBJ yang ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan pada Perangkat Daerah; 9. Evaluasi Progres Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah setiap bulannya. 10. Perlindungan Keamanan Informasi pada server LPSE 11. Layanan Helpdesk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
				Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Fasilitasi Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah 2. Fasilitasi Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah.	Biro Perekonomian		
				Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah 2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Realisasi Fisik Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota/Desa	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan		



44AB1D3514

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah	Bentuk Dukungan Biro/Kegiatan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Cross Cutting	Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4. Analisis Perkembangan Pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi			
				Program Penataan Organisasi	1. Revitalisasi Proses Bisnis 2. Reformulasi Formasi ASN 3. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Perluasan fungsi Bale Pananggeuhan di 5 Wilayah; 2. Sawaloka - Ruang Diskusi dan Bincang Santai Terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 3. Adpim Ngabret Saluyu (<i>sharing session</i> pelayanan Pimpinan yang berkolaborasi dengan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat).	Biro Administrasi Pimpinan		
					1. Peningkatan Akuntabilitas Sekretariat Daerah 2. Peningkatan Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah 3. Peningkatan Layanan Kepegawaian Sekretariat Daerah 4. Peningkatan Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah 5. Peningkatan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 6. Peningkatan Layanan Persuratan dan	Biro Umum		



44AB1D3514

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah	Bentuk Dukungan Biro/Kegiatan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Cross Cutting	Program Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kearsipan Sekretariat Daerah 7. Peningkatan Layanan Ketatausahaan Sekretariat Daerah			



44AB1D3514

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Di samping, program yang mendukung ketercapaian program prioritas pembangunan, Sekretariat Daerah memiliki kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Prioritas kegiatan pada Tahun 2027 diarahkan pada penguatan pembinaan, evaluasi, dan sinergi penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pencapaian prioritas pembangunan daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi melalui penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta evaluasi dan penilaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah daerah sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, dilakukan pengendalian capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara triwulanan terhadap perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui pemanfaatan aplikasi e-SPM untuk memastikan pemenuhan target pelayanan dasar secara terukur dan berkelanjutan. Prioritas ini juga didukung melalui fasilitasi pelayanan administrasi kepala daerah serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota guna menjamin tertib administrasi pemerintahan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, serta penguatan koordinasi antarpemerintah daerah.

Di samping itu, prioritas diarahkan pada fasilitasi telaahan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang berfokus pada identifikasi potensi kawasan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan, pelaksanaan Program Sinergitas Kecamatan untuk mengoptimalkan kontribusi kecamatan terhadap pencapaian indikator makro pembangunan daerah, serta fasilitasi penyusunan naskah kerja sama yang berorientasi pada percepatan pencapaian prioritas pembangunan melalui penguatan kolaborasi antarpemerintah dan pemangku kepentingan. Penguatan kebijakan penataan daerah dan penataan desa juga menjadi prioritas sebagai



upaya mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas wilayah dan desa, serta penguatan tata kelola kewilayahan yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Biro Hukum dan HAM

Pada Tahun Anggaran 2027, Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan tujuh program prioritas sebagai arah kebijakan strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang tertib hukum, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Keenam program tersebut disusun secara terintegrasi, mulai dari penyusunan produk hukum, penanganan perkara, pengelolaan sistem informasi hukum, hingga pemberian bantuan hukum dan advokasi bagi masyarakat desa. Program prioritas pertama adalah penyusunan produk hukum daerah provinsi. Dalam program ini, Biro Hukum dan HAM melaksanakan fasilitasi produk hukum daerah provinsi, baik dalam bentuk pengaturan maupun penetapan, melalui deregulasi kebijakan dan harmonisasi regulasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki dasar hukum yang kuat, sinkron dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, serta responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

Program prioritas kedua adalah fasilitasi dan evaluasi produk hukum Kabupaten/Kota. Melalui program ini, Biro Hukum dan HAM melaksanakan fasilitasi dan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kabupaten/Kota, serta melaksanakan klarifikasi terhadap Perda dan Perkada yang telah ditetapkan. Program ini dimaksudkan untuk menjaga keselarasan regulasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga tercipta harmonisasi hukum di seluruh wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, program prioritas ketiga difokuskan pada penanganan



perkara secara litigasi. Dalam program ini, Biro Hukum dan HAM melaksanakan pendampingan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan pejabat daerah dalam penanganan perkara pidana, perdata, dan Tata Usaha Negara (TUN) sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta bertindak selaku kuasa hukum dalam persidangan perkara perdata dan TUN, guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebagai pelengkap penanganan perkara secara litigasi, program prioritas keempat adalah penanganan perkara secara non litigasi. Program ini diwujudkan melalui pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat berupa pemberian informasi, konsultasi, edukasi, serta pendampingan langsung, yang dilaksanakan melalui posko pengaduan Bale Pananggeuhan. Melalui posko ini, masyarakat memperoleh akses layanan hukum yang lebih mudah, cepat, dan tidak berbelit, tanpa harus melalui proses persidangan. Dalam rangka mendukung digitalisasi layanan hukum, program prioritas kelima adalah pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Barat. Program ini dilaksanakan melalui penataan serta pengembangan website JDIH dengan memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence*, sekaligus melaksanakan sinkronisasi dan integrasi seluruh anggota JDIH se-Provinsi Jawa Barat, yang mencakup JDIH Kabupaten/Kota, JDIH DPRD Provinsi, JDIH DPRD Kabupaten/Kota, dan JDIH Perguruan Tinggi. Upaya ini bertujuan mewujudkan sistem informasi hukum yang terpadu, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Pada tahun 2027, kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum kepada Masyarakat melalui Posko Bale Pananggeuhan diselenggarakan sebagai upaya memberikan akses keadilan yang mudah, cepat, dan tanpa biaya bagi warga yang menghadapi permasalahan hukum, baik berupa konsultasi hukum, pendampingan, maupun mediasi penyelesaian sengketa secara kekeluargaan sebelum ditempuh jalur hukum formal; melalui posko ini, masyarakat dapat mengadukan berbagai persoalan seperti sengketa perdata, permasalahan



keluarga, hak atas tanah, maupun administrasi kependudukan kepada petugas atau paralegal yang bertugas secara rutin, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkeadilan bagi seluruh warga.

Terakhir, program prioritas keenam adalah Bantuan Layanan Advokasi Desa (BALAD DESA). Program ini dilaksanakan melalui pelatihan penyuluhan hukum tematik kepada Paralegal Desa, yang bertujuan memberikan advokasi hukum kepada masyarakat dan aparatur desa sebagai bagian dari 12 Program Gerbang Desa. Pada tahun 2027, program ini menargetkan sebanyak 1.200 orang yang akan diberikan pelatihan paralegal, sebagai upaya memperkuat kapasitas hukum di tingkat desa dan mewujudkan desa yang mandiri dalam penyelesaian permasalahan hukum.

Secara keseluruhan, ketujuh program prioritas tersebut mencerminkan komitmen Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam membangun ekosistem hukum yang kuat, mulai dari hulu berupa penyusunan regulasi, hingga hilir berupa pelayanan dan bantuan hukum langsung kepada masyarakat. Rangkaian program ini menjadi fondasi penting dalam mendukung visi *Jabar Istimewa* pada Tahun 2027, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.

c. Biro Kesejahteraan Rakyat

Program dan kegiatan prioritas pada Biro Kesra di tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan, penguatan kehidupan beragama, pelestarian nilai-nilai kebangsaan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada



pemberian fasilitasi dan dukungan pembiayaan, tetapi juga pada penguatan fungsi koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi kebijakan, serta pembinaan kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Biro Kesra.

Salah satu prioritas pada Tahun Anggaran 2027 adalah pelaksanaan kebijakan strategis nasional melalui fasilitasi penyusunan kebijakan Sekolah Rakyat sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden. Dalam pelaksanaannya, Biro Kesra berperan memfasilitasi koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan, regulasi, dan mekanisme implementasi program guna mendukung perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat.

Pada sektor pendidikan, prioritas pembangunan diarahkan untuk mendukung peningkatan indikator pembangunan manusia, khususnya peningkatan partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam bentuk pemberian bantuan pendidikan tinggi (beasiswa) bagi mahasiswa asal Jawa Barat, dukungan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi, fasilitasi pengembangan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU), serta dukungan pembangunan dan rehabilitasi gedung perkuliahan. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Selain pendidikan tinggi, Pemerintah Daerah melalui Biro Kesra juga memberikan perhatian terhadap peningkatan akses pendidikan menengah keagamaan melalui program bantuan pendidikan bagi siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS). Program ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung keberlangsungan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu melalui pemberian



bantuan biaya pendidikan sebesar Rp1.200.000 per siswa sesuai kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Penerima bantuan diprioritaskan bagi siswa yang berasal dari keluarga dalam kategori desil 1 sampai dengan desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), diusulkan oleh satuan pendidikan melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, serta tidak menerima bantuan pendidikan sejenis dari program lainnya.

Pada sektor keagamaan, program prioritas diarahkan untuk memperkuat pembinaan kehidupan beragama, meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan, serta memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dan pembangunan karakter masyarakat. Salah satu kegiatan strategis yang dilaksanakan adalah Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, kapasitas kelembagaan, serta mutu pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan pencatatan nikah, bimbingan keluarga, pembinaan kehidupan keagamaan, dan penguatan moderasi beragama.

Selain itu, Biro Kesra juga memfasilitasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) pada tingkat provinsi maupun nasional sebagai bagian dari upaya pembinaan generasi Qurani dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Al-Qur'an dan Hadits. Kegiatan tersebut didukung dengan penyelenggaraan berbagai peringatan hari besar keagamaan yang meliputi Peringatan Hari Raya Idulfitri, Nuzulul Qur'an, Festival Dulag Istimewa, Hari Raya Iduladha, Hari Santri, serta kegiatan keagamaan lainnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat syiar keagamaan, meningkatkan semangat kebersamaan, serta memperkuat nilai-nilai toleransi dan kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka pelestarian nilai-nilai perjuangan dan penghargaan terhadap jasa para tokoh bangsa, Biro Kesra juga melaksanakan fasilitasi



pengusulan Calon Pahlawan Nasional sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 464.05/Kep.147-Kesra/2024 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun Anggaran 2027, proses pengusulan akan disesuaikan dengan hasil penetapan Kementerian Sosial Republik Indonesia terhadap usulan Tahun 2026. Bagi tokoh-tokoh yang belum memperoleh penetapan sebagai Pahlawan Nasional, Pemerintah Daerah akan kembali memfasilitasi penyempurnaan dokumen, kajian akademik, serta proses pengusulan secara komprehensif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap bangsa dapat terus diwariskan kepada generasi muda sekaligus menjadi bagian dari penguatan karakter masyarakat Jawa Barat.

Seluruh program dan kegiatan prioritas tersebut merupakan wujud komitmen Biro Kesra dalam menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat. Melalui pelaksanaan program yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah, diharapkan dapat tercipta peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pembangunan sumber daya manusia, serta terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang lebih maju, religius, sejahtera, dan berdaya saing.

d. Biro Perekonomian

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2027, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan sejumlah program dan kegiatan prioritas yang selaras dengan arah kebijakan nasional maupun prioritas pembangunan daerah. Program dan kegiatan tersebut diarahkan pada penguatan stabilitas ekonomi



daerah, peningkatan efektivitas kebijakan perekonomian dan infrastruktur wilayah, pengendalian inflasi, penguatan ekonomi syariah, regenerasi petani, pengendalian alih fungsi lahan, perluasan akses keuangan dan digitalisasi daerah, serta penguatan investasi ekonomi kewilayahan. Penetapan prioritas ini menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di seluruh wilayah Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Biro Perekonomian menargetkan peningkatan efektivitas kebijakan perekonomian dan infrastruktur wilayah dalam mendukung pembangunan daerah melalui penguatan tata kelola kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta pengendalian inflasi yang responsif terhadap dinamika harga barang di masyarakat. Sasaran tersebut tercermin dalam IKU perangkat daerah yang menekankan peningkatan efektivitas kebijakan perekonomian dan tindak lanjut hasil evaluasi pengendalian inflasi secara konsisten.

Prioritas utama diarahkan pada Koordinasi Pengendalian Inflasi, Kegiatan ini mencakup penyusunan laporan perkembangan harga pangan 20 komoditas strategis, pelaksanaan rapat koordinasi TPID provinsi dan kabupaten/kota secara berkala, penyelenggaraan High Level Meeting/Pasamoan Agung, pengembangan aplikasi SiLinda Jabar, peningkatan kapasitas TPID, fasilitasi kebijakan pengendalian harga, serta penyusunan rekomendasi penyesuaian HET LPG 3 kg dan tarif air minum. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh 27 kabupaten/kota sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Pada aspek pengembangan ekonomi berbasis syariah, Biro Perekonomian melaksanakan program Ekonomi Syariah yang difokuskan pada fasilitasi implementasi program kerja Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Barat, pengembangan Zona KHAS, Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah, literasi ekonomi dan keuangan syariah, Desa Kacida Istimewa, serta



percepatan sertifikasi halal dan fasilitasi penilaian Adinata Syariah. Program ini diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan meningkatkan daya saing produk halal Jawa Barat.

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka, Biro Perekonomian menetapkan program Regenerasi Petani. Program ini meliputi pelatihan bagi 9.000 petani melalui Learning Management System (LMS), pengembangan LMS, penyusunan rekomendasi kebijakan regenerasi petani, evaluasi pelaksanaan program, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Fokus utama program adalah mendorong lahirnya petani muda, penguatan korporasi petani, peningkatan skala usaha tani, dan perbaikan sistem penyerapan hasil panen.

Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya lahan pertanian, dilaksanakan kegiatan Pengendalian Alih Fungsi Lahan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan program alih fungsi lahan serta penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pada wilayah prioritas seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini diarahkan untuk menjaga lahan pertanian produktif dan mendukung ketahanan pangan daerah. Selanjutnya, guna memperkuat inklusi keuangan dan transformasi ekonomi digital, Biro Perekonomian melaksanakan program Perluasan Akses Keuangan dan Digitalisasi Daerah. Program ini mencakup sosialisasi inklusi keuangan di 27 kabupaten/kota, pembentukan desa ekosistem keuangan inklusif, edukasi literasi keuangan bagi masyarakat, ASN, dan UMKM, fasilitasi akses pembiayaan, implementasi transaksi non-tunai, onboarding UMKM ke platform digital, penguatan TPAKD, serta edukasi pencegahan pinjaman online ilegal dan judi online. Sasaran program meliputi desa dengan tingkat inklusi keuangan rendah, wilayah 3T, kawasan perdesaan, komunitas rentan, sekolah, perguruan tinggi, pesantren, dan klaster komoditas unggulan.



Pada dimensi penguatan pertumbuhan ekonomi kewilayahan, Biro Perekonomian menetapkan program Penguatan Investasi Ekonomi Kewilayahan di Jawa Barat. Program ini diarahkan pada penyusunan peta jalan pengembangan investasi Kawasan Rebana dan Jawa Barat Selatan tahun 2027–2029, pengembangan sistem monitoring investasi, pelaksanaan rapat koordinasi investasi secara triwulanan, penyusunan laporan perkembangan investasi kawasan strategis, telaahan debottlenecking investasi, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Fokus wilayah meliputi Bodebekkarpur, Jawa Barat Selatan, Rebana, dan Perkotaan Cekungan Bandung dengan sektor prioritas industri pengolahan, real estat, perdagangan, transportasi, dan infrastruktur pendukung.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan prioritas Biro Perekonomian Tahun 2027 dirancang untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi daerah, menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, memperluas akses keuangan masyarakat, mempercepat transformasi digital, memperkuat ekonomi syariah, menjaga keberlanjutan lahan pertanian, serta mendorong investasi yang merata antarwilayah. Melalui pelaksanaan program-program tersebut, Biro Perekonomian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta penguatan daya saing ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya.

e. Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2027, Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan kegiatan prioritas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi biro. Salah satu kegiatan prioritas biro yaitu Transformasi BUMD melalui Pengembangan BUMD Sanggabuana, hal ini mengingat Peran Strategis BUMD diantaranya implementasi pasal 33 UUD Tahun 1945 sebagai instrumen negara/daerah dalam cabang produksi penting, kapasitas fiskal (penggerak ekonomi di sektor energi, infrastruktur, pangan dan jasa keuangan), fungsi ganda (menjalankan *public service obligation* sekaligus mengejar profit untuk PAD), serta nilai tambah (optimalisasi asset daerah untuk *multiflier effect*). Sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Pada Tahun 2027, berbagai kegiatan prioritas Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang secara langsung mendukung program direktif Presiden dan Gubernur Jawa Barat telah dilaksanakan dalam rangka percepatan pengadaan barang /jasa. Pada Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi prioritas adalah Pengadaan Pra DPA menjadi upaya strategis untuk melakukan proses pemilihan penyedia sebelum DPA disahkan. Kontrak pekerjaan dapat dilakukan pada awal tahun untuk mendukung percepatan pembangunan dan realisasi belanja. Pada Tahun 2025 dilaksanakan fasilitasi Lelang Pra DPA terhadap 1472 paket pekerjaan dengan pagu Rp 895 Milyar. Paket pekerjaan yang difasilitasi berupa jasa outsourcing, jasa konsultan pengawas dan perencanaan. Fasilitasi upaya percepatan pengadaan proyek – proyek strategis Tahun 2027. Memastikan OPD tepat dalam menentukan metode pengadaan & memenuhi tahapan persiapan pengadaan. Melaksanakan pendampingan pengelolaan kontrak pekerjaan proyek strategis. Pendampingan berupa sosialisasi, layanan konsultasi & desk kepada pelaku pengadaan. Pendampingan Pemanfaatan E-Katalog Versi 6. Memastikan E-Katalog memenuhi kebutuhan pengadaan pada OPD.



Memastikan rencana pengadaan telah diinput dalam aplikasi SiRUP. Memastikan ketepatan dalam input rencana pengadaan. Memastikan pelaksanaan pengadaan tercatat dalam SPSE. Memastikan pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara tepat waktu.

Selanjutnya, pada Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang menjadi prioritas adalah PBJ di Desa dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah UMKM yang tergabung dalam marketplace sehingga membuka pasar yang lebih luas bagi UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dilaksanakan Kick-off Implementasi PBJ di Desa bertempat di Kab. Purwakarta pada tgl 6 Nov 2025, dilanjutkan uji coba implementasi di 4 kabupaten (Purwakarta, Cianjur, Garut & Cirebon) di Tahun 2026. Lanjutan Implementasi PBJ Desa di 14 Kabupaten & 1 Kota bekerjasama dengan tokodaring. Pendampingan penggunaan SPSE (SiRUP, Katalog Elektronik, SPSE) kepada Pelaku Pengadaan. Pada Tahun 2025 telah dilakukan pendampingan kepada 9248 pelaku. Fasilitasi pendampingan pemanfaatan SPSE ke UKPBJ Kab/Kota. Pendampingan kepada 45 OPD tentang Pelaporan pengadaan barang/jasa melalui SPSE, salah satunya dengan fasilitasi secara off-line hadir di OPD.

Lalu pada Bidang Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi prioritas adalah Pendampingan menuju PKP-BJ Proaktif untuk Tingkat Kab/Kota. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan 27 UKPBJ Kab/Kota dengan salah substansi yaitu pembinaan kelembagaan UKPBJ. Pencapaian Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik bagi Provinsi dan seluruh UKPBJ Kab/Kota. Hasil fasilitasi pendampingan ITKP ke Kab/Kota, dari semula terdapat 4 kab dgn ITKP Cukup Baik (2024) menjadi hanya 2 kab dgn ITKP Cukup Baik (2025). Sosialisasi peraturan – peraturan terbaru tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelatihan/Bimbingan Teknis bagi Pelaku Pengadaan di OPD Provinsi, UKPBJ Kab/Kot dan Pelaku Usaha. Fasilitasi



peningkatan kompetensi dan jenjang karier bagi Pejabat Fungsional PPBJ. Fasilitas Peningkatan Wawasan & Sharing Pengalaman Pengadaan Barang/Jasa melalui “Bale Waluya Pengadaan” Biro PBJ yang diresmikan pemanfaatannya sejak 14 Nov 2025. Webinar & Podcast tentang Pengadaan Barang/Jasa dan sejak Awal Tahun 2026 bekerjasama dengan BPSDM Jabar (Penyediaan Materi LMS dan Sertifikat Webinar). Bale Waluya Pengadaan diikuti oleh peserta di lingkup Pemprov. Jabar, Kab/Kota se Jabar, & UKPBJ/Pemda di luar Jabar.

g. Biro Organisasi

Sebagai tindak lanjut atas penyelesaian kajian re-organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2026, Biro Organisasi menetapkan revitalisasi proses bisnis pemerintahan sebagai salah satu kegiatan prioritas Tahun 2027. Kegiatan ini diarahkan untuk menyusun proses bisnis yang selaras dengan desain kelembagaan baru sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Revitalisasi proses bisnis akan memperjelas alur kerja, hubungan antar unit organisasi, pembagian peran dan tanggung jawab, serta mendukung pemisahan fungsi perumusan kebijakan (policy making) dan pelaksanaan kebijakan (policy delivery). Dengan demikian, implementasi struktur organisasi hasil reorganisasi dapat berjalan optimal serta memperkuat akuntabilitas kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain revitalisasi proses bisnis, Biro Organisasi juga memprioritaskan penyusunan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), dan reformulasi kebutuhan formasi ASN sebagai konsekuensi logis dari perubahan struktur organisasi hasil reorganisasi. Kegiatan ini bertujuan memastikan keselarasan antara struktur kelembagaan, tugas dan fungsi organisasi, kebutuhan sumber daya manusia, serta distribusi aparatur pada setiap perangkat daerah. Melalui penyusunan Anjab dan ABK yang komprehensif,



Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan memiliki peta kebutuhan jabatan dan formasi ASN yang lebih proporsional, berbasis proses bisnis dan beban kerja, sehingga mampu mendukung penerapan sistem merit, meningkatkan efektivitas organisasi, serta memperkuat kapasitas birokrasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

h. Biro Administrasi Pimpinan

Pada Tahun 2027, Biro Administrasi Pimpinan tetap memprioritaskan penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai tugas utama perangkat daerah dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan tersebut mencakup dukungan administrasi pimpinan, pelayanan kerumahtanggaan, keprotokolan, komunikasi pimpinan, dokumentasi, serta fasilitasi kegiatan pimpinan yang dilaksanakan secara profesional, responsif, dan adaptif terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain memastikan kualitas pelayanan pimpinan tetap optimal, Biro Administrasi Pimpinan juga menetapkan beberapa kegiatan prioritas sebagai penguatan fungsi pelayanan publik, komunikasi kebijakan, dan sinergi kelembagaan.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Bale Pananggeuhan pada Tahun 2025, pada Tahun 2027 diarahkan perluasan fungsi Bale Pananggeuhan di lima wilayah untuk memperkuat jangkauan pelayanan, penyerapan aspirasi masyarakat, serta pengelolaan pengaduan yang lebih terintegrasi. Selain itu, Biro Administrasi Pimpinan akan melaksanakan SAWALOKA (Ruang Diskusi dan Bincang Santai Terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat) sebagai forum komunikasi kebijakan yang mempertemukan pemerintah daerah dengan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan guna memperoleh masukan strategis terhadap isu-isu pembangunan daerah. Di sisi lain, Adpim Ngabret Saluyu akan terus dilaksanakan sebagai forum sharing session



pelayanan pimpinan yang berkolaborasi dengan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat koordinasi, harmonisasi, serta penyamaan persepsi antara unsur eksekutif dan legislatif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

i. Biro Umum

Prioritas Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 diarahkan pada penguatan tata kelola kawasan pemerintahan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kenyamanan lingkungan kerja. Fokus utama meliputi penataan Kawasan Gedung Sate melalui peningkatan kualitas kawasan, revitalisasi infrastruktur, serta pelestarian nilai historisnya sebagai cagar budaya. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan dilakukan melalui penyediaan fasilitas kerja yang memadai, modernisasi peralatan, dan optimalisasi infrastruktur guna menciptakan lingkungan kerja yang produktif, efisien, dan adaptif. Penguatan Bale Pananggeuhan sebagai pusat pelayanan dan pengaduan terpadu serta penataan Kantor Wilayah Gubernur juga menjadi prioritas untuk mendukung pelayanan publik yang responsif dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, prioritas diarahkan pada peningkatan fasilitas umum dan optimalisasi pengelolaan Kawasan Gedung Sate melalui pemeliharaan kawasan, penguatan keamanan, kebersihan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyediaan ruang publik yang inklusif dan ramah lingkungan. Di samping itu, Biro Umum juga memperkuat fasilitasi pimpinan melalui penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan layanan operasional yang andal guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, koordinasi, dan aktivitas kedinasan pimpinan daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan kawasan



pemerintahan yang representatif, modern, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, serta pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perwujudan tujuan dan sasaran strategis pembangunan akan dicapai melalui pelaksanaan kinerja operasional yang dituangkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Ketercapaian kinerja operasional ini secara bertingkat akan mendukung ketercapaian *output*, *immediate outcome*, *intermediate outcome*, dan *ultimate outcome* yang akan berkontribusi terhadap ketercapaian *outcome* pembangunan sebagaimana diukur dalam target sasaran pembangunan. Pada akhirnya berkontribusi dalam memberikan *impact* kepada masyarakat. Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen RKPD Tahun 2027. Penetapan indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup urusan penunjang pemerintahan daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja *outcome* atau *impact* yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKPD.



Penerapan penjabaran kinerja dalam struktur pada Sekretariat Daerah diterjemahkan ke dalam lima jenjang yang ditempatkan pada level sekretaris daerah (*ultimate outcome*), asisten, kepala biro (*intermediate outcome/program*), bagian/jabatan fungsional madya (*immediate outcome/kegiatan*), dan jabatan fungsional muda/ketua tim (*output/sub kegiatan*). Penjabaran sesuai struktur ini kemudian diintegrasikan dalam tingkatan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Merujuk aturan tersebut, Sekretariat Daerah memiliki delapan program yang terdiri dari tujuh program utama dan satu program pendukung, 29 kegiatan dan 93 sub kegiatan.

Kesuksesan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan direncanakan melalui pemanfaatan sumber daya. Penetapan alokasi sumber daya baik manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran didasarkan kepada indikasi aktivitas yang dibutuhkan untuk dilaksanakan dalam menjamin ketercapaian target tujuan dan sasaran. Pengalokasian sumber daya manusia diperlihatkan dalam penjenjangan kinerja pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang didukung oleh indikasi anggaran pada setiap level. Dari hasil evaluasi pemanfaatan anggaran dan indikasi rencana aksi yang diperlukan untuk satu tahun ke depan Sekretariat Daerah mengindikasikan kebutuhan anggaran secara total sebesar Rp598.699.034.774,00. Selanjutnya untuk memastikan akuntabilitas kinerja, ketercapaian target dalam dokumen ini dipantau dalam aplikasi Japati.

Penjabaran operasional untuk ketercapaian SR1: 'Meningkatnya Proporsi Penduduk Jawa Barat yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi' adalah meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi bagi masyarakat yang tidak mampu. Ketercapaian target kinerja diperoleh melalui pelaksanaan



Program Kesejahteraan Rakyat dengan indikator ‘persentase partisipasi penduduk usia 15 tahun ke atas yang melanjutkan ke pendidikan tinggi’. Penciptaan kondisi ini akan dicapai melalui penyediaan dan implementasi kebijakan program afirmasi pendidikan tinggi khususnya bagi masyarakat jenius dan kurang mampu. Upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan adalah pemastian bahwa kebijakan program afirmasi pendidikan tinggi dirumuskan dan diimplementasikan secara tepat dengan didukung oleh data valid.

Penjabaran operasional untuk SR2: ‘Terkendalnya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat’ pada level program adalah memastikan bahwa kebijakan pengendalian inflasi responsive terhadap isu peningkatan harga barang di masyarakat. Dengan demikian kebijakan dapat secara efektif mengendalikan inflasi. Ketercapaian target kinerja diperoleh melalui pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator ‘persentase kebijakan pengendalian inflasi yang diimplementasi’. Pihak yang melakukan implementasi kebijakan dalam hal ini adalah perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan adalah pemastian bahwa kebijakan pengendalian inflasi dirumuskan secara tepat dengan didukung oleh data dan analisa yang mendalam.

Selanjutnya penjabaran operasional untuk SR3: ‘Meningkatnya Kinerja BUMD’ pada level program adalah meningkatkan kualitas tata kelola keuangan BUMD. Fokus pada tata kelola keuangan BUMD beranjak dari kinerja keuangan sebagai salah satu aspek yang mendukung Tingkat kesehatan BUMD. Selain itu penjabaran operasional yang berfokus kepada tata kelola keuangan BUMD sejalan dengan amanat RPJMN atas pengukuran *Return on Asset* (RoA) BUMD sehingga selaras dengan dengan pengukuran RoA BUMN pada PN7. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja operasional ini diukur dengan RoA BUMD dan dicapai melalui pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan. Adapun upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan adalah



pemastian bahwa aset BUMD dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi yang akan menghasilkan rekomendasi yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh BUMD melalui penetapan kebijakan daerah.

Selanjutnya penjabaran operasional untuk ketercapaian SR4: 'Regulasi yang Adaptif' adalah pemastian regulasi daerah Jawa Barat adaptif. Perwujudan kondisi tersebut untuk memastikan bahwa regulasi Jawa Barat dapat adaptif terhadap perubahan sehingga efektif sebagai solusi bagi permasalahan masyarakat. Ketercapaian target kinerja diperoleh melalui pelaksanaan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan indikator 'Indeks Reformasi Hukum'. Adapun upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan adalah peningkatan kualitas harmonisasi kebijakan serta deregulasi daerah. Harmonisasi kebijakan mengarah kepada kesesuaian kebijakan daerah Provinsi Jawa Barat dengan kebijakan pusat maupun kebijakan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan. Hal ini untuk mencegah adanya tumpang tindih kebijakan maupun kebijakan yang saling bertentangan. Sementara itu, deregulasi kebijakan mengarah kepada pembaharuan terhadap regulasi yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

Disamping harmonisasi dan deregulasi kebijakan, terdapat pula indikator 'Indeks Kepatuhan Daerah' yang menjadi salah satu indikator pada level immediate outcome. Pengukuran indikator ini merujuk kepada amanat RPJPD Tahun 2025-2045 yang menjadikan indikator ini sebagai indikator proxy dari 'Indeks Pembangunan Hukum'. Secara umum, indikator ini digunakan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan berkualitas baik, tepat sasaran, dapat



diimplementasikan secara efektif, dan dengan demikian memiliki dampak terhadap masyarakat.

Penjabaran operasional untuk SR5: ‘Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan’ adalah peningkatan kualitas kebijakan khususnya yang disusun oleh Sekretariat Daerah. Fokus kinerja diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan perumusan kebijakan untuk memastikan kebijakan disusun berbasis data, bukti, dan melibatkan stakeholder terkait. Fokus ke dua adalah pada kualitas evaluasi implementasi kebijakan untuk memastikan kebijakan diimplementasi secara tepat dan memiliki dampak sesuai yang diharapkan. Fokus ke dua ini merupakan pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah dalam melakukan pengendalian implementasi kebijakan.

Ketercapaian target kinerja dilaksanakan melalui tiga program yaitu Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan indikator ‘Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah’ serta ‘Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah’. Kedua adalah Program Kesejahteraan Rakyat dengan indikator ‘Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat’ serta ‘Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat’. Ketiga adalah Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator ‘Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah’, ‘Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah’, ‘Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah’ serta ‘Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah’. Adapun upaya yang dilaksanakan pada level kegiatan dan sub kegiatan adalah pemastian bahwa kebijakan berbasis data, bukti, dan pelibatan stakeholder melalui salah satunya penyusunan naskah akademik serta laporan evaluasi dampak kebijakan.



Ketercapaian SR5 pada pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator ‘Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah’ terdapat amanat RPJMN yang dilaksanakan. PN2 pada SU5 yaitu ‘Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan’ dengan indikator ‘Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global’ menginginkan semua daerah untuk turut mendukung program peningkatan UMKM bersertifikasi halal. Untuk itu, sebagai bagian dari pengendalian regulasi ekonomi syariah Provinsi Jawa Barat dilakukan pengendalian terhadap pemastian jumlah produk bersertifikasi halal di Provinsi Jawa Barat. Untuk ketercapaian output ini, dilakukan koordinasi intensif dengan tiga unit kerja yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan disamping kolaborasi bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jawa Barat.

Target yang ditetapkan mempertimbangkan ruang lingkup intervensi yang dapat dilakukan baik oleh Sekretariat Daerah maupun oleh perangkat daerah yang terlibat.

Tabel 4.1 Target ‘Jumlah Produk Tersertifikasi Halal’

Realisasi Tahun 2025: 600 produk tersertifikasi				
Tahun	2026	2027	2028	2029
Target (produk)	880	949	969	968

Sumber: Biro Perekonomian, Maret 2026

Kemudian, penjabaran operasional untuk ketercapaian SR6: ‘Kinerja Perangkat Daerah mencapai Target’ adalah pemastian bahwa kinerja perangkat daerah berjalan sesuai perencanaan. Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan



indikator ‘persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi akselerasi kinerja’. Adapun Upaya yang dilaksanakan pada level kegiatan dan sub kegiatan adalah pengendalian terhadap kinerja perangkat daerah untuk memastikan implementasi sesuai dengan rencana yang ditunjukkan melalui deviasi kinerja yang diperoleh setiap bulan. Pengendalian terhadap progres kinerja akan dilengkapi dengan rekomendasi terhadap akselerasi yang dapat dilakukan oleh perangkat daerah dan diharapkan dalam mendorong pencapaian sasaran.

Kemudian penjabaran operasional untuk ketercapaian SR7: ‘Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa’ adalah meningkatkan kapabilitas tata kelola UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa). Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator ‘Tingkat Kematangan UKPBJ’. Adapun upaya yang akan dilakukan pada level kegiatan dan sub kegiatan antara lain adalah dengan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa terutama dalam pemanfaatan SPSE, meningkatkan kapasitas SDM pengadaan barang/jasa, serta meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Penjabaran operasional untuk SR8: ‘Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat’ adalah pemastian bahwa penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah memenuhi ekspektasi masyarakat. Target kinerja dicapai melalui pelaksanaan Program Penataan Organisasi dengan indikator ‘persentase perangkat daerah provinsi dengan nilai IKM minimal Sangat Baik’. Upaya yang dilaksanakan pada level kegiatan dan sub kegiatan adalah memastikan bahwa perangkat daerah memenuhi standar pelayanan dan di dalamnya terdapat pemanfaatan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat yang terintegrasi sebagai salah satu akses partisipasi publik dalam peningkatan kualitas layanan. Selain itu juga memastikan bahwa perangkat daerah Provinsi



Jawa Barat menerapkan hasil pembinaan pelayanan publik secara tepat yang akan berdampak kepada kepuasan pengguna layanan mereka.

Kemudian penjabaran operasional untuk SR9: 'Kelembagaan *Agile*' adalah pemastian bahwa kelembagaan Provinsi Jawa Barat tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Perwujudan kondisi ini untuk mendukung peningkatan efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsinya sesuai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penataan Organisasi dengan indikator 'Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur' dan 'Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Proses'. Adapun upaya yang dilakukan pada level kegiatan dan sub kegiatan adalah penataan struktur organisasi, penataan proses bisnis, serta penyediaan jabatan yang dapat mendorong pembentukan organisasi berbasis kinerja.

Penjabaran operasional pada SR10: 'Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah' adalah meningkatkan kualitas tata kelola reformasi birokrasi. Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penataan Organisasi dengan indikator 'persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi'. Adapun upaya yang dilakukan pada level kegiatan dan sub kegiatan adalah memastikan perangkat daerah menerapkan kebijakan rekomendasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi. Disamping itu, fokus juga akan diarahkan kepada memastikan kebijakan budaya kerja diimplementasi secara efektif oleh perangkat daerah.

Pada SR11: 'Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan' dijabarkan secara operasional dengan memastikan pelaporan kinerja berkualitas dan bermanfaat. Selain itu, memastikan agar perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja



terintegrasi. Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penataan Organisasi dengan indikator ‘Nilai Pemenuhan, Kualitas, dan Kebermanfaatan Pelaporan Kinerja’ serta ‘Persentase Tindak Lanjut LHE SAKIP dari KemenPANRB’. Adapun upaya yang dilakukan pada level kegiatan dan sub kegiatan adalah memastikan bahwa pelaporan kinerja baik milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun perangkat daerah memenuhi standar tujuh informasi serta melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya SR12: ‘Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi’ dijabarkan kepada tujuh kinerja level operasional yaitu (1) meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, (2) meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, (3) meningkatkan kualitas dukungan teknis dan administratif dalam persiapan penataan daerah dan penataan desa, (4) meningkatkan efektivitas pelaksanaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP), (5) meningkatkan efektivitas kerja sama daerah, (6) meningkatkan efektivitas kerja sama internasional, serta (7) meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan. Ketercapaian target dilakukan melalui pelaksanaan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan indikator (1) persentase capaian indikator kinerja kunci (IKK) urusan pemerintahan daerah provinsi yang meningkat, (2) persentase kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengalami peningkatan skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah’, (3) persentase dokumen persiapan penataan daerah dan penataan desa yang dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti’, (4) persentase rekomendasi kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP yang terimplementasi, (5) persentase kerja sama daerah yang efektif, (6) persentase kerja sama internasional yang efektif, serta (7) persentase layanan administrasi pemerintahan daerah yang sesuai standar.

Kinerja operasional ‘meningkatkan efektivitas kerja sama internasional’ dengan indikator ‘persentase kerja sama internasional yang efektif’ selain merupakan pengejawantahan pelaksanaan tugas dan fungsi juga sebagai



aplikasi dari amanat RPJMN. PN2 pada SU1: 'Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan' dengan indikator '*Asia Power Index (Diplomatic Influence)*' menginginkan adanya peran pemerintah daerah dalam perwujudannya. Maka, kinerja ini juga menjadi salah satu amanat IUP.

Untuk mendukung penyelenggaraan aktivitas kinerja dalam pencapaian sasaran Renstra, ditetapkan pula kinerja pendukung. Sebagai pelaksanaan salah satu fungsi pelayanan internal ditetapkan sasaran 'Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan' dengan indikator 'Persentase Kebutuhan Pimpinan yang Terpenuhi'. Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Pada level kegiatan dan sub kegiatan upaya yang dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas pelayanan rumah tangga pimpinan, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi pimpinan, serta meningkatkan kualitas layanan keprotokolan.

Fungsi pelayanan internal Sekretariat Daerah yang kedua dijabarkan dalam sasaran 'Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah'. Sasaran ini berfokus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas pada lingkup Setda dengan indikator 'Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah'. Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi dan realisasi ketercapaian diperoleh melalui evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan demikian, Sekretariat Daerah juga merupakan unit kerja yang harus melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi dan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi yang diberikan.

Unit kerja yang menjadi koordinator utama dalam pencapaian sasaran reformasi birokrasi internal Sekretariat Daerah adalah Biro Umum dan



didukung oleh kinerja internal delapan biro lain. Dengan itu, masing-masing biro memiliki sasaran kinerja internal yang tidak hanya mendorong peningkatan tata kelola lingkup biro itu sendiri namun juga berkontribusi terhadap perwujudan tata kelola Sekretariat Daerah yang berkualitas. ‘Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro’ dengan indikator ‘persentase capaian kinerja intervensi reformasi birokrasi Sekretariat Daerah lingkup biro’ merupakan sasaran yang ditetapkan dan diamanatkan untuk dicapai oleh seluruh biro. Dengan demikian, kualitas penyelenggaraan tata kelola biro akan berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyelenggaraan tata kelola Sekretariat Daerah sehingga kolaborasi, komunikasi, dan integrasi harus terus ditingkatkan.

Selanjutnya untuk rencana alokasi anggaran, total pagu anggaran yang dibutuhkan pada tahun 2027 adalah Rp598.699.034.774,00.,00. Adapun komposisi antara anggaran teknis dan penunjang adalah 41,23 persen dan 58,77 persen. Jika dilihat dari total keseluruhan pagu, anggaran teknis sebesar Rp246.824.564.465,00 sementara anggaran penunjang termasuk fasilitasi pimpinan adalah sebesar Rp351.874.470.309,00.

Tabel 4.2 Pagu Anggaran Sekretariat Daerah per Biro tahun 2027

Biro	2026	2027
	526.460.468.088	598.699.034.774
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.415.237.774	973.515.656
Biro Hukum dan HAM	3.079.684.784	3.380.288.096
Biro Kesejahteraan Rakyat	26.834.586.464	195.540.449.251
Biro Perekonomian	2.220.384.824	1.733.833.566
Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	3.778.483.071	809.863.469
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3.011.669.699	2.060.981.753
Biro Organisasi	812.710.598	1.317.193.512
Biro Administrasi Pimpinan	33.191.051.172	43.616.928.002
Biro Umum	452.116.659.702	349.265.981.469

Jika dilihat dari pagu masing-masing biro, Biro Umum memiliki rencana alokasi terbesar yaitu sebesar Rp349.265.981.469,00 atau 58,34 persen dari total keseluruhan anggaran. Besarnya alokasi tersebut disebabkan oleh komposisi belanja yang tercakup di dalamnya, terutama belanja pegawai serta belanja pemeliharaan gedung dan sarana prasarana, baik untuk kebutuhan



perkantoran maupun untuk mendukung pelayanan publik. Selain mencakup pemeliharaan gedung perkantoran seperti Gedung Sate dan kantor gubernur yang berlokasi di lima wilayah, alokasi anggaran Biro Umum juga digunakan untuk pemeliharaan sejumlah area layanan publik yang memerlukan dukungan berkelanjutan antara lain Masjid Al-Jabbar, Area Gasibu, Area Saparua, dan Area Monumen Perjuangan Jawa Barat. Rencana alokasi terbesar kedua ada pada Biro Kesra yaitu sebesar Rp195.540.449.251,00 atau 32,66 persen dari total pagu anggaran. Biro Kesra merupakan unit yang menjadi koordinator utama dalam pencapaian SR1 yang merupakan IUP.

Tabel 4.3 Rencana Alokasi Anggaran per Program Tahun 2027

Biro	2026	2027
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	270.000.000	100.000.000
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.680.240.000	2.842.740.000
Program Kesejahteraan Rakyat	13.722.535.430	181.729.000.000
Program Perekonomian dan Pembangunan	4.187.294.840	1.071.902.565
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	30.000.000	200.000.000
Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	928.314.375	1.860.981.753
Program Penataan Organisasi	599.380.000	1.250.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	505.042.703.443	409.343.410.456
Total Pagu Indikatif	526.460.468.088	598.699.034.774

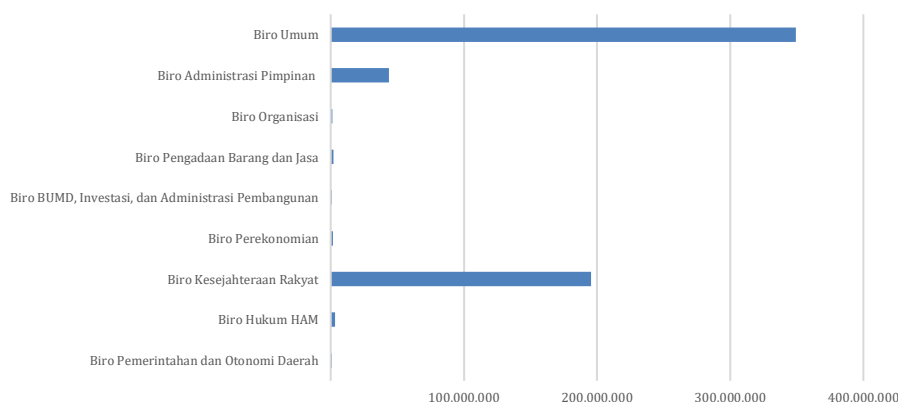
Apabila dilihat dari anggaran program, di antara tujuh program teknis, Program Kesejahteraan Rakyat merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar yaitu Rp13.722.535.430 atau 30,35 persen dari total anggaran. Angka ini memiliki gap yang cukup signifikan jika dibanding program-program lain, Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan dana hibah yang menjadi salah satu mekanisme pembiayaan dalam pencapaian sasaran kinerja yang diampu oleh Biro Kesra. Selanjutnya, terbesar kedua adalah Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang digunakan oleh Biro Hukum dan HAM sebesar Rp2.842.740.000,00 atau 0,47 persen dari total anggaran. Kemudian sebesar 0,31 persen atau Rp1.860.981.743,00 merupakan rencana alokasi anggaran



Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang digunakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program dengan rencana alokasi anggaran terbesar yaitu Rp409.343.410.456,00 atau 68,37 persen dari total pagu tahun 2027. Program ini merupakan program yang digunakan oleh seluruh biro dalam membiayai pemenuhan kebutuhan internal biro dan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola di masing-masing biro. Di dalamnya pula terdapat anggaran yang diperuntukkan bagi fasilitasi pimpinan sebesar Rp28.230.921.900,00 atau 4,72 persen dari total seluruh pagu. Disamping itu belanja pegawai ASN sebesar Rp195.203.575.512,00 atau sebesar 32,60 persen.

Gambar 4.1 Rencana Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2027 per Biro



Rincian program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikasi anggaran tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.4 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.4 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2027

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH										
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Persentase Capaian RB General			Persen	87.65	973,515,656	87.66	7,755,262,656
		Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Poin	83.62	973,515,656	84.77	7,755,262,656
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal, Badan Usaha, Pemerintah dan Lembaga Internasional	Provinsi Jawa Barat	Kategori	Tinggi		Tinggi	
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Poin	42.50	55,000,000	43.33	5,558,251,000
			Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Poin	36.2		36.62	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang Meningkat	Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Persen	50.88		55.26	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang Mengalami	Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Persen	66.67		70.37	



Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peningkatan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							
		Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis dan Administratif dalam Persiapan Penataan Daerah dan Penataan Desa	Persentase Dokumen Persiapan Penataan Daerah dan Penataan Desa yang Dipertimbangkan Untuk Ditindaklanjuti	Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP yang Terimplementasi	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang Efektif	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal, DPRD Jabar, Badan Usaha	Provinsi Jawa Barat	Persen	85.87		86.87	
		Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Internasional	Persentase Kerja Sama Internasional yang Efektif	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal, DPRD Jabar, Badan Usaha, Pemerintah dan Lembaga Internasional	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Sesuai Standar	Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal, DPRD Jabar	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Perencanaan Kebijakan Pemerintahan Berkualitas	Persentase Kebijakan Pemerintahan yang Berbasis Data dan Bukti	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	20,000,000	100	937,028,000



Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Berkualitas	Persentase Kebijakan Pemerintahan yang Diimplementasi secara Tepat	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Persiapan Penataan Daerah	Persentase Dokumen Persiapan Penataan Daerah yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kapasitas Daerah Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru	Persentase Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru yang Meningkatkan Nilai Kapasitas Daerahnya	Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Persen	44.44		55.56	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Persiapan Penataan Desa	Persentase Dokumen Persiapan Penataan Desa yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		1	
		Meningkatnya Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP di Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Meningkatnya Kualitas Penataan Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Persentase Usulan Penataan Batas Wilayah Administrasi yang ditangani sesuai Ketentuan	Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal, DPRD Jabar	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	1	6,000,000	3	282,092,000
	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Wilayah	Terselenggaranya Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah	Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal, DPRD Jabar	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	3	8,000,000	1	568,779,000
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	3	6,000,000	1	86,157,000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal, DPRD Jabar						
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Meningkatnya Penerapan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	15,000,000	100	1,110,255,000
		Tertatanya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Penataan Urusan Pemerintahan Provinsi yang Ditindaklanjuti	Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Memenuhi Standar	Kategori Pencapaian SPM Provinsi Jawa Barat	Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Kategori	Tuntas Paripurna		Tuntas Paripurna	
		Meningkatnya Penerapan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Persen	55.56		59.26	
		Meningkatnya Dukungan Pemerintah Provinsi dalam Penataan Urusan Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Yang Dipertimbangkan Untuk Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemda Kab/Kota	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Meningkatnya Penerapan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Persentase Kabupaten/Kota yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Pemda Kab/Kota	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Memenuhi Standar	Persentase Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Pencapaian SPM Minimal Kategori "Tuntas Utama"	Pemda Kab/Kota, Kementerian	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Pelayanan Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala	Pemda Kab/Kota, Kementerian,	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dan DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai Standar	Daerah dan DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terlayani sesuai standar	Instansi Vertikal, DPRD Jabar						
	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Laporan	3	5,000,000	2	609,338,000
	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Terselenggaranya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	3	5,000,000	1	69,000,000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal, DPRD Jabar	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	1	5,000,000	1	431,917,000
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Kerja Sama Dalam Negeri yang Terimplementasi	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Persen	57	20,000,000	58	3,510,968,000
		Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Pihak Ketiga	Persentase Kerja Sama Pihak Ketiga yang Terimplementasi	Perangkat Daerah Provinsi, Badan Usaha/Swasta	Provinsi Jawa Barat	Persen	40		45	
		Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Internasional	Persentase Kerja Sama Internasional yang Terimplementasi*)	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal, DPRD Jabar, Badan Usaha, Pemerintah dan Lembaga Internasional	Provinsi Jawa Barat	Persen	40		45	
		Pelayanan penerbitan rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala	Persentase permohonan penerbitan	Pemda Kab/Kota, Kementerian,	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai standar	rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terlayani sesuai standar	Instansi Vertikal, DPRD Jabar						
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terselenggaranya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal, DPRD Jabar, Badan Usaha, Pemerintah dan Lembaga Internasional	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	6	6,600,000	6	522,392,000
	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Terselenggaranya Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha / Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Perangkat Daerah Provinsi, Badan Usaha/Swasta	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	29	6,700,000	30	416,172,000
	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	Terselenggaranya Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Kementerian, Instansi Vertikal, DPRD Jabar, Pemerintah dan Lembaga Internasional	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	64	6,700,000	65	2,572,404,000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	100	918,515,656	100	2,197,011,656
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dipenuhi	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	100	45,000,000	100	1,323,496,000
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan	Persentase Realisasi Belanja Biro	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	89.82		90.52	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
1	2	3	4	5	6	7	Target	Pagu	Target	Pagu
		Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Pemerintahan dan Otonomi Daerah							
		Layanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Berkualitas	IKM Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Internal Biro	Kota Bandung	Poin	91.28		91.78	
		Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	52		53	
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	51		53	
		Meningkatnya Implementasi SPBE Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	75		82	
		Meningkatnya Implementasi SPBE Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	75		82	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Internal Biro	Kota Bandung	Laporan	12	45,000,000	12	1,323,496,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Biro	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Disediakan	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	100	873,515,656	100	873,515,656
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Internal Biro	Kota Bandung	Dokumen	1	873,515,656	1	873,515,656
BIRO HUKUM DAN HAM										
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Persentase Capaian RB General			Persen	87.65	3,380,288,096	87.66	3,562,338,796
		Regulasi Daerah Adaptif	Indeks Reformasi Hukum*)	Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	Provinsi Jawa Barat	Poin	99.36	3,380,288,096	99.37	3,562,338,796



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				a, DPRD Jabar, Kementerian, Instansi Vertikal, Masyarakat Umum						
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya Kualitas Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Deregulasi Kebijakan	Perangkat Daerah Provinsi, DPRD Jabar, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Poin	28.22	2,192,500,000	28.23	2,334,917,000
		Meningkatnya Harmonisasi Regulasi Daerah	Nilai Harmonisasi Regulasi	Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a, DPRD Jabar, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Poin	23.52		23.53	
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang- undangan	Peraturan Daerah Sesuai Standar	Indeks Kepatuhan Daerah*)	Perangkat Daerah Provinsi, DPRD Jabar, Kementerian, Instansi Vertikal, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Poin	84.5	730,000,000	85.51	759,900,000
		Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sesuai standar	Persentase Produk hukum Daerah yang sesuai standar	Perangkat Daerah Provinsi, DPRD Jabar, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kajian Hukum	Persentase Permohonan Kajian Hukum yang terlayani sesuai Standar	Perangkat Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Meningkatnya penyebaran layanan produk hukum dan Informasi hukum kepada masyarakat	Persentase produk hukum dan informasi hukum yang disebarluaskan kepada masyarakat	ASN dan Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi hukum	Persentase anggota JDIH yang pengelolaan informasi hukumnya berkategori baik	ASN	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya kesesuaian produk hukum Kab/Kota dengan ketentuan PERUU	Persentase produk hukum daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan	Pemda Kab/Kota, DPRD Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
	Sub Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Terfasilitasinya Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Perangkat Daerah Provinsi, DPRD Jabar, Kementerian, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	30	470,000,000	30	484,100,000
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Terfasilitasinya Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Perangkat Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	800	30,000,000	800	30,900,000
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya	ASN dan Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	120	80,000,000	120	90,400,000
	Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Pemda Kab/Kota, DPRD Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	500	150,000,000	500	154,500,000
	Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara	Persentase Perkara yang Tertangani Sesuai Ketentuan	Gubernur, Wakil Gubernur, Perangkat Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	1,462,500,000	100	1,575,017,000
		Meningkatnya Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Barat	Persentase Desa/Kelurahan sadar hukum di Jawa Barat yang di bina	Pemda Kab/Kota, Kementerian, Desa/Kelurahan, LBH, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Persen	80		88	
		Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) Terimplementasi secara Tepat oleh Perangkat Daerah	Persentase Rencana Aksi Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) Terimplementasi oleh Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Meningkatnya Kualitas Penanganan pengaduan dan Perlindungan Hukum	Persentase pengaduan dan perlindungan hukum yang ditangani sesuai ketentuan	Gubernur, Wakil Gubernur, Perangkat Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin	Persentase permohonan bantuan hukum masyarakat miskin yang terlayani sesuai ketentuan	LBH, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Gubernur, Wakil Gubernur, Perangkat Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Barat	Kasus	15	450,000,000	15	532,142,000
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Pemda Kab/Kota, Kementerian, Desa/Kelurahan, LBH, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Kasus	25	1,012,500,000	25	1,042,875,000
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Hukum dan HAM	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Hukum dan HAM	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	100	1,187,788,096	100	1,227,421,796
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	100	2,240,000	100	2,307,200
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Lingkup Biro yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Internal Biro	Kota Bandung		1	2,240,000	1	2,307,200
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	100	648,000,000	100	671,440,000
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	99.57		99.58	
		Layanan Biro Berkualitas	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro	Internal Biro	Kota Bandung	Poin	96.3		96.5	
		Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	84.93		86.73	
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	77.17		77.63	



Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Internal Biro	Kota Bandung	Poin	93.98		94.22	
		Meningkatnya Implementasi SPBE	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Hukum dan HAM	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	75.06		82.59	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Internal Biro	Kota Bandung	Paket	12	45,760,000	12	49,192,800
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Internal Biro	Kota Bandung	Paket	1	2,000,000	5	4,000,000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Internal Biro	Kota Bandung	Laporan	12	600,240,000	12	618,247,200
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Biro	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Disediakan	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	100	537,548,096	100	553,674,596
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Internal Biro	Kota Bandung	Laporan	12	537,548,096	12	553,674,596
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT										
Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15 Tahun			Tahun	9.54	195,540,449,25 ₁	9.66	215,078,494,17 ₅
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif		Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Persentase Capaian RB General			Persen	87.65		87.66	
		Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi*)	Penduduk usia 15 tahun ke atas	Jawa Barat	Persen	9.97	195,540,449,25 ₁	9.98	215,078,494,17 ₅
		Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Perangkat daerah, lembaga pendidikan tinggi, dan pemangku kepentingan terkait bidang pendidikan tinggi di wilayah	Jawa Barat	Poin	83.62		84.77	



Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
1	2	3	4	5	6	7	Target	Pagu	Target	Pagu
				Provinsi Jawa Barat						
	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Tinggi	Persentase Partisipasi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang melanjutkan ke pendidikan tinggi	Penduduk usia 15 tahun ke atas	Jawa Barat	Persen	9.89	181,437,967,19 ₂	9.9	199,565,763,91 ₁
		Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Perangkat daerah dan lembaga yang terkait di Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Poin	37.76		37.79	
		Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Perangkat daerah dan lembaga yang terkait di Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Poin	43.68		43.78	
	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Meningkatnya Bantuan Pendidikan Tinggi	Persentase Rekomendasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Tinggi yang Ditindaklanjuti	Perangkat daerah, lembaga pendidikan tinggi, dan pemangku kepentingan terkait bidang pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Persen	100	115,075,000,00 ₀	100	126,566,500,00 ₀
		Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Berkualitas	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Berbasis Data dan Bukti	Perangkat daerah dan lembaga yang terkait di Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Persen	72.82		74.23	
		Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Terimplementasi secara Tepat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Diimplementasikan secara Tepat	Perangkat daerah dan lembaga yang terkait di Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Persen	72.82		74.23	
	Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Perangkat daerah, lembaga pendidikan tinggi, dan pemangku kepentingan terkait bidang pendidikan tinggi di wilayah	Jawa Barat	Dokumen	9	115,025,000,00 ₀	9	126,511,500,00 ₀



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
								2027		2028	
								Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					Provinsi Jawa Barat						
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Perangkat daerah dan lembaga yang terkait di Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Dokumen	10	25,000,000	10	27,500,000
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Perangkat daerah dan lembaga yang terkait di Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Dokumen	10	25,000,000	10	27,500,000
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		Perencanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Berkualitas	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Berbasis Data dan Bukti	Perangkat daerah dan lembaga yang terkait di Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Persen	72.82	40,000,000	74.23	44,000,000
			Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Terimplementasi secara Tepat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Diimplementasikan secara Tepat	Perangkat daerah dan lembaga yang terkait di Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Persen	72.82		74.23	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Perangkat daerah dan lembaga yang terkait di Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Dokumen	6	10,000,000	6	11,000,000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,	Perangkat daerah dan lembaga yang terkait di Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Dokumen	10	20,000,000	10	22,000,000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Perangkat daerah dan lembaga yang terkait di Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Dokumen	6	10,000,000	6	11,000,000
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Kebijakan Keagamaan Berkualitas	Persentase Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual yang Berbasis Data dan Bukti	Perangkat daerah dan lembaga yang terkait di Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Persen	72.82	66,322,967,192	74.23	72,955,263,911
		Kebijakan Keagamaan Terimplementasi secara tepat	Persentase Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual yang Diimplementasi secara Tepat	Perangkat daerah dan lembaga yang terkait di Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Persen	72.82		74.23	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Perangkat daerah dan lembaga yang terkait di Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Lembaga	6	15,225,000,000	6	16,747,500,000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Difasilitasi	Perangkat daerah dan lembaga yang terkait di Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Lembaga	6	51,097,967,192	6	56,207,763,911
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Pegawai Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Bandung	Persen	100	14,102,482,059	100	15,512,730,264
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Pegawai Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Bandung	Persen	100	15,000,000	100	16,500,000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Lingkup Biro yang Telah Dikumpulkan	Pegawai Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Bandung	Data	1	15,000,000	1	16,500,000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
								2027		2028	
								Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah						
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Pegawai Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Bandung	Persen	100	217,046,566	100	238,751,222
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro	Pegawai Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Bandung	Persen	95.69		95.7	
			Layanan Biro Berkualitas	IKM Biro Kesejahteraan Rakyat	Pegawai Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Bandung	Poin	77.801		77.868	
			Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Pegawai Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Bandung	Persen	53.97		58.97	
			Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Pegawai Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Bandung	Persen	57.6		57.9	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Pegawai Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Bandung	Poin	92.99		93.45	
			Meningkatnya Implementasi SPBE	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Pegawai Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Bandung	Persen	75		82	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pegawai Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Bandung	Paket	12	53,459,290	12	58,805,219
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pegawai Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Bandung	Laporan	12	143,587,276	12	157,946,003
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Pegawai Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Bandung	Dokumen	3	10,000,000	3	11,000,000
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	Pegawai Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Bandung	Dokumen	6	10,000,000	6	11,000,000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Biro	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Disediakan	Pegawai Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Bandung	Persen	100	13,870,435,493	100	15,257,479,042
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pegawai Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Kota Bandung	Dokumen	12	13,870,435,493	12	15,257,479,042
BIRO PEREKONOMIAN										
Terkendalnya Stabilitas Ekonomi Makro	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Terkendalnya Stabilitas Ekonomi Makro	Tingkat Inflasi*)			Persen	1.5-3.5	1,733,833,566	1.5-3.5	1,785,848,573
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif		Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Persentase Capaian Reformasi Birokrasi (RB General)			Persen	86.5		86.54	
		Terkendalnya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat	Tingkat Inflasi*)	Perangkat Daerah Provinsi, Tim TPID, Bank Indonesia, OJK, BPS, Pemda Kab/Kota, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Persen	1.5-3.5	1,733,833,566	1.5-3.5	1,785,848,573
		Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Poin	83.62		84.77	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kebijakan Pengendalian Inflasi Responsif terhadap Isu Peningkatan Harga Barang di Masyarakat	Persentase Kebijakan Pengendalian Inflasi yang dirumuskan	Perangkat Daerah Provinsi, Tim TPID, Bank Indonesia, OJK, BPS, Pemda Kab/Kota, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	921,877,565	100	949,533,892
		Hasil Evaluasi terhadap Implementasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Pengendalian Inflasi Mutakhir yang Ditindaklanjuti	Perangkat Daerah Provinsi, Tim TPID, Bank Indonesia, OJK, BPS, Pemda	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	



Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kab/Kota, Masyarakat Umum						
		Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Poin	45		45	
		Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Poin	47		49	
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Meningkatnya ketepatan perumusan rekomendasi pengendalian inflasi	Persentase Rekomendasi Pengendalian Inflasi yang Dirumuskan Berdasarkan Data dan Bukti	Perangkat Daerah Provinsi, Tim TPID, Bank Indonesia, OJK, BPS, Pemda Kab/Kota, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	20,000,000	100	20,600,000
		Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Pengendalian Inflasi yang Mutakhir	Persentase Rekomendasi Pengendalian Inflasi yang Mutakhir	Perangkat Daerah Provinsi, Tim TPID, Bank Indonesia, OJK, BPS, Pemda Kab/Kota, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Perencanaan Kebijakan Sarana Perekonomian Berkualitas	Persentase Kebijakan Sarana Perekonomian yang Berbasis Data dan Bukti	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Sarana Perekonomian Berkualitas	Persentase Kebijakan Sarana Perekonomian	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			yang Diimplementasi secara Tepat	Kab/Kota, Instansi Vertikal, Masyarakat Umum						
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Perangkat Daerah Provinsi, Tim TPID, Bank Indonesia, OJK, BPS, Pemda Kab/Kota, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	17	10,000,000	17	10,300,000
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	4	10,000,000	4	10,300,000
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		Persentase Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang Berbasis Data dan Bukti	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	901,877,565	100	928,933,892
			Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang Diimplementasi secara Tepat	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	3	891,877,565	3	918,633,892
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal,	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	3	5,000,000	3	5,150,000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)			Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
									2027		2028	
									Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
						Masyarakat Umum						
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			Tersedianya dukungan data, informasi, dan analisis yang akurat untuk penyusunan kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	2	5,000,000	2	5,150,000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Perekonomian	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Perekonomian	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	100	811,956,001	100	836,314,681
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	100	2,000,000	100	2,060,000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Internal Biro	Kota Bandung	Data	1	2,000,000	1	2,060,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	100	93,241,642	100	96,038,891
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	90.02		90.03	
				Layanan Biro Berkualitas	IKM Biro Perekonomian	Internal Biro	Kota Bandung	Poin	95.3		95.35	
				Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	100		100	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Biro	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Internal Biro	Kota Bandung	Poin	94.11		94.34	
				Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	71		73	
				Meningkatnya Implementasi SPBE Biro Perekonomian	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Perekonomian	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	75		82	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Internal Biro	Kota Bandung	Paket	4	1,000,000	4	1,030,000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Internal Biro	Kota Bandung	Laporan	12	89,741,642	12	92,433,891
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Internal Biro	Kota Bandung	Dokumen	6	2,500,000	6	2,575,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya layanan jasa penunjang biro perekonomian	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Dipenuhi	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	100	716,714,359	100	738,215,790
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Internal Biro	Kota Bandung	Laporan	12	716,714,359	12	738,215,790
BIRO BUMD, INVESTASI, DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN										
Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah			Poin	1.5	809,863,469	1.529	834,159,373
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif		Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Persentase Capaian RB General			Persen	87.65		87.66	
		Meningkatnya Kinerja BUMD	Persentase BUMD Sehat	BUMD Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	83.78	809,863,469	86.48	834,159,373
		Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Poin	83.62		84.77	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan BUMD	RoA BUMD Jabar*)	BUMD Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	1.83	37,000,000	1.95	38,110,000
		Meningkatnya Efektivitas Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah	BUMD dan BLUD Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Poin	42.22		43.14	
		Meningkatnya Efektivitas Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah	BUMD dan BLUD Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Poin	41.4		43.32	
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Aset BUMD dimanfaatkan secara optimal	Persentase BUMD yang Memiliki Aset Produktif	BUMD Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	56.76	27,000,000	59.46	27,810,000



Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Perencanaan Kebijakan BUMD dan BLUD Berkualitas	Persentase Kebijakan BUMD dan BLUD yang Berbasis Data dan Bukti	BUMD dan BLUD Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	BUMD Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	8	10,000,000	8	10,300,000
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	BUMD Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	8	10,000,000	8	10,300,000
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	BUMD Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	4	7,000,000	4	7,210,000
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Perencanaan Kebijakan Investasi Berkualitas	Persentase Kebijakan Investasi yang Berbasis Data dan Bukti	BLUD Provinsi Jawa Barat dan Perangkat Daerah terkait	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	10,000,000	100	10,300,000
		Implementasi dan Evaluasi Kebijakan BUMD dan BLUD Berkualitas	Persentase Kebijakan BUMD, Investasi dan BLUD yang Diimplementasi secara Tepat	BUMD Provinsi Jawa Barat dan Perangkat Daerah terkait	Provinsi Jawa Barat	Persen	92.5		94	
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	BUMD Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	5	10,000,000	5	10,300,000
		Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target	Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja => 0%	Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	95.65	5,000,000	97.8	5,150,000
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Progres kinerja perangkat Daerah sesuai Perencanaan	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti	Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	5,000,000	100	5,150,000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
1	2	3	4	5	6	7	Target	Pagu	Target	Pagu
			Rekomendasi akselerasi Kinerja							
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pengendalian Kinerja Program Pembangunan	Persentase Rekomendasi Akselerasi Kinerja Program Pembangunan yang Mutakhir	Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	5,000,000	100	5,150,000
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Terkendalnya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Laporan	4	5,000,000	4	5,150,000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	767,863,469	100	790,899,373
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	2,050,000	100	2,111,500
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Data	10	2,050,000	10	2,111,500
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	91.41	53,156,354	91.71	54,751,044
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang dipenuhi	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Layanan Biro Berkualitas	IKM Biro	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Poin	91.35		91.77	
		Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	67.63		70	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Poin	92.99		93.45	
		Meningkatnya Implementasi SPBE Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	75		82	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Laporan	12	51,630,124	12	53,179,027
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	6	1,526,230	6	1,572,017
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Biro	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Disediakan	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	712,657,115	100	734,036,829
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Laporan	12	712,657,115	12	734,036,829
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA										
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Persentase Capaian RB General			Persen	87.65	2,060,981,753	87.66	4,887,828,521
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Penyedia Barang/Jasa	Provinsi Jawa Barat	Poin	70.5	2,060,981,753	70.51	4,887,828,521
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola UKPBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Penyedia Barang/Jasa	Provinsi Jawa Barat	Level	3	407,410,008	3	2,700,000,000
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya kapasitas SDM PBJ	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota,	Provinsi Jawa Barat	Poin	21	75,600,000	21	308,000,000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyedia Barang/Jasa						
		Meningkatnya Kualitas Layanan Advokasi pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Permasalahan Barang dan Jasa yang Diselesaikan	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Penyedia Barang/Jasa	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Kematangan UKPBJ Dimensi Kelembagaan	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Penyedia Barang/Jasa	Provinsi Jawa Barat	Level	3		3	
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Penyedia Barang/Jasa	Provinsi Jawa Barat	Orang	128	25,200,000	128	100,000,000
	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Penyedia Barang/Jasa	Provinsi Jawa Barat	Dokume n	12	25,200,000	12	108,000,000
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Penyedia Barang/Jasa	Provinsi Jawa Barat	Dokume n	12	25,200,000	12	100,000,000
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Penyedia Barang/Jasa	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	42,210,000	100	621,000,000
		Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan PBJ	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Penyedia Barang/Jasa	Provinsi Jawa Barat	Poin	25.5		25.51	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Penyedia Barang/Jasa	Provinsi Jawa Barat	Laporan	1	5,400,000	12	108,000,000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Penyedia Barang/Jasa	Provinsi Jawa Barat	Laporan	1	5,400,000	12	243,000,000
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Penyedia Barang/Jasa	Provinsi Jawa Barat	Laporan	1	31,410,000	12	270,000,000
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sesuai Standar	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Sesuai Standar	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Penyedia Barang/Jasa	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	289,600,008	100	1,771,000,000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Penyedia Barang/Jasa	Provinsi Jawa Barat	Laporan	12	100,620,000	12	250,000,000
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Penyedia Barang/Jasa	Provinsi Jawa Barat	Laporan	12	105,400,008	12	1,300,000,000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Penyedia Barang/Jasa	Provinsi Jawa Barat	Laporan	12	83,580,000	12	221,000,000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	100	1,653,571,745	100	2,187,828,521
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	100	5,000,000	100	13,908,000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Lingkup Biro yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Internal Biro	Kota Bandung	Data	1	5,000,000	1	13,908,000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	70.83	5,502,560	70.83	200,000,000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Internal Biro	Kota Bandung	Orang	24	5,502,560	24	200,000,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	100	570,399,917	100	1,553,920,521
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	90.02		90.03	
		Layanan Biro Berkualitas	IKM Biro PBJ	Internal Biro	Kota Bandung	Poin	90.02		90.03	
		Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	100		100	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Internal Biro	Kota Bandung	Poin	91.52		92.41	
		Meningkatnya Implementasi SPBE Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	75		82	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Internal Biro	Kota Bandung	Paket	1	2,870,000	1	150,000,000
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Internal Biro	Kota Bandung	Paket	1	1,540,000	1	63,086,174
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Internal Biro	Kota Bandung	Laporan	12	560,489,917	12	1,327,742,347
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	Internal Biro	Kota Bandung	Dokumen	6	5,500,000	6	13,092,000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
1	2	3	4	5	6	7	Target	Pagu	Target	Pagu
			Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Biro	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Disediakan	Internal Biro	Kota Bandung	Persen	100	1,072,669,268	100	420,000,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Internal Biro	Kota Bandung	Laporan	12	1,072,669,268	12	420,000,000
BIRO ORGANISASI										
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Persentase Capaian RB General			Persen	86.5	1,317,193,512	86.54	1,405,006,517
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat	Indeks Pelayanan Publik*)	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Poin	4.77	1,317,193,512	4.78	1,405,006,517
		Kelembagaan Agile	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Poin	73.093		73.09	
		Meningkatnya Praktek Baik Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Poin	13.73		13.74	
	Program Penataan Organisasi	Pelayanan Publik Perangkat Daerah Memenuhi Ekspektasi Masyarakat	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dengan nilai IKM Minimal SANGAT BAIK	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	97.38	1,102,760,000	97.39	1,184,140,000
		Kelembagaan Tepat Ukuran dan Tepat Fungsi	Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Poin	38.271		38.27	
		Organisasi Tepat Proses	Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Proses	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Poin	34.821		34.82	
		Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelaporan Kinerja Berkualitas dan Bermanfaat	Nilai Pemenuhan, Kualitas, dan Kebermanfaatan Pelaporan Kinerja	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Poin	13.73		13.74	
		Meningkatnya kualitas tatakelola SAKIP	Persentase Tindak Lanjut LHE SAKIP dari KemenPANRB	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Yang Memenuhi Standar Pelayanan	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	602,760,000	100	669,140,000
		Peta Proses Bisnis Sesuai Kebutuhan Kinerja dan Mendorong Terbentuknya Organisasi Berbasis Kinerja	Persentase Proses Bisnis yang Sesuai Ketentuan Arsitektur SPBE	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	52.63		65.79	
		Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat terhadap Kebijakan Tata Laksana	Persentase Pemerintah Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat yang Patuh terhadap Kebijakan Tata Laksana	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Diterapkan	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Meningkatnya kualitas tata kelola budaya kerja	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan budaya kerja	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Pelaporan Kinerja Memenuhi Standar 7 Informasi	Persentase LKIP Pemda dan Perangkat Daerah yang Memenuhi Standar 7 Informasi	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Terintegrasinya Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase komponen SAKIP yang terintegrasi	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	1	19,714,000	1	29,571,000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	2	522,696,500	1	549,044,750



Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	1	20,656,500	1	30,984,750
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Laporan	38	19,516,500	38	29,274,750
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	38	20,176,500	38	30,264,750
	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Struktur dan Tupoksi sesuai dengan Ketentuan Pedoman Penataan Kelembagaan	Persentase Perangkat Daerah dengan Struktur dan Tupoksi yang sesuai dengan Ketentuan Pedoman Penataan Kelembagaan	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	84.21	500,000,000	84.21	515,000,000
		Jabatan sesuai Kebutuhan	Persentase Jabatan yang Sesuai Kebutuhan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase usulan kelembagaan Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti	Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100		100	
	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	1	191,729,000	1	197,480,870
	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	1	239,434,000	1	246,617,020
	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	1	68,837,000	1	70,902,110
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Organisasi	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Organisasi	Biro Organisasi	Kota Bandung	Persen	100	214,433,512	100	220,866,517
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang	Biro Organisasi	Kota Bandung	Persen	100	400,000	100.00	412,000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Disusun sesuai Ketentuan							
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Lingkup Biro yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Biro Organisasi	Kota Bandung	Data	1	400,000	1	412,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Biro Organisasi	Kota Bandung	Persen	100	146,840,000	100	151,245,200
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro	Biro Organisasi	Kota Bandung	Persen	97		97	
		Layanan Biro Berkualitas	IKM Biro	Biro Organisasi	Kota Bandung	Poin	92.26		92.29	
		Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Biro Organisasi	Kota Bandung	Persen	100		100	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Biro Organisasi	Kota Bandung	Poin	93.71		94.17	
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Biro Organisasi	Kota Bandung	Persen	61		64	
		Meningkatnya Implementasi SPBE	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Organisasi	Biro Organisasi	Kota Bandung	Persen	75		82	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Biro Organisasi	Kota Bandung	Paket	12	2,350,000	12	2,420,500
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Biro Organisasi	Kota Bandung	Paket	12	3,000,000	12	3,090,000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Organisasi	Kota Bandung	Laporan	12	88,522,260	12	91,177,928
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Biro Organisasi	Kota Bandung	Dokumen	6	52,967,740	6	54,556,772
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Biro	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Disediakan	Biro Organisasi	Kota Bandung	Persen	100	67,193,512	100	69,209,317



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Biro Organisasi	Kota Bandung	Laporan	12	67,193,512	12	69,209,317
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan	Persentase Kebutuhan Pimpinan yang Terpenuhi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Masyarakat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	43,616,928,002	100	47,978,620,802
		Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Administrasi Pimpinan	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Administrasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan	Kota Bandung	Persen	100		100	
	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan yang Dipenuhi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Masyarakat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	15,613,546,381	100	17,174,901,019
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Masyarakat	Provinsi Jawa Barat	Paket	12	9,823,382,973	12	10,805,721,270
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Masyarakat	Provinsi Jawa Barat	Paket	12	5,790,163,408	12	6,369,179,749
	Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kebutuhan Informasi dan Komunikasi Pimpinan yang Dipenuhi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Masyarakat	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	5,003,985,896	100	5,504,384,486
	Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan	Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Masyarakat	Provinsi Jawa Barat	Dokumen	12	1,277,878,319	12	1,405,666,151
	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Masyarakat	Provinsi Jawa Barat	Laporan	12	1,694,022,585	12	1,863,424,844



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
									2027		2028	
									Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Masyarakat	Provinsi Jawa Barat	Laporan	12	2,032,084,992	12	2,235,293,491
	Kegiatan Fasilitas Keptokolan			Meningkatnya Kualitas Layanan Keptokolan	Persentase Layanan Keptokolan yang Dipenuhi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	5,855,795,177	100	6,441,374,695
	Sub Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Jawa Barat	Laporan	12	1,110,955,486	12	1,222,051,035
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Jawa Barat	Laporan	12	1,234,052,811	12	1,357,458,092
	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keptokolan			Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keptokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keptokolan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Jawa Barat	Laporan	12	3,510,786,880	12	3,861,865,568
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Jawa Barat	Persen	100	36,187,023	100	39,805,725
	Sub Kegiatan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Jawa Barat	Orang	7	36,187,023	7	39,805,725
	Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Pegawai Biro Administrasi Pimpinan	Kota Bandung	Persen	100	19,629,808	100	21,592,788
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Lingkup Biro yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pegawai Biro Administrasi Pimpinan	Kota Bandung	Data	1	19,629,808	1	21,592,788
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Pegawai Biro Administrasi Pimpinan	Kota Bandung	Persen	100	2,664,589,119	100	2,931,048,031
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro	Pegawai Biro Administrasi Pimpinan	Kota Bandung	Persen	95.2		95.3	
				Layanan Biro Berkualitas	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro	Pegawai Biro Administrasi Pimpinan	Kota Bandung	Poin	92.2		92.3	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Pegawai Biro Administrasi Pimpinan	Kota Bandung	Persen	100		100	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Pegawai Biro Administrasi Pimpinan	Kota Bandung	Poin	96.62		96.86	
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Pegawai Biro Administrasi Pimpinan	Kota Bandung	Persen	62		63	
		Meningkatnya Implementasi SPBE	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Administrasi Pimpinan	Pegawai Biro Administrasi Pimpinan	Kota Bandung	Persen	75		82	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pegawai Biro Administrasi Pimpinan	Kota Bandung	Paket	5	379,056,050	5	416,961,655
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pegawai Biro Administrasi Pimpinan	Kota Bandung	Paket	1	60,574,269	1	66,631,696
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pegawai Biro Administrasi Pimpinan	Kota Bandung	Laporan	12	2,041,479,729	12	2,245,627,702
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pegawai Biro Administrasi Pimpinan	Kota Bandung	Dokumen	6	183,479,071	6	201,826,978
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Biro	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Disediakan	Pegawai Biro Administrasi Pimpinan	Kota Bandung	Persen	100	14,423,194,598	100	15,865,514,058
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pegawai Biro Administrasi Pimpinan	Kota Bandung	Laporan	12	14,423,194,598	12	15,865,514,058
BIRO UMUM										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Poin	88.54	349,265,981,469	89.04	349,636,909,511



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Umum	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Umum	Biro Umum	Bandung , Jawa Barat	Persen	100		100	
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SETDA	Nilai SAKIP Setda	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Poin	87.8	59,650,000	88.3	1,014,390,000
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Persen	100		100	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Dokumen	7	38,450,000	7	364,140,000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Dokumen	1	1,000,000	1	234,090,000
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Laporan	18	19,200,000	18	182,070,000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Dokumen	2	1,000,000	2	234,090,000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalitas ASN Lingkup Setda	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setda	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Poin	92.15	115,000,000	92.32	884,340,000
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Dokumen	12	18,450,000	12	260,100,000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Latihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Orang	500	96,550,000	500	624,240,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Kearsipan Sekretariat Daerah Efektif dan Efisien	Nilai Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI)	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Poin	95.97	1,041,290,342	96.15	3,646,024,325
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Biro	Persentase Realisasi Belanja Biro	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Persen	100		100	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Sekretariat Daerah	Bandung, Jawa Barat	Persen	41.57		42.13	
		Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Sekretariat Daerah	Bandung, Jawa Barat	Persen	88.2		88.5	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Sekretariat Daerah	Bandung, Jawa Barat	Poin	93.96		94.43	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Biro Umum	Bandung, Jawa Barat	Poin	86.2		86.7	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Ketatausahaan Sekretariat Daerah	Biro Umum	Bandung, Jawa Barat	Poin	86.2		86.7	
		Meningkatnya Implementasi SPBE	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Umum	Sekretariat Daerah	Bandung, Jawa Barat	Persen	75		82	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekretariat Daerah	Bandung, Jawa Barat	Dokumen	12	160,042,237	12	702,270,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekretariat Daerah	Bandung, Jawa Barat	Paket	25	200,000,000	25	208,080,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sekretariat Daerah	Bandung, Jawa Barat	Paket	12	263,450,000	15	551,554,325
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat Daerah	Bandung, Jawa Barat	Laporan	12	417,798,105	12	2,184,120,000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Bandung, Jawa Barat	Poin	86.2	195,340,275,512	86.7	226,743,596,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN Sekretariat Daerah	Bandung, Jawa Barat	Orang	750	195,263,375,512	750	226,171,376,000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Sekretariat Daerah	Bandung, Jawa Barat	Dokumen	3	38,450,000	3	286,110,000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				
							2027		2028		
							Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Dokumen	3	38,450,000	3	286,110,000
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bandung , Jawa Barat	Persen	100	31,446,008,000	100	2,305,138,651
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bandung , Jawa Barat	Orang	2	31,446,008,000	2	2,305,138,651
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Barang Milik Daerah Tertib Administrasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Persen	100	113,080,000	100	468,180,000
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Laporan	12	113,080,000	12	468,180,000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah Memadai	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Persen	100	2,002,000,000	100	9,514,280,281
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Unit	1	1,000,000	2	1,200,000,000
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Paket	5	250,000,000	5	3,993,080,281
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Unit	12	1,750,000,000	12	3,121,200,000
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Unit	1	1,000,000	2	1,200,000,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Persen	100	81,292,104,310	100	75,329,456,867



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran RPJMD yang Relevan	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun			
							2027		2028	
							Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Laporan	12	81,292,104,310	12	75,329,456,867
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah Berfungsi	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Persen	100	28,357,883,095	100	28,587,063,387
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Terbayarkan Pajaknya	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Unit	500	5,359,883,095	500	11,444,400,000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya/Terehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Unit	20	7,998,000,000	20	13,052,219,594
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya/Terehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Unit	23	15,000,000,000	23	4,090,443,793
	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Meningkatnya Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Persen	100	9,498,690,210	100	1,144,440,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Bandung , Jawa Barat	Paket	12	9,498,690,210	12	1,144,440,000



BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uraian disajikan meliputi IKU sesuai Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tertuang dalam Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026. Kedua jenis indikator kinerja merupakan tolok ukur dengan karakteristik yang berbeda. IKU merupakan indikator kinerja yang berasal dari hasil analisis internal dengan mempertimbangkan masukan stakeholder eksternal sementara IKK merupakan indikator kinerja yang merupakan amanat pemerintah pusat dan terstandar pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025–2029, IKU Sekretariat Daerah tahun 2027 merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian 12 sasaran kinerja yang disusun sesuai dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Keseluruhan indikator kinerja tersebut merepresentasikan core business Sekretariat Daerah yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, fasilitasi, pembinaan, serta pelayanan administratif kepada kepala daerah.

Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025–2029 sehingga telah tersedia data dasar yang memadai untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian sasaran kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian terhadap target beberapa IKU tahun 2027 dengan



mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja, khususnya realisasi capaian tahun 2025, perkembangan kondisi strategis, serta proyeksi kemampuan pencapaian kinerja pada sisa periode Renstra. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan tetap relevan, realistis, terukur, dan mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan tanpa mengubah substansi tujuan, sasaran, maupun indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025–2029.

Tabel 5.1 Target Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027
Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	9,92	9,97
Terkendalinya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat	Tingkat Inflasi	Persen	2,63	1,5- 3,5
Meningkatnya Kinerja BUMD	Persentase BUMD Sehat	Persen	68,75	83,78
Regulasi Daerah Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	Poin	99,34	99,36



Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027
Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Poin	81,17	83,62
Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target	Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja => 0%	Persen	91,30	95,65
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	98,45	70,5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,63	4,77
Kelembagaan <i>Agile</i>	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Poin	68,450	73,093
Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	Persen	100	100
Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	Poin	13,71	13,73
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kategori	N/A	Tinggi



5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 pada capaian urusan pemerintahan penunjang, terdapat dua fokus yang menjadi perhatian Sekretariat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Pertama, fokus pengadaan dengan tiga IKK outcome yang berkaitan dengan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan. Kedua, fokus pelayanan publik yang bertujuan untuk memetakan dan mengukur potensi pelanggaran atau penyimpangan oleh penyelenggara negara. Penilaian ini dilakukan untuk mencegah maladministrasi, meningkatkan kualitas layanan, dan mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan yang berlaku. IKK fokus pengadaan telah termaktub sebagai sasaran dan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi penjabaran IKU: Indeks Tata Kelola Pengadaan sementara itu, IKK fokus pelayanan publik tidak secara langsung menjadi salah satu indikator kinerja pada Sekretariat Daerah baik di level program, kegiatan, maupun sub kegiatan. Hal ini dikarenakan IKK tersebut merupakan hasil evaluasi eksternal yang dipengaruhi oleh tindak lanjut atas pengaduan masyarakat pada unit pelayanan publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, sesuai tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah bertindak sebagai koordinator, pembina, dan fasilitator oleh karena itu, kinerja lebih ditekankan kepada bersifat preventif dibanding kuratif yang diwakili oleh indikator 'Persentase Perangkat Daerah dengan IKM Minimal Sangat Baik' pada level kegiatan dan indikator 'Persentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Standar Pelayanan' pada level sub kegiatan. Kedua indikator kinerja ini lebih menekankan pada aspek pemastian mutu penyelenggaraan pelayanan publik dengan memastikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik terselenggara secara lebih konsisten dan sistematis.



Tabel 5.2 Target Indikator Kinerja Kunci

No	IKK Outcome	Satuan	Tahun 2025			Target 2027	Ket
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	N/A		-	Renstra
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	32,71	N/A			Renstra
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	61,37	N/A			Renstra
4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	Persen	13,62	N/A			Renstra
5	Tingkat	Poin	40	40	100%	40	Kepmen



	Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ)						dagri No 100.2.1. 7-109 Tahun 2026
6	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	29,25	29,35	100,34%	29,27	Kepmen dagri No 100.2.1. 7-109 Tahun 2026
7	Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Poin	22,84	29,10	127,40	23,24	Kepmen dagri No 100.2.1. 7-109 Tahun 2026
8	Nilai Penilaian Mal Administrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Poin	N/A	80,09	-	80,10	Kepmen dagri No 100.2.1. 7-109 Tahun 2026



BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029 dengan memedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2027. Penyusunan dokumen ini berlandaskan pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.

Renja Sekretariat Daerah tahun 2027 disusun untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu gubernur dalam perumusan kebijakan serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025–2029 serta dokumen perencanaan lima tahunan Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025–2029. Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renja ini telah diselaraskan dengan sasaran pembangunan daerah maupun sasaran pembangunan nasional yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian, dokumen Renja Sekretariat Daerah tahun 2027 harus menjadi komitmen bersama seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan



Anggaran (RKA) perangkat daerah serta menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja organisasi.

Di dalam Renja Sekretariat Daerah tahun 2027 dimuat sasaran strategis yang pencapaiannya diukur melalui IKU yang selaras dengan sasaran strategis Renstra Sekretariat Daerah. Kinerja tersebut dijabarkan secara operasional melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh biro di lingkungan Sekretariat Daerah. Dukungan pendanaan yang dialokasikan dalam dokumen ini merupakan indikasi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun perencanaan 2027 guna memastikan keberlanjutan kinerja dalam mendukung terwujudnya visi Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Sekretariat Daerah yang dijabarkan dalam RKA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk LKIP yang selanjutnya akan menjadi bukti pencapaian kinerja. Renja Sekretariat Daerah tahun 2027 ini juga harus dijadikan acuan kerja bagi seluruh biro di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing biro. Semua biro juga diharapkan dapat melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan secara bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga dan peningkatan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat diwujudkan.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Sekretariat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan



dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 dan Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029.

6.2. Kaidah Pelaksanaan

Renja Sekretariat Daerah yang merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 menjadi pedoman penting dalam menjalankan program dan kegiatan tahunan untuk penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah termasuk setiap unit kerja di dalamnya, sesuai struktur perangkat daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 dan kegiatan yang ada di dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya yang didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kab/kota, masyarakat dan dunia usaha.

Pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 Sekretariat Daerah dijabarkan dengan berorientasi pada komitmen dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan kinerja Sekretariat Daerah dijabarkan ke dalam 12 sasaran Renstra, yaitu: meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan tinggi, terkendalinya stabilitas harga daerah Jawa Barat, meningkatnya kinerja BUMD, regulasi daerah adaptif, meningkatnya efektivitas dukungan kebijakan terhadap pembangunan, kelembagaan *agile*, meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah, pelaporan kinerja penda berdampak pada akselerasi kinerja pembangunan, kinerja perangkat daerah mencapai target, meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik Jawa Barat.

Seluruh Biro di bawah lingkungan Sekretariat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2027 sesuai dokumen ini dengan sebaik baiknya serta berkewajiban untuk menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun



dengan berpedoman pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029.

6.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Selanjutnya untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2027, diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan proses pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan, sekaligus menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan guna memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam kurun waktu satu tahun perencanaan.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi mencakup pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra maupun Renja perangkat daerah. Pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dilakukan terhadap indikator kinerja organisasi, rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pemantauan dan supervisi tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa indikator kinerja Sekretariat Daerah, rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja Sekretariat Daerah.

Sekretaris Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dan Renja Sekretariat Daerah serta melaporkan hasilnya kepada gubernur melalui Kepala Bappeda. Kebijakan serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Sekretariat Daerah akan dievaluasi setiap tahun



melalui LKIP, sedangkan evaluasi terhadap Renstra Sekretariat Daerah dilakukan pada pertengahan periode perencanaan dan pada akhir periode lima tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penyusunan dokumen ini masih dimungkinkan terdapat berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan dokumen perencanaan akan terus dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Semangat perbaikan berkelanjutan menjadi komitmen bersama seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 disampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja kerasnya.



LAMPIRAN



44AB1D3514

PA SEKOLAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code
atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon: (022)4232448-4233347-4230963
Faksimile: (022)4203450 Website: www.jabarprov.go.id E-mail: info@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40115

BERITA ACARA KESEPAKATAN
NOMOR: 52/TU.04/UM
HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2027

Pada hari Rabu tanggal 11 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 bulan Februari tahun 2026 telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi Rancangan Renja Tahun 2027 lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat oleh Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si; materi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2027 Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat oleh Drs. H. Asep Sukmana, M.Si.; materi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2027 Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan oleh H. Sumasna, ST., MUM; materi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2027 Lingkup Asisten Administrasi Umum oleh Dra. Nanin Hayani Adam, M.Si; serta materi "Transformasi SDM Aparatur dan Tata Kelola Pembangunan Menuju Jawa Barat Istimewa" oleh Helmy Yahya, MPAcc, Akt., CPMA, CA., Ak.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum perangkat daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:
Hari dan Tanggal : Rabu, 25 Februari 2026
Jam : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22 Bandung

Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027:

MENYEPAKATI

- KESATU : Program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan;
- KEDUA : Menyepakati rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA : Daftar usulan program dan kegiatan lintas perangkat daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini;
- KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 ini;
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bandung, 25 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,


Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

KOMISI I
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,


H. SUGIANTO NANGOLAH, S.H., M.H.

REKTOR
UNIVERSITAS TELKOM,


Prof. Dr. SUYANTO, S.T., M.Sc

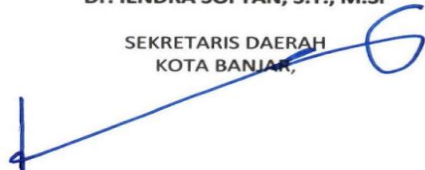
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,


DEDI MULYADI, S.STP., M.Si

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,


Dr. IENDRA SOFYAN, S.T., M.Si

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJAR,


Dr. H. SONI HARISON, AP, S.Sos., M.Si., CPCHR

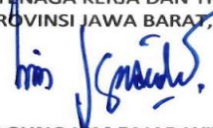
REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,


Prof. Dr. Ir. TATACIPTA DIRGANTARA, M.T.

DIREKTUR
OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT


YUZIRWAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT,


Dra. Hj. I GUSTI AGUNG KIM FAJAR WIYATI OKA, M.Si

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,


H. ADE SURYAMAN, S.H., M.M.

DIREKTUR UTAMA
PT JAMKRIDA JAWA BARAT,


BOBBY CAHYADI
